



Yeni Prima Hesti
Ishomuddin
Tri Sulistyarningsih
Budi Suprpto

PILIHAN RASIONAL
— **Pendirian** —
Universitas
Muhammadiyah
Madiun

**PILIHAN RASIONAL PENDIRIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MADIUN**

Yeni Prima Hesti
Ishomuddin
Tri Sulistyaningsih
Budi Suprpto

PILIHAN RASIONAL
— **Pendirian** —
Universitas
Muhammadiyah
Madiun

Copyright ©2023, Bildung
All rights reserved

Pilihan Rasional Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun

Yeni Prima Hesti
Ishomuddin
Tri Sulistyaningsih
Budi Suprpto

Desain Sampul: Ruhtata
Layout/tata letak Isi: Tim Redaksi Bildung

Pilihan Rasional Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun/Yeni Prima Hesti,
Ishomuddin, Tri Sulistyaningsih, Budi Suprpto/Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2023

x + 158 halaman; 15,5 x 23 cm
QRCBN: 62-2578-1519-147

Cetakan Pertama: Oktober 2023

Penerbit:

Bildung

Jl. Raya Pleret KM 2
Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791
Email: bildungpustakautama@gmail.com
Website: www.penerbitbildung.com

Anggota IKAPI

Bekerja sama dengan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari Penerbit dan Penulis

KATA PENGANTAR

*A*lhamdulillahirabbil al'amin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kasih dan sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku dengan judul “Pilihan Rasional Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun”

Sholawat dan salam tercurah atas junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut Beliau sampai akhir zaman. *Aamiin ya Rabbal alamin*. Besar harapan penulis, buku ini dapat menjadi salah satu pilihan penambah wawasan bagi khalayak dengan memberikan informasi tentang Pilihan Rasional Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan buku ini. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan buku ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Akhsanul In'am, Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Prof. Dr. Oman Sukmana, M.Si., selaku Ketua Program Studi Doktor Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Tim Penulis: 1) Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si., 2) Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si. 3) Assc. Prof. Budi Suprpto, Ph.D, yang telah mendampingi dan memberikan masukan serta arahan selama proses penulisan.
4. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Doktor Sosiologi, Direktorat Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Mujahidin, S.Sos., S.Pd.I., M.Si., M.KPd yang telah telah memberikan nasehat-nasehat dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
6. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Doktor Sosiologi Direktorat Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, terkhusus kepada Drs.Mahfudz Daroini, M.Si., M.KPd dan Muhammad Natsir, M.Pd
7. Kedua orang tua penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini.

Semoga segala bantuan dari berbagai pihak mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT. Harapan penulis, semoga laporan kajian disertasi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, serta dalam pelaksanaan kajian dapat diselesaikan dan dikembangkan menjadi lebih baik.

Malang, September 2023

Penulis,

Yeni Prima Hesti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I DASAR-DASAR PENDIRIAN UNIVERSITAS	1
A. Tuntutan Masyarakat terhadap Kebutuhan Pendidikan Tinggi.....	1
B. Manfaat Penelitian.....	8
C. Batasan Penelitian.....	9
D. Pengertian Istilah	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	11
A. Kajian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	13
1. Pengertian Kecenderungan Global	13
2. Pengertian Pendidikan.....	15
3. Pendidikan Tinggi.....	18
C. Teori Pilihan Rasional (<i>Rational Choice</i>).....	27
1. Pengertian Teori Pilihan Rasional.....	27
2. Teori Pilihan Rasional James S. Coleman.....	35

BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Paradigma Penelitian	43
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
C. Fokus, Unit, dan Lokasi Penelitian	50
D. Subjek dan Informan Penelitian	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisis data.....	54
G. Uji Keabsahan Data	56
 BAB IV HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Hasil Kajian.....	60
1. Preferensi apa yang mendasari Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun berdasarkan Teori Pilihan Rasional	60
a. Menuju Perguruan Tinggi Sebagai Pusat Pelayanan Universal dan Pemberdayaan Masyarakat	60
b. Rencana penyatuan AKBID Muhammadiyah dan STISIP Muhammadiyah Madiun ke Universitas Muhammadiyah Malang.....	73
2. Proses Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Dari STISIP Muhammadiyah Madiun, AKBID Muhammadiyah Madiun Menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun berdasarkan Teori Pilihan Rasional.....	83
B. Pembahasan	122
1. Preferensi apa yang mendasari Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun berdasarkan Teori Pilihan Rasional	123
a. Menuju Perguruan Tinggi Sebagai Pusat Pelayanan Universal dan Pemberdayaan Masyarakat	124
b. Rencana penyatuan AKBID Muhammadiyah dan STISIP Muhammadiyah Madiun ke Universitas Muhammadiyah Malang.....	130

2. Proses Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Dari STI-SIP Muhammadiyah Madiun, AKBID Muhammadiyah Madiun Menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun	131
BAB V PENUTUP	148
A. Kesimpulan.....	148
B. Prposisi.....	151
C. Implikasi Teori.....	152
DAFTAR PUSTAKA.....	153

BAB I

DASAR-DASAR PENDIRIAN

UNIVERSITAS

A. Tuntutan Masyarakat terhadap Kebutuhan Pendidikan Tinggi

Meningkatnya tuntutan dan kepentingan masyarakat akan pendidikan dalam hal ini pendidikan tinggi menjadi peluang tersendiri bagi perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta (PTS) untuk bersaing menarik minat masyarakat agar memilih institusinya” (Widjajanti, 2015). Namun, persaingan kampus dalam memperebutkan pasar mahasiswa ini cukup berat di tengah persaingan, peningkatan mutu menjadi hal yang tidak terhindarkan agar dapat bersaing mendapat kepercayaan masyarakat dan tetap eksis. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat (Evaliandia, 2020). Layanan akademik berikut fasilitas pendukungnya menjadi salah satu pertimbangan calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikannya, sehingga kualitas layanan men-

jadi salah satu indikator dari keberhasilan institusi pendidikan sebagai sebuah organisasi public (Zaky, 2019).

Mulai terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi tanggal 10 Agustus 2012 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi telah menetapkan prosedur dalam pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi baru. Sebelum Undang-undang Dikti ditetapkan, baik izin pendirian perguruan tinggi maupun izin pembukaan program studi, diterbitkan terlebih dahulu setelah memenuhi persyaratan berdasarkan aturan yang berlaku Kemudian, dalam kurun waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan izin tersebut (khususnya izin program studi), perguruan tinggi wajib meminta akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Setelah UU Dikti berlaku, izin pendirian perguruan tinggi diterbitkan Menristekdikti apabila proposal pendirian perguruan tinggi telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi institusi. Demikian pula, izin pembukaan program studi akan diterbitkan Menristekdikti apabila proposal pembukaan program studi tersebut telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi. Dengan demikian, setelah Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang izin pendirian perguruan tinggi, maupun izin pembukaan program studi, BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) terkait akan meregistrasi hasil evaluasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari perguruan tinggi yang akan didirikan, atau diubah, dan/atau program studi yang akan dibuka dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018.

Pengalaman menunjukkan kelengkapan dan ketepatan usulan Instrumen dan prosedur yang diterapkan telah mampu meningkatkan efisiensi pemrosesan usul tersebut. Tentu saja ma-

sih terdapat berbagai hal yang dapat dikembangkan lebih lanjut agar mampu mempersingkat waktu pemrosesan usul yang diajukan. Untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi pemrosesan usul yang diajukan, telah diterbitkan buku Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi dimaksudkan untuk memandu para pihak yang akan mengusulkan pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta serta pembukaan program studi pada perguruan tinggi.

Proses administrasi pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta, serta pembukaan program studi pada perguruan tinggi yang telah dilakukan secara daring atau online sejak Januari 2015 masih tetap dilanjutkan, sehingga selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien, serta memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi yang memiliki maksud untuk merger atau penggabungan, dengan tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi masyarakat, sehingga kapasitas Perguruan Tinggi bukan hanya sebagai pencipta dan pendiseminasi ilmu pengetahuan saja, namun demikian Perguruan Tinggi merupakan suatu organisasi yang mampu merekrut orang-orang berbakat, memunculkan inovasi baru, memperkaya kualitas hidup dan budaya, serta sebagai agen perubahan.

Perubahan wajah dan *trademark* (*brain image*) sudah barang tentu harus dibarengi dengan perubahan watak, sikap mental, manajemen, dan strategi pengelolaan agar memiliki distingsi yang dapat diandalkan untuk mengetahui solusi yang mungkin dapat diambil dalam mengatasi kendala atau permasalahan yang terjadi dalam penerapan sistem tata kelola Perguruan Tinggi (Quy-en, 2014). Menghadapi kondisi ini, hal utama yang harus diprioritaskan oleh Perguruan Tinggi adalah bagaimana tata kelola yang telah diterapkan oleh Perguruan Tinggi tersebut, sehingga dapat

melaksanakan pelayanan maksimal dan mendapat kepercayaan dari mahasiswa, sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas utama bagi setiap perguruan tinggi yang saat ini dijadikan tolak ukur keunggulan daya saing Perguruan Tinggi (Rudiawie *et al.*, 2018). Langkah awal yang seharusnya dikerjakan adalah meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi salah satunya dengan penggabungan.

Penggabungan usaha melalui merger dan akuisisi merupakan salah satu strategi untuk memperoleh sinergi, strategic opportunities dan meningkatkan efektifitas. Aktivitas penggabungan usaha dapat mengatasi keadaan lingkungan bisnis dan ketatnya persaingan (Foster dalam Payamta, 2004). Penggabungan usaha juga terjadi dalam lembaga pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti membuka kesempatan usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Tahun 2019. Jika perubahan PTS menjadi perguruan tinggi berbentuk universitas maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat perubahan tersebut adalah program studi STEM dan tetap mengikuti komposisi minimal 3 (tiga) program studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan dan 2 (dua) program studi dari rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan.

Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD) sebagai institusi PT baru di Kota Madiun yang eksistensinya mulai 20 Februari 2020 tepat pada masa pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD) terbentuk dari penggabungan dari 2 (dua) institusi PT Muhammadiyah Kota Madiun, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP)

Muhammadiyah Kota Madiun dan Akademi Kebidanan (AKBID) Muhammadiyah Kota Madiun serta penambahan 4 (empat) program studi baru yang berbasis *science, technology, engineering, and mathematics* (STEM).

Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD) merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat, khususnya di Kab/Kota Madiun untuk memiliki pilihan atas ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menjawab kebutuhan di era disrupsi peradaban yang pergeseran dinamikanya sangat cepat dan berbasis adaptif terhadap setiap aspek perubahan sosial. Keberadaan Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD) ini tentu telah melalui studi kelayakan di beberapa aspek yang urgen untuk level Perguruan Tinggi yang berada tepat di Kota Madiun dan merupakan perwujudan dari interaksi sosial antara BPH Pendirian Universitas dan Tim Pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun. Hal ini sesuai dengan teori Tindakan sosial menurut Max Weber, bahwa perilaku manusia yang bermakna tertentu dengan mempertimbangkan keberadaan individu lain dalam lingkungan sosial masyarakat. Adapun tindakan sosial merupakan pewujudan dari interaksi sosial antarindividu. Dalam interaksi ini, terdapat variasi hubungan yang menunjukkan proses berpikir, tujuan yang akan dicapai, dan cara mencapai tujuan tersebut artinya, tindakan sosial bukan hanya merujuk pada segala aktivitas yang dilakukan manusia secara individual, melainkan praktik-praktik yang dilakukan seseorang dalam konteks sekumpulan aktor atau kelompok-kelompok sosial yang memiliki gagasan dan pertimbangan logis. Dalam kajian ini, peneliti akan mendiskripsikan tentang konsepsi pendidikan yang mampu menerjemahkan dan memberi solusi yang realistis, faktual, dan masih dalam koridor aturan akademis atas kebutuhan sekaligus situasi *users* atau pengguna (mahasiswa) yang pada saat masih bernama STISIP Muhammadiyah Madiun mayoritas adalah para birokrasi dan swasta lainnya yang

harus membagi waktu antara jam kerja dengan menempuh kewajiban akademik di kampus. Dari aspek praktis, mereka tidak kalah piawai dari mahasiswa murni, tetapi dari aspek teoritis, inilah sebenarnya substansi yang menjadi telaah dari riset ini.

Oleh karena itu, STISIP Muhammadiyah Madiun terus berupaya mencari terobosan-terobosan serta strategi yang kreatif dan inovatif melalui sejumlah program pengembangan yang salah satu programnya adalah pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam bentuk Bakti Sosial Kampus (BSK) dengan slogan kegiatan ini adalah Berbagi Atensi, Sinergi Kampus dan Desa (GIAT SIKADES) yang berperan menjadi embrio dalam pelaksanaan pembelajaran *in class* dan *out class*.

Konsep kegiatan ini merupakan penerapan berbagai disiplin ilmu diaplikasikan secara normatif melalui berbagai kegiatan di antaranya identifikasi masalah-masalah sosial, observasi dan studi kelayakan, diskusi masalah-masalah sosial, serta mencari solusi pemecahan masalah sosial. Seluruh kegiatan yang dijalankan merupakan refleksi dari *link and match*, yaitu keterkaitan dan kesepadanan antara aplikasi ilmu pengetahuan dari institusi kampus dengan upaya pembangunan kesejahteraan sosial dari institusi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan STISIP Muhammadiyah Madiun merupakan bentuk kerja sama institusional antara pihak Perguruan Tinggi dengan birokrasi pemerintahan dalam rangka percepatan usaha-usaha pembangunan guna mencapai kesejahteraan sosial masyarakat. Dari kegiatan ini bermaksud sebagai cerminan dari harmonisasi komunikasi antara STISIP Muhammadiyah Madiun sebagai institusi pendidikan tinggi dengan Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai institusi pemerintahan dan merupakan semangat untuk mempercepat pembangunan yang dimulai dari masyarakat pedesaan.

Langkah-langkah inovatif dari kampus untuk menjembatani realitas menuju idealitas kapasitas lulusan yang mayoritas berasal dari pekerja dan yang menjadi *starting* awal dilakukannya inovasi pembelajaran, keseimbangan antara teori dan praktek akademik, serta menjadi bagian dari strategi dalam implementasi rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018.

Pendirian UMMAD di Kota Madiun merupakan pilihan rasional (*rational choice*). Coleman (1990) menyatakan bahwa pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi).

Berdasarkan pada buku Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi berbagai alasan penggabungan perguruan tinggi swasta, antara lain: a. Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat jumlah program studi dalam rumpun ilmu untuk suatu bentuk perguruan tinggi swasta; b. Badan Penyelenggara (untuk PTS) yang hendak mengubah bentuk 1 (satu) PTS yang dikelolanya dengan menambahkan program studi non STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), tetapi terkendala karena pembukaan program studi non STEM sedang dimoratorium, dapat mengambil alih PTS lain yang memiliki program studi non STEM untuk digabungkan dengan PTS yang akan mengubah bentuknya; c. Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi pada beberapa perguruan tinggi swasta, sehingga penggabungan beberapa perguruan tinggi swasta tersebut menjadi 1 (satu) perguruan tinggi swasta baru akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi perguruan tinggi swasta yang baru; d. Beberapa PTS yang dikelola oleh masing-masing Badan Penyelenggara tidak

memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non akademik, dalam penyelenggaraan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila dilakukan penggabungan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS baru.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti terdorong untuk mengetahui proses pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun dan hal apa yang mendorong dan menghambat dalam proses pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul, yaitu Pilihan Rasional Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah, yaitu:

1. Preferensi apa yang mendasari Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun dalam Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun berdasarkan teori Pilihan Rasional?
2. Bagaimana Proses Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Dari Stisip Muhammadiyah Madiun, Akbid Muhammadiyah Madiun Menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun.

B. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kerangka konseptual kajian ini merupakan tindakan pilihan rasional dalam pengembangan tata kelola perguruan tinggi. Hasil kajian ini memberikan wacana berupa informasi tentang teori pilihan rasional dalam pendirian, penggabungan dan pembukaan prodi baru sebagai memperkaya khazanah pengetahuan terkhusus dalam tata kelola pendirian dan perubahan perguruan tinggi melalui pendekatan kajian kualitatif manfaat bagi PTM khususnya dan PTS pada Umumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil kajian diharapkan dapat berguna untuk pengembangan pengelola perguruan tinggi dalam bentuk institut, sekolah tinggi, dan akademi dalam mengambil tindakan yang berkaitan dengan perubahan bentuk institusi tata kelola perguruan tinggi

C. Batasan Penelitian

Batasan kajian diperlukan oleh peneliti untuk membatasi seberapa luas jangkauan kajian yang dilakukan oleh peneliti baik itu objek dan ruang lingkungannya, sehingga objek yang diteliti lebih fokus dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Adapun batasan kajian yang diambil, yaitu:

1. Objek Kajian Adalah Alasan Tim Pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun Dalam Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun Berdasarkan Perspektif Pilihan Rasional.
2. Untuk Membahas Proses Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Dari STISIP Muhammadiyah Madiun, AKBID Muhammadiyah Madiun Menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun Berdasarkan Teori Pilihan Rasional.

D. Pengertian Istilah

Teori Pilihan Rasional adalah sebagai sebuah eksplanasi tentang bagaimana atau bagaimana seharusnya individu atau kelompok mengambil keputusan. kerangka pemikiran untuk memahami dan merancang model perilaku sosial dan ekonomi. Asumsi dasar teori pilihan rasional adalah seluruh perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusannya sendiri.

Perubahan Bentuk tata kelola dengan cara Penggabungan, Penggabungan adalah Menggabungkan 2 (dua) perguruan tinggi

swasta atau lebih menjadi 1 (satu) perguruan tinggi swasta baru. Untuk PTS penyelenggara perguruan tinggi baru tersebut adalah salah satu badan penyelenggara dari salah satu PTS yang bergabung.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Terdahulu

Upaya untuk mendukung permasalahan terhadap suatu bahasan, peneliti menggunakan *literature* dan kajian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Kajian terdahulu ini digunakan sebagai referensi, yang kemudian digunakan untuk membedakan dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti.

Kajian Hardi Mulyono dan Arief Hadian pada tahun 2019 yang berjudul Pilihan Rasional Perguruan Tinggi Sebuah Kajian Literatur dengan menggunakan teori pilihan Rasional dengan menggunakan metode kajian kuantitatif dengan hasil kajian Pilihan individu akan melakukan berbagai pilihan salah satunya pilihan rasional. Pilihan rasional merupakan suatu cara mencapai tujuan yang efisien dengan menggunakan informasi-informasi atau referensi yang di dapat dengan memaksimalkan biaya dan manfaat yang dipeoleh dari memaksimalkan biaya dan mafaat yang

dipeoleh dari pilihan tersebut. Yang membedakan dengan kajian tersebut terletak pada kajian yang dibahas pengambilan keputusan sedangkan peneliti membahas tentang proses pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun.

Kajian Ferdinan Bashofi dan Winin Maulidya Saffanah tahun 2019 yang berjudul Pilihan Rasional Mahasiswa Difabel Dalam Memilih Jurusan Keguruan Di Ikip Budi Utomo Malang dengan menggunakan teori pilihan rasional dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan hasil kajian yaitu Pendidikan tinggi yang ditempuh oleh seorang penyandang difabilitas tidak serta merta diambil berdasarkan pilihan rasional pembeda Kajian sebelumnya membahas tentang keputusan terkait individu dan kajian ini membahas tentang keputusan lembaga.

Kajian Ayu Simatupang tahun 2021 mengkaji tentang analisis Pilihan Rasional Bapak Rumah Tangga menggunakan teori pilihan rasional dengan menggunakan metode kajian deskriptif kualitatif dan hasil kajian yaitu Terdapat beberapa alasan yang menjadikan suami lebih memilih peran sebagai bapak rumah tangga di dalam keluarganya. Pembeda Kajian sebelumnya membahas tentang keputusan terkait individu dan kajian ini membahas tentang keputusan lembaga.

Kajian Zamzam Saepurromdon pada tahun 2023 “Pilihan Rasional Terhadap Kolektor Barang Antik Di Kota Malang” dengan menggunakan teori pilihan rasional menggunakan metode kajian deskriptif kualitatif hasil kajian yaitu Nilai atau keuntungan yang didapatkan dari mengkoleksi barang antik bisa berbentuk keuntungan berupa materi atau non-materi yaitu kepuasan yang memang tidak ternilai. kesukaan atau hoby, untuk mendapatkan keuntungan baik secara ekonomi atau non-ekonomi, adanya nilai spiritualitas dan filosofis juga sebab peninggalan orang tua (warisan) yang membedakan Kajian sebelumnya membahas tentang keputusan terkait individu dan kajian ini membahas tentang

keputusan lembaga.

Kajian Wahyudin, dkk tahun 2017 tentang Kinerja Manajemen Perguruan Tinggi dengan menggunakan teori pilihan rasional dengan metode kuantitatif dengan hasil kajian yaitu PTN harus mengimplementasikan GUG untuk meningkatkan kinerja manajemen keuangannya yang membedakan dengan Kajian sebelumnya membahas tentang GUG dan kajian ini membahas tentang proses pendirian Universitas

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Kecenderungan Global

Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia Pendidikan dari Pendidikan tatap muka konvensional ke arah Pendidikan yang lebih terbuka. Teknologi internet menjadi media yang populer dalam mengembangkan Pendidikan global. Jaringan internet adalah suatu gabungan jaringan dua atau lebih komputer di seluruh dunia sehingga peranan teknologi informasi dalam segala jenis dan bentuk informasi dapat di komunikasikan antar belahan dunia secara global dan instan.

Peranan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran Menurut (H. Hamzah B. Uno dan Hj. Nina Lamatenggo, 2011: 61). Mengatakan bahwa kecendrungan pendidikan di Indonesia pada masa mendatang adalah Berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh (*distance learning*). Kemudian untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh perlu

adanya sistem informasi sebagai strategi utama guna menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam dunia pendidikan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Kemajuan teknologi harus disertai dengan pemahaman moral tentang lingkungan bahwa masih ada generasi-generasi yang akan hidup setelah kita. Paradigma bisnis demikian dilandasi dengan tanggung jawab moral terhadap generasi yang akan datang. Pemanfaatan TIK untuk pendidikan sudah menjadi keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Berbagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi sudah tersedia dalam masyarakat dan sudah siap menanti untuk dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk sesuai dengan fungsinya dalam pendidikan. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dapat dibagi menjadi tujuh fungsi (Indrajit, 2004), yaitu: 1). sebagai gudang ilmu, 2). sebagai alat bantu pembelajaran, 3). sebagai fasilitas pendidikan, 4). Sebagai standar kompetensi, 5). sebagai penunjang administrasi, 6). sebagai alat bantu manajemen sekolah, dan 7). Sebagai infrastruktur pendidikan. Dalam kaitan pemanfaatan TIK untuk pendidikan, Eric Ashby (1972) seperti dikutip oleh Miarso (2004), menyatakan bahwa dunia pendidikan telah memasuki revolusinya yang kelima. Revolusi pertama terjadi ketika orang menyerahkan pendidikan anaknya kepada seorang guru. Revolusi kedua terjadi ketika digunakannya tulisan untuk keperluan pembelajaran.

Revolusi ketiga terjadi seiring dengan ditemukannya mesin cetak sehingga materi pembelajaran dapat disajikan melalui media cetak dalam bentuk buku. Revolusi keempat terjadi ketika digunakannya perangkat elektronik seperti radio dan televisi untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Revolusi kelima, seperti saat ini, dengan dimanfaatkannya teknologi informasi dan komunikasi mutakhir, khususnya komputer dan internet untuk pendidikan. Revolusi ini memberi dampak terhadap beberapa kecenderungan global dan regional dalam pemanfaatan TIK untuk pendidikan masa depan.

Sekarang ini, dunia telah berada dalam era informasi dan komunikasi. Era informasi ditandai oleh pesatnya perkembangan TIK, khususnya radio, televisi, komputer dan internet. Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan berjuta-juta jaringan komputer (local/wide areal network) termasuk computer pribadi (stand alone), yang memungkinkan setiap komputer yang terhubung internet bisa saling melakukan komunikasi satu sama lain. Fasilitas aplikasi internet cukup banyak sehingga mampu memberikan dukungan bagi keperluan militer, kalangan media massa, kalangan bisnis, maupun kalangan pendidikan.

2. Pengertian Pendidikan

Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani *Paedagogike* yang berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaannya membimbing anak dengan maksud membawanya ketempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut *Paedagogos*. Jika kata ini diartikan secara simbolis, maka perbuatan membimbing seperti di atas, merupakan inti perbuatan mendidik.

Pendidikan itu sendiri adalah proses belajar yang sebelumnya kita tidak bisa memahami sesuatu, tetapi dengan adanya pendidikan maka kita bisa menjadi paham karena di dalam pendidikan terjadi adanya hubungan (interaksi) anatara satu individu dengan

individu lainnya, atau individu dengan lingkungan pendidikan. Terdapat unsur- unsur yang ada dalam pendidikan yaitu:

1. Subjek yang dibimbing (peserta didik)
2. Orang yang membimbing (pendidik)
3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif)
4. Kearah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan)
5. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan)
6. Cara yang digunakan dalam bimbingan (alat dan metode)
7. Tempat dimana pariwisata bimbingan berlangsung (lingkungan pendidikan).

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Secara umum adanya pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik, dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi yang dimiliki maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreatifitas, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Di sini pendidikan sangat dibutuhkan untuk menunjang pengetahuan peserta didik. Tujuan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pen-

getahuan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemsyarakatan dan kebangsaan.

2. Dalam ketetapan MPR No. 11/ MPR/1993 tentang GBHN, tujuan pendidikan Nasional dipaparkan lebih luas lagi yakni: Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yakni yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan Nasioanl juga harus menumbuhkan jiwa patriotik mempertebal rasa cinta tanah air meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghadapi jasa pahlawan serta berorientasi masa depan.

Dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan merupakan masalah yang inti dalam pendidikan, dan merupakan saripati dari seluruh faktor yang sangat menentukan jalannya pendidikan sehingga perlu dirumuskan sebaik-baiknya sebelum semua kegiatan pendidikan dilaksanakan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 1, yang menjelaskan bahwa pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal di mana ketiga jalur tersebut saling melengkapi dan memperkaya. Tahun 2003 BAB VI pasal 14 dinyatakan bahawa jenjang pendidikan formal yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

1. Pendidikan Dasar

Sesuai dengan pasal 17 ayat 1 dan 2 bahwa ayat (1) mengatakan bahwa : Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan

yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Ayat (2) pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) Dan Menengah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

2. Pendidikan Menengah

Sesuai dengan pasal 18 ayat 1,2 dan 3 mengatakan bahwa: Pendidikan menengah adalah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

3. Pendidikan Tinggi Sesuai dengan pasal 19 ayat 1 mengatakan bahwa: Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Kecenderungan global itu adalah komponen-komponen yang saling berinterelasi, pengajaran konsep-konsep inti secara sistematis analisis terhadap studi kasus, keterampilan-keterampilan pembuatan keputusan, analisis komparatif, keterampilan partisipatoris dan kebajikan Ward heyard melalui kegiatan-kegiatan belajar, penggunaan buku sumber, pengetahuan, keterampilan dan kebajikan kebajikan warga negara, dan menghubungkan antara isi dan proses dalam belajar mengajar pengetahuan, keterampilan dan kebajikan-kebajikan warga negara.

Perguruan tinggi yang ada di Indonesia terdiri dari tiga kategori, yaitu: Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK). Lembaga pendidikan tersebut berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi dan akademi. Terdiri dari strata satu (S1) bergelar sarjana, diploma I dan II bergelar A.Ma, diploma III bergelar A.Md, Strata dua/pasca sarjana (S2) bergelar Magister, dan Strata tiga (S3) bergelar Doktor (Dr).

a. Pendirian dan Perubahan PTS serta Pembukaan dan Perubahan Program Studi Pada Perguruan Tinggi

Secara garis besar, pendirian PTS termasuk pembukaan program studi di dalamnya diusulkan oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba (selanjutnya disebut Badan Penyelenggara)¹ kepada Menristekdikti dengan mengajukan usul pendirian PTS yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan di dalam buku ini. Sedangkan pembukaan program studi di PTN atau PTS (selanjutnya disebut perguruan tinggi) yang sudah berdiri diusulkan oleh pemimpin in perguruan tinggi tersebut kepada Menristekdikti dengan mengajukan usul pembukaan program studi yang memuat pemenuhan semua persyaratan. Kelengkapan persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari PTS yang akan didirikan, atau pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pendirian PTS akan dilakukan oleh BAN-PT, sedangkan evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi akan dilakukan oleh BAN-PT atau LAM.

Baik pada pendirian PTS maupun pada perubahan PTS, terdapat persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan atau perubahan program studi yang harus dipenuhi oleh Badan Penyelenggara. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan atau perubahan program studi

akan dilakukan oleh BAN-PT atau LAM jika telah terdapat LAM untuk program studi terkait Apabila BAN-PT atau LAM untuk program studi terkait menyatakan bahwa persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan atau perubahan program studi, dan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian atau perubahan PTS telah dipenuhi, maka Menristekdikti akan menerbitkan izin pendirian atau perubahan PTS tersebut.

Dalam hal dilakukan perubahan PTS, maka evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi oleh BAN-PT hanya dilakukan terhadap program studi baru yang akan dibuka atau ditambahkan, sedangkan terhadap program studi yang telah memiliki status akreditasi dan peringkat terakreditasi dari BAN-PT atau LAM tidak dilakukan evaluasi kecukupan lagi. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi dari program studi tersebut tetap berlaku sampai dengan akhir masa berlakunya status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi tersebut, sebagaimana telah ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM.

Terhadap pembukaan program studi baru pada PTS yang tidak menyebabkan perubahan PTS, akan dilakukan evaluasi kecukupan oleh BAN-PT atau LAM untuk program studi terkait saja. Apabila BAN-PT atau LAM untuk program studi terkait menyatakan bahwa persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan prodi telah dipenuhi, maka Menristekdikti akan menerbitkan izin pembukaan program studi tersebut (Kemenristek Dikti, 2017: 6).

b. Penggabungan 2 (dua) Perguruan Tinggi Swasta Atau Lebih Menjadi 1 (satu) Perguruan Tinggi Baru Swasta. Penggabungan perguruan tinggi swasta adalah menggabungkan 2 (dua) perguruan tinggi swasta atau lebih menjadi 1 (satu) perguruan tinggi swasta baru. Untuk PTS penyelenggara perguruan tinggi baru tersebut adalah salah satu badan penyelenggara dari salah satu PTS yang bergabung. Terdapat berbagai alasan penggabungan perguruan tinggi swasta, antara lain:

1. Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat jumlah program studi dalam rumpun ilmu untuk suatu bentuk perguruan tinggi swasta;
2. Badan Penyelenggara (untuk PTS) yang hendak mengubah bentuk 1 (satu) PTS yang dikelolanya dengan menambahkan program studi non *STEM* (*Science, Technology, Engineering, Mathematics*), tetapi terkendala karena pembukaan program studi non *STEM* sedang dimoratorium, dapat mengambil alih PTS lain yang memiliki program studi non *STEM* untuk digabungkan dengan PTS yang akan mengubah bentuknya.
3. Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi pada beberapa perguruan tinggi swasta, sehingga penggabungan beberapa perguruan tinggi swasta tersebut menjadi 1 (satu) perguruan tinggi swasta baru akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi perguruan tinggi swasta yang baru.
4. Beberapa PTS yang dikelola oleh masing-masing Badan Penyelenggara tidak memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non akademik, dalam penyelenggaraan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila dilakukan penggabungan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS baru.

Penggabungan beberapa perguruan tinggi swasta menjadi 1 (satu) perguruan tinggi swasta baru, akan berakibat sebagai berikut:

- 1) Semua aset (sarana, prasarana, kekayaan lain) dari beberapa Badan Penyelenggara yang PTS nya digabungkan, dapat dialihkan kepemilikannya atas nama Badan Penyelenggara yang akan mengelola PTS baru hasil penggabungan.
- 2) Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang beberapa perguruan tinggi swasta yang bergabung men-

jadi 1 (satu) data dan informasi 1 (satu) perguruan tinggi baru hasil penggabungan.

- 3) Perubahan keputusan BAN-PT dan/atau LAM tentang status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi. Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang penggabungan perguruan tinggi swasta, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan mengevaluasi permohonan izin penggabungan perguruan tinggi swasta oleh perguruan tinggi swasta yang akan bergabung. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Menristekdikti akan menerbitkan keputusan tentang penggabungan perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi swasta baru.

c. Persyaratan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta

Perubahan perguruan tinggi swasta harus memenuhi persyaratan pendirian perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud Bab II angka 2. Apabila perubahan perguruan tinggi swasta memerlukan penambahan program studi baru, usulan penambahan program studi tersebut hanya untuk memenuhi jumlah minimum program studi untuk bentuk perguruan tinggi swasta yang diusulkan. Adapun Syarat tambahan untuk perubahan perguruan tinggi swasta sebagai berikut:

1. Semua program studi pada masing-masing perguruan tinggi swasta telah memiliki status dan peringkat terakreditasi, sebagaimana dibuktikan dengan keputusan akreditasi dari BAN PT dan/atau LAM
2. Masing-masing perguruan tinggi swasta telah melaporkan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
3. Dalam hal memerlukan pembukaan program studi baru, Badan Penyelenggara dapat menggunakan dosen yang telah memiliki NIDN dari program studi tertentu di salah satu

perguruan tinggi dengan syarat bahwa program studi yang ditinggalkan oleh dosen tersebut harus tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa, Ketentuan (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi).

4. Memperoleh Rekomendasi LLDIKTI yang berisi Legalitas satu atau lebih Badan Penyelenggara perguruan tinggi, Rekam jejak perguruan tinggi swasta yang akan berubah di wilayah LLDIKTI, Tingkat kejenuhan Program Studi pada perguruan tinggi swasta yang akan berubah di wilayah LLDIKTI
5. Badan Penyelenggara juga harus pula menyerahkan Rancangan statuta perguruan tinggi swasta hasil perubahan, Rancangan sencana strategis perguruan tinggi swasta hasil perubahan, Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi hasil perubahan

d. Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta

Prosedur perubahan PTS diawali dengan pengajuan permohonan rekomendasi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:

1. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan)

2. Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan
3. Surat Keputusan izin pendirian PTS beserta semua perubahannya
4. Tingkat keberlanjutan perguruan tinggi swasta (kecuali usul perubahan nama PTS)
5. Kerja sama dengan dunia usaha atau industri untuk program pendidikan lokasi
6. Rekam jejak Badan Penyelenggara dan PTS.

Setelah permohonan rekomendasi diterima, selain menelaah kelengkapan dan kesesuaian dokumen huruf a sampai dengan huruf f, LLDIKTI juga melakukan: Evaluasi legalitas badan penyelenggara berupa pemeriksaan kesesuaian dokumen huruf a, huruf b, dan huruf c. Dalam hal legalitas badan penyelenggara belum sesuai, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk mengusulkan penyesuaian badan penyelenggara kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti. Dan Evaluasi legalitas perguruan tinggi berupa pemeriksaan status akreditasi program studi dan status pembiayaan perguruan tinggi dan program studi. LLDIKTI akan memberikan rekomendasi jika hasil keseluruhan telaahan dan evaluasi sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Apabila LLDIKTI memberikan rekomendasi, usul perubahan PTS akan diproses dengan prosedur sebagai berikut:

1. Badan Penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melalui silemkerma.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun;
2. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun.
3. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun.

- Apabila disetujui maka Badan Penyelenggara dapat melanjutkan proses ketahap berikutnya, yaitu mengunggah dokumen.
4. Badan Penyelenggara yang mengusulkan penggabungan mengunggah dokumen yang terdiri atas
 - a. Surat permohonan izin penggabungan PTS kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - b. Rekomendasi dari LLDIKTI
 - c. Semua Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi (jika diperlukan pembukaan program studi baru untuk memenuhi persyaratan minimum jumlah dan jenis program studi untuk pendirian perguruan tinggi swasta) dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Badan Penyelenggara.
 5. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen
 6. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas
Belum disetujui apabila jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen pada semua program studi minimal untuk memenuhi syarat suatu bentuk perguruan tinggi swasta tidak terpenuhi, maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali usulan penggabungan PTS sebagaimana tercantum pada angka 4; Disetujui, maka Badan Penyelenggara dapat melanjutkan proses ke tahap berikutnya
 7. Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada angka 5 disetujui, Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan "Persetujuan Proses Lanjut"
 8. Badan Penyelenggara mengunggah dokumen Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi

9. Segera setelah “Persetujuan Proses Lanjut” diumumkan, LLDIKTI mengevaluasi Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi khusus untuk kriteria non dosen (jika diperlukan pembukaan program studi baru untuk memenuhi persyaratan minimum jumlah dan jenis program studi untuk penggabungan perguruan tinggi swasta) Apabila hasil penilaian kriteria non dosen untuk setiap program studi telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi, dan jumlah dan jenis program studi telah memenuhi syarat minimum bentuk perguruan tinggi hasil penggabungan, maka akan dilakukan evaluasi lapangan.

Evaluasi lapangan akan dilakukan bersama LLDIKTI dan Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti. Bersamaan dengan evaluasi lapangan tersebut dilakukan evaluasi pemenuhan Pernyataan Komitmen Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi

10. Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum disetujui dan Badan Penyelenggara dapat mengunggah kembali usulan dari awal (angka 4)
11. Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 memenuhi persyaratan, LLDIKTI akan menyampaikan hasil evaluasi kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti;
12. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan validasi
13. Apabila hasil validasi tidak memenuhi persyaratan, usulan dikembalikan kepada LLDIKTI untuk dievaluasi kembali.
14. Apabila hasil validasi memenuhi persyaratan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin penggabungan perguruan tinggi swasta kepada Sesjen; dan Sesjen atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendi-

dikan Tinggi Swasta menerbitkan Surat Keputusan tentang Penggabungan PTS. Prosedur selanjutnya sesuai dengan jenis usul perubahan PTS berikut: Penggabungan 2 (dua) perguruan tinggi swasta atau lebih menjadi 1 (satu) perguruan tinggi swasta .

C. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

1. Pengertian Teori Pilihan Rasional

Untuk memahami mengenai teori pilihan rasional, maka perlu penjelasan terlebih dahulu konsep rasional. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rasional berasal dari kata “rasio”, yaitu pemikiran yang logis, atau sesuai dengan nalar manusia secara umum. Sedangkan rasional adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang logis, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal (Pusat Bahasa Kemendiknas, 2016), Jadi yang dimaksud dengan rasional adalah suatu pikiran seseorang yang didasarkan pada sebuah pertimbangan akal sehat dan logis. Atau dapat juga dikatakan sebagai sesuatu yang dilakukan berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang logis, pikiran yang sehat, dan cocok dengan akal. Jadi yang dinamakan dengan pilihan rasional ialah sesuatu pilihan yang didasarkan atas rasio akal sesuai dengan logika pribadi individu masing-masing. Rasional lahir ketika dihadapkan sama banyaknya suatu pilihan-pilihan yang ada di depan mata, yang memberi kebebasan untuk menentukan pilihan, dan menuntut adanya satu pilihan yang harus ditentukan. Suatu pilihan dapat dikatakan rasional apabila pilihan tersebut diambil dengan maksud untuk menghasilkan konsekuensi tertentu berupa sikap maupun tindakan.

Teori pilihan rasional memiliki tradisi panjang dalam sosiologi, tetapi selalu kontroversial dan ditentang. Namun hal tersebut telah mempengaruhi kosakata teoritis dari disiplin pada umumnya dan telah membuat terobosan jauh ke beberapa bidang

sosiologis penting seperti gerakan sosial, mobilitas sosial, dan agama. Teori pilihan rasional yang paling sosiologis berasumsi bahwa pelaku bertindak rasional dalam arti luas, dan fokus pada hasil agregat oleh aktor individual dalam interaksi dengan satu sama lain cenderung mementingkan diri sendiri. Dalam artikel tersebut meninjau kontribusi paling penting untuk tradisi rasional-pilihan dalam sosiologi, dan secara singkat membahas sejarah masa lalu dan kemungkinan masa depan.

Teori pilihan rasional merupakan cabang dari sosiologi yang paling menyeluruh dipengaruhi oleh teori ekonomi. Namun tidak hanya sebuah aplikasi teori ekonomi untuk penjelasan fenomena sosial. Teori pilihan rasional terdiri dari seperangkat beragam teori dan hanya ada beberapa saja yang berasal dari disiplin ekonomi. Teori pilihan rasional menggunakan model di mana aktor diasumsikan bertindak rasional, dalam arti luas dari istilah tersebut. Teori pilihan rasional, pelaku tidak diasumsikan diatur oleh faktor-faktor penyebab beroperasinya di belakang punggung mereka, tetapi dipandang sebagai pengambil keputusan sadar yang tindakannya dipengaruhi oleh biaya dan manfaat dari alternatif tindakan yang berbeda. Fokusnya bukan pada hasil menjelaskan tingkat makro atau agregat seperti munculnya norma, pola segregasi, atau berbagai bentuk tindakan kolektif. Untuk memahami hasil seperti ini, bagaimanapun, Teori pilihan rasional berfokus pada tindakan dan interaksi individu.

Senada dengan itu John Scott Dalam bukunya *Understanding Contemporary Society: Theories of The Present* (2000:14), mengemukakan inti dari teori pilihan rasional sebagai berikut:

Rational choice theory adopts a methodological individualist position and attempts to explain all social phenomena in terms of the rational calculations made by self-interested individuals.

Rational choice theory sees social interaction as social exchange, modelled on economic action. People are motivated by the rewards and costs of actions and by the profits that they can make.

Some rational choice theorists have seen rationality as a result of psychological conditioning. Others have adopted the position that it is simply necessary to assume that individuals act as if they were completely rational.

The problem of collective action poses great difficulties for rational choice theory, which cannot explain why individuals join many kinds of groups and associations.

The problem of social norms, the other aspect of the Hobbesian problem of order, also poses difficulties. Rational choice theories cannot explain the origins of social norms, especially those of altruism, reciprocity, and trust.

The problem of social structure is a feature of methodological individualism, rather than rational choice theory per se, but it creates difficulties for the theories considered. Solutions to this problem have been in terms of the unintended consequences of individual action.

Artinya sebagai berikut:

Teori pilihan rasional mengadopsi posisi individualis metodologis dan upaya untuk menjelaskan semua fenomena sosial dalam hal perhitungan rasional yang dibuat oleh individu mementingkan diri sendiri.

Teori pilihan rasional melihat interaksi sosial sebagai pertukaran sosial, mencontoh tindakan ekonomi. Orang-orang termotivasi oleh imbalan dan biaya dari

tindakan dan dengan keuntungan yang mereka dapat membuat.

Beberapa teori pilihan rasional telah melihat rasionalitas sebagai hasil dari kondisi psikologis. Lainnya telah mengadopsi posisi bahwa itu hanya diperlukan untuk mengasumsikan bahwa individu bertindak seolah-olah mereka benar-benar rasional.

Masalah tindakan kolektif menimbulkan kesulitan besar bagi teori pilihan rasional, yang tidak dapat menjelaskan mengapa orang bergabung dengan berbagai jenis kelompok dan asosiasi.

Masalah norma-norma sosial, aspek lain dari masalah Hobbes ketertiban, juga menimbulkan kesulitan. Teori pilihan rasional tidak bisa menjelaskan asal-usul norma-norma sosial, terutama altruisme, timbal balik, dan kepercayaan.

Masalah struktur sosial adalah fitur individualisme metodologis, daripada teori pilihan *rasional perse*, tetapi menimbulkan kesulitan bagi teori-teori dipertimbangkan. Solusi untuk masalah ini telah dalam hal konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan individu.

Dasar dari pemikiran teori ini adalah rasionalitas dalam mengemukakan pilihan dan menyatakan teori yang memiliki sifat *parsimony* (penjelasan sederhana tetapi mencakup wacana yang luas) dan kekuatan memberi penjelasan (*eksplanatory power*), sehingga manusia dianggap memiliki kebebasan untuk memilih dan mempertimbangkan dari sesuatu yang dipilih itu berdasarkan rasio.

Teori pilihan rasional atau *Rational choice theory* dapat didefinisikan sebagai sebuah eksplanasi tentang bagaimana atau bagaimana seharusnya individu atau kelompok mengambil keputusan, dengan menekankan dua dimensi choice theory dimensi normatif dan dimensi deskriptif.

Dimensi normatif berkaitan dengan ‘bagaimana seharusnya’. Choice theory sebagai sebuah teori ilmu sosial, dapat memberikan insight tentang apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan semaksimal mungkin. Sedangkan dimensi deskriptif berkaitan dengan ‘bagaimana’ Dimensi deskriptif memberikan penjelasan kepada kita bagaimana sebuah pilihan dapat dikatakan rasional. Kedua dimensi tersebut mengimplikasikan bahwa choice theory memiliki ruang lingkup yang lebih kompleks dari sekedar persoalan pengambilan keputusan. Di dalam studinya, pada akhirnya *choice theory* sangat berhubungan dengan konsep-konsep abstrak lain seperti rasionalitas (serta kekurangan dan batasan-batasannya), moralitas, dan preferensi, di mana konsep yang terakhir ini sangat kental berhubungan dengan disiplin ilmu psikologi. Pembahasan mengenai choice theory ini akan dibagi menjadi tiga bagian pembahasan, yaitu rasionalitas, preferensi, dan moralitas, berikut penjelasan pada masing-masing bagian;

1) Rasionalitas

Pertama-tama, suatu tindakan yang dapat dikatakan rasional biasanya berhubungan dengan konsep “cara” atau “sarana” (*means*) dan “tujuan” (*ends*). Suatu pilihan atau tindakan dapat dikatakan rasional jika pilihan/tindakan tersebut merupakan sebuah “cara” terbaik untuk mencapai sebuah “tujuan” yang diinginkan. Sekali lagi, kedua konsep ini mengimplikasikan dimensi normatif dan deskriptif dari choice theory . Karena dengan menggunakan konsep “cara” dan “tujuan”, choice theory dapat memberikan insight tentang apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Konsep means dan ends ini membawa asumsi bah-

wa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang melakukan sesuatu atas dorongan untuk mencapai tujuan (*goal-directed*). Maksudnya, suatu tindakan dapat dikatakan rasional bukan karena ada suatu sarana (*means*) terbaik untuk mencapai tujuan (*ends*) tersebut, tetapi karena tindakan tersebut memenuhi standar atau kriteria formal yang ditetapkan sebelumnya.

Limitasi dari model penjelasan means-ends dan kriteria formal adalah bahwa keduanya hanya menjelaskan rasionalitas tindakan manusia dilihat dari berbagai pilihan sarana/kriteria untuk satu tujuan (*ends*) tertentu, namun tidak menekankan dimensi tujuan itu sendiri. Padahal,seringkali pilihan yang diambil seseorang sangat dipengaruhi oleh berapa banyak jumlah pilihan tujuan yang ada beserta konsekuensi-konsekuensi yang menyertainya.

Pertanyaan yang muncul dari persoalan tujuan (*ends*) sebagai bagian dari problem rasionalitas adalah: apa yang membuat seseorang memilih suatu tujuan (*ends*) tertentu dan bukan yang lain, Persoalan ini masuk ke dalam pembahasan mengenai persoalan preferensi. Karakteristik utama dari berbagai bentuk rasionalitas adalah bahwa semuanya melakukan pemilihan secara bernalar tentang perlunya mengambil arah tindakan tertentu untuk memecahkan masalah kebijakan. Bentuk-bentuk rasionalitas menurut Diesing (1962) adalah sebagai berikut:

a) Rasionalitas teknis

Rasionalitas teknis merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang meliputi perbandingan berbagai alternatif atas dasar kemampuan masing-masing memecahkan masalah secara efektif.

b) Rasionalitas ekonomis

Rasionalitas ekonomis merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang membandingkan berbagai alternatif atas dasar kemampuan untuk menemukan pemecahan masalah yang

efisien.

c) Rasionalitas legal

Rasionalitas legal merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang meliputi perbandingan alternatif menurut kesesuaian hukumnya terhadap peraturan-peraturan dan kasus-kasus penyelesaian sebelumnya.

d) Rasionalitas sosial

Rasionalitas sosial merupakan karakteristik pilihan yang bernalar menyangkut perbandingan alternatif menurut kemampuannya dalam mempertahankan atau meningkatkan institusi-institusi sosial yang bernilai.

e) Rasionalitas substantif

Rasionalitas substantif merupakan karakteristik pilihan yang bernalar menyangkut perbandingan berbagai bentuk rasionalitas -teknis, ekonomis, legal, sosial dengan maksud agar dapat dibuat pilihan yang paling layak di bawah kondisi yang ada.

2) Preferensi

Preferensi adalah persoalan mengenai urutan atau ranking keputusan pilihan. Jika pada suatu kondisi seseorang memilih untuk membeli barang x ketika tersedia barang y , maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki preferensi atas barang x ketimbang barang y . Persoalan yang ingin dibahas pada bagian ini adalah justifikasi atau reason yang dapat diberikan pada preferensi. Mengapa seseorang memilih x ketimbang y , sehingga menunjukkan bahwa ia memiliki preferensi atas x ketimbang y .

Pertanyaan ini menjadi penting di dalam diskursus ilmu ekonomi karena justifikasi atas preferensi dapat membantu kita untuk memprediksi pola tindakan seseorang. Hal ini berguna misalnya di dalam teori perilaku konsumen. Umumnya, justifikasi

yang biasanya berlaku atas preferensi seseorang terhadap suatu pilihan adalah justifikasi berdasarkan konsekuensi.⁵ Maksudnya, pilihan yang diambil seseorang sangat dipengaruhi oleh hasil yang akan didapatkan orang itu dari pilihan yang ia ambil.

Seseorang memutuskan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi karena ia percaya bahwa keputusannya itu akan memudahkan dirinya di masa yang akan datang. Persoalannya, tidak semua keputusan memiliki konsekuensi yang jelas dan dapat dikalkulasi secara sempurna. Kadangkala seseorang harus memilih sebuah pilihan tanpa dapat mengetahui konsekuensi yang akan ia terima. Persoalan ketidakpastian konsekuensi ini merupakan kritik dasar bagi *choice theory* dan akan dikembangkan lebih jauh pada behavioral economics .

Choice theory sendiri memiliki tiga asumsi mendasar mengenai preferensi individu agar premis-premisnya menjadi valid. Ketiga asumsi tersebut adalah: Completeness. Yakni asumsi yang menyatakan bahwa semua pilihan dapat diurutkan atau disusun berdasarkan ranking. Konsekuensinya, asumsi ini ingin menyatakan bahwa tidak ada alternatif pilihan yang tidak menjadi preferensi si subjek (semua alternatif harus disebut dan menjadi preferensi subjek).

Artinya, asumsi ini ingin menyatakan bahwa memasukkan opsi baru tidak akan mengubah urutan preferensi pada pilihan-pilihan sebelumnya. Selain ketiga asumsi di atas, *choice theory* juga memiliki 2 (dua) asumsi lain yang biasanya tidak dinyatakan dengan eksplisit, yakni asumsi bahwa

- a) Setiap individu memiliki informasi yang sempurna tentang konsekuensi yang akan ia terima dari pilihan yang diambil
- b) Setiap individu memiliki kemampuan kognitif dan segala fasilitas lain (seperti waktu dan tenaga) yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan yang mereka hadapi.

Ke semua asumsi di atas pada dasarnya dibutuhkan *choice theory* untuk mempertahankan tesis bahwa preferensi individu selalu bersifat konsisten. Melalui modelisasi dan asumsi-asumsi tersebut, *choice theory* pada akhirnya mampu membentuk suatu eksplanasi tentang perilaku manusia yang tidak hanya efektif sebagai deskripsi, tetapi juga memiliki daya prediktif yang sangat kuat.

3) Moralitas

Persoalan moralitas di dalam teori pilihan rasional umumnya berkaitan dengan keselarasan antara keputusan rasional individual dengan kepentingan publik yang lebih luas. Asumsi egoisme rasional di dalam ilmu ekonomi membawa implikasi pemahaman bahwa jika setiap individu saling mengejar preferensi egoisnya masing-masing, maka dampak sosialnya justru lebih bersifat positif ketimbang jika mereka mendahulukan kepentingan orang lain.

Asumsi ini bekerja atas dasar pemahaman bahwa kepentingan publik merupakan hasil penggabungan dari berbagai preferensi individu. Untuk beberapa hal, seperti kasus tukang roti, asumsi ini dapat bekerja sempurna. Namun, kadang kala ada beberapa kepentingan publik yang tidak berkorelasi positif dengan preferensi individu. Bahkan, pada kasus-kasus tersebut, semakin banyak individu yang mengejar preferensi individualnya, maka kondisi kehidupan sosial justru semakin memburuk. Pada kasus-kasus semacam ini, proses pengambilan keputusan pada akhirnya menjadi sebuah tindakan moral: seseorang dituntut untuk memilih antara kepentingan pribadi atau kepentingan umum yang lebih luas.

2. Teori Pilihan Rasional James S. Coleman

Dalam kajian ini, penulis menggunakan teori pilihan rasional James S. Coleman. Teori pilihan rasional adalah tindakan rasional individu atau aktor untuk suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi). Namun, Coleman

melanjutkan dengan menunjukkan bahwa, untuk tujuan yang sangat teoritis, ia membutuhkan konsep aktor rasional yang lebih tepat, yang diturunkan dari ilmu ekonomi, bahwa aktor memilih tindakan yang memaksimalkan utilitas mereka atau memuaskan aktivitas dan kebutuhan mereka.

Teori pilihan rasional berfokus pada aktor. Aktor dipandang sebagai orang yang memiliki maksud atau tujuan. Artinya aktor memiliki tujuan dan tindakannya terfokus pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Aktor juga dipandang memiliki pilihan atau nilai, kebutuhan, dan penting untuk mengambil tindakan untuk mencapai tujuan yang konsisten dengan tingkat yang mereka pilih. Dalam persepsi Coleman, teori pilihan rasional tersebut merupakan sudut pandang dari tindakan rasional, integrasi dari berbagai sudut pandang sosiologis. Coleman dengan yakin menyatakan bahwa pendekatannya didasarkan pada individualisme, menggunakan teori pilihan rasional sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena tingkat makro ini. Aktor juga dipandang memiliki pilihan atau nilai, teori pilihan rasional berfokus pada aktor dimana aktor dipandang memiliki tujuan dan sasaran. Ini berarti aktor yang memiliki tujuan yang tindakannya ditujukan untuk bekerja menuju tujuan yang diinginkan. Teori pilihan rasional tidak peduli dengan apa pilihan aktor atau apa sumber pilihan itu, yang dibutuhkan adalah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang konsisten dengan kualitas preferensi aktor.

Berlandaskan penjelasan Coleman di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perilaku sosial di bagi menjadi dua unsur, yaitu aktor dan sumber daya, pengertian aktor dalam perilaku sosial adalah seseorang yang mempunyai peran untuk melaksanakan suatu tindakan, dan tindakan tersebut mempunyai tujuan. Sedangkan pengertian dari sumber daya adalah sesuatu yang dianggap menarik oleh aktor tersebut untuk mendukung tindakannya dalam mencapai suatu tujuan, dan sumber daya tersebut dapat

dikuasai oleh aktor.

Coleman menjelaskan secara rinci bahwa interaksi antara aktor dan sumber daya pada tingkat sistem sosial Basis minimal dari sistem sosial adalah dua aktor, yang masing-masing aktor mempunyai sumber daya yang menarik perhatian satu dengan yang lain. Dalam hal ini terjadi interdependensi (saling membutuhkan), dan interdependensi mencangkup seluruh sistem sosial. Tujuan setiap individu adalah untuk mengoptimalkan kepentingannya, yang mewakili saling ketergantungan atau karakter sistemik dari tindakan mereka. Meskipun dalam teori pilihan rasional awal mengacu pada tujuan atau niat yang dilakukan individu, setidaknya ada dua jenis perilaku koersif yang mempengaruhi individu.

Menurut Coleman, sosiologi memusatkan perhatian pada sistem sosial, di mana fenomena makro harus dijelaskan oleh faktor internalnya, khususnya oleh faktor individu. Alasan untuk memusatkan perhatian pada individu disebabkan adanya intervensi untuk menciptakan perubahan social. Sehingga, substansi dari pandangan Coleman adalah bahwa teori social tidak hanya merupakan latihan akademis, tetapi juga harus dapat mempengaruhi kehidupan sosial melalui intervensi tersebut. Fenomena pada tingkat mikro selain yang bersifat individual dapat menjadi sasaran perhatian analisisnya. Interaksi antarindividu dapat dipandang sebagai akibat dari fenomena yang mengemuka di tingkat system, yakni, fenomena yang tidak dimaksudkan atau diprediksi oleh individu (Coleman, 2013).

Intervensi merupakan sebuah campur tangan yang dilakukan oleh seseorang, dua orang atau bahkan yang dilakukan oleh negara. Dari adanya intervensi tersebut kemudian diharapkan mampu menciptakan sebuah perubahan social. Individu memang memegang peranan yang sangat penting di dalam sebuah system social sebab pada dasarnya, individu yang menentukan berjalan tidaknya suatu system tersebut. Bahkan sebelum itu terbentuk,

dari tiap individu yang dikumpulkan dan dijadikan satu kemudian disusun untuk menghasilkan sebuah sistem.

Teori pilihan rasional Coleman ini tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Coleman menyatakan bahwa memerlukan konsep tepat mengenai actor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat actor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu actor dan juga sumber daya.

Sumber daya adalah setiap potensi yang ada atau bahkan yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa alam, yaitu sumber daya yang telah disediakan atau potensi alam yang dimiliki dan juga sumber daya manusia, yaitu potensi yang ada dalam diri manusia. Sedangkan actor adalah seseorang yang melakukan sebuah tindakan. Dalam hal ini individu yang mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik yaitu actor.

Aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan, aktor juga memiliki suatu pilihan yang bernilai dasar yang digunakan actor untuk menentukan pilihan yaitu menggunakan pertimbangan secara mendalam berdasarkan keasadarannya, selain itu actor juga mempunyai kekuatan sebagai upaya untuk menentukan pilihan dan tindakan yang menjadikan keinginannya. Sedangkan sumber daya adalah di mana actor memiliki control serta memiliki kepentingan tertentu, sumber daya juga sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan oleh aktor (Ritzer, 2012).

Coleman juga menjelaskan mengenai interaksi antara aktor dengan sumber daya ke tingkat system sosial. Basis minimal untuk system social yaitu tindakan dua orang aktor, di mana setiap aktor mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian bagi pihak

lain. Aktor selalu mempunyai tujuan, dan masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan wujud dari kepentingannya yang memberikan ciri saling tergantung pada tindakan aktor tersebut.

Pada kehidupan nyata, Coleman mengakui bahwa bahwa individu tidak selalu bertindak atau berperilaku rasional” (Ritzer, 2012). “Tetapi dalam hal ini akan sama saja apakah seseorang aktor dapat bertindak dengan tepat menurut rasionalitas seperti yang biasa dibayangkan ataupun menyimpang dari cara-cara yang diamati. Tindakan rasional individu dilanjutkan dengan memusatkan perhatian pada hubungan mikro-makro, ataupun bagaimana cara hubungan tindakan individu menimbulkan perilaku system social. Teori pilihan rasional berangkat dari tujuan atau maksud aktor, tetapi pada teori ini memiliki perspektif terhadap dua pemaksa utama tindakan. Pertama adalah keterbatasan sumber daya, bagi aktor yang mempunyai sumber daya besar, maka pencapaian tujuan cenderung lebih mudah. Hal ini berkorelasi dengan biaya, pemaksa utama, dan yang kedua adalah tindakan aktor individual, tindakan aktor individual di sini adalah lembaga sosial.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: menurut Coleman gagasan dasar dari teori pilihan rasional adalah tindakan seseorang mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi). Dengan demikian, menurutnya, setiap tindakan yang dilakukan seseorang pada dasarnya secara subjektif merupakan hasil keputusan rasional yang dipilih si aktor dalam rangka memaksimalkan kepuasannya.

Terdapat dua unsur utama dalam teori pilihan rasional Coleman, yaitu aktor dan sumber daya. Basis minimal suatu sistem sosial menurutnya terdiri dari dua orang aktor memiliki sumber daya yang menarik perhatian satu sama lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan oleh orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam system social terse-

but di mana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Setiap aktor memiliki tujuan dimana ia bertindak untuk memaksimalkan perw ujudan dari kepentingannya. Berikut ini penulis memberikan contoh, sepasang kekasih yang menjalin hubungan kasih sayang dalam ikatan pernikahan. Dalam analisis teori pilhan rasional, keputusan untuk menjalin hubungan rumah tangga bagi sepasang kekasih merupakan suatu hasil keputusan yang rasional. Kedua belah pihak baik si isteri maupun si suami memiliki sumber dayanya masing-masing yang menarik perhatian satu sama lain sehingga mereka terlibat dalam satu system social yang dinamakan dengan keluarga. Keputusan mereka untuk menjalin hubungan pernikahan tersebut didasarkan pada keinginan untuk memaksimalkan kepuasan baik secara biologis maupun psikis yang tidak bisa ia penuhi seorang diri.

Coleman memandang bahwa norma sosial bisa tetap bertahan dalam masyarakat karena adanya sekelompok aktor rasional yang melihat adanya keuntungan dari pengalaman terhadap norma tersebut dan kerugian yang muncul apabila norma tersebut dilanggar. Dengan demikian, menurut suatu norma/pranata sosial akan tetap bertahan apabila masih dianggap menguntungkan bagi masyarakat. Coleman mengatakan bahwa; unsur sentral penjelasan adalah melepaskan sebagian untuk mengendalikan tindakan diri sendiri oleh seseorang dan menerima sebagian hak untuk mengendalikan tindakan orang lain dan itulah yang memunculkan norma. Hasil akhirnya adalah bahwa pengendalian yang dipertahankan setiap orang sendirian akan didistribusikan secara luas ke seluruh kum pulan aktor yang melaksanakan control tersebut.

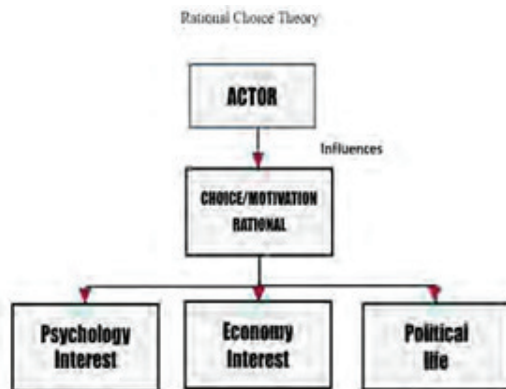
Dengan begitu, norma dipertahankan oleh beberapa orang yang memahami keuntungan dibentuknya norma tersebut serta kerugian dari pelanggaran terhadap norma tersebut. Aktor berusaha memaksimalkan kegunaan mereka, sebagian dengan meng-

gerakkan hak untuk mengendalikan diri mereka sendiri dan memperoleh sebagian hak untuk mengendalikan aktor lain. Namun ada pula keadaan di mana norma berperan menguntungkan orang tertentu dan merugikan orang lain. Dalam kasus tertentu, aktor menyerahkan hak (melalui norma) untuk mengendalikan tindakan orang lain. Keefektifan norma tergantung pada kemampuan melaksanakan konsensus tersebut.

Dalam penjelasannya, Coleman mengatakan, perilaku kolektif terjadi karena adanya upaya memaksimalkan kepentingan individual menyebabkan keseimbangan control antara beberapa aktor dan menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat. Tetapi, dalam perilaku kolektif, adanya upaya memaksimalkan kepentingan individu tidak selalu menyebabkan keseimbangan sistem (Rizer, 2014). Sementara itu, aktor korporat dalam suatu kelompok kolektif, aktor tidak dapat bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Terdapat beberapa aturan dan mekanisme agar dapat berpindah dari pilihan individu menuju pilihan kolektif. Baik aktor korporat maupun aktor manusia sebenarnya sama memiliki tujuan. Dalam struktur korporat seperti organisasi, aktor manusia dapat mengejar tujuan mereka yang berbeda dengan tujuan korporat. Semua hak dan sumber daya tersedia pada level ini, kepentingan individu menentukan seluruh peristiwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori pilihan rasional yang dinyatakan oleh James Coleman bermuara pada pemikiran bahwa dunia sosial ini terbentuk oleh hasil keputusan-keputusan rasional pada aktor dalam rangka memaksimalkan kepuasannya atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Suatu norma social terbentuk dan dipertahankan oleh masyarakat karena adanya keadaan akan manfaat yang didapatkan dari pengalaman terhadap norma tersebut dan kerugian bersama yang akan didapatkan apabila norma tersebut dilanggar. Perilaku kolek-

tif sendiri muncul akibat pemindahan control secara sepihak atas tindakan seorang aktor kepada orang lain. Berikut ini adalah ilustrasi proses terjadinya pilihan rasional.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Kajian ini menggunakan paradigma definisi sosial, yang didasarkan pada wawancara mendalam dan observasi untuk memahami pemahaman masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, dalam paradigma definisi sosial ini, selain bertujuan untuk memahami perilaku prososial para aktivis dalam kehidupannya, mereka juga selalu aktif berinteraksi dalam konteks sosial masyarakat. Jadi, dalam karya Weber (1970), ia lebih memilih dan fokus pada makna subjektif yang dicapai seseorang dalam tindakan sosial.

Karena paradigma merupakan prinsip dasar keyakinan dalam melakukan penelitian, maka jika kata paradigma disebutkan dan didefinisikan, maka paradigma bukanlah suatu hal yang sederhana dan tunggal, melainkan mempunyai makna ganda, sehingga paradigma banyak digunakan dalam kajian ilmiah. Ranah ilmu pengetahuan, ranah masyarakat, dan itulah yang mengatur hakikat pemikiran manusia. Jika mendefinisikan suatu paradigma,

tentu berguna untuk melihat dan membedakan di mana paradigma itu berada. Berikut beberapa definisi paradigma yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1994).

“Paradigm defines as the basic belief system or world-view that guides the investigator, not only in choices of method but in ontologically and epistemologically fundamental ways”.

Paradigma didefinisikan sebagai sebuah sistem kepercayaan atau pandangan dunia yang memandu peneliti, tidak hanya dalam pilihan metode tetapi juga dengan cara-cara fundamental yang secara ontologis dan epistemologis.

Namun istilah paradigma di sini mengacu pada asumsi-asumsi dasar yang menjadi pedoman peneliti dalam melakukan kajian sosial, sehingga memungkinkan peneliti menentukan paradigma, pendekatan, teori, dan metode kajian ketika melakukan penelitian. oleh Kuhn dalam karya aslinya *Ya*, paradigma adalah gambaran dasar suatu permasalahan besar dalam suatu ilmu tertentu. Paradigma membantu menentukan apa yang harus dipelajari, pertanyaan apa yang harus diajukan, bagaimana seharusnya ditanyakan, dan aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh (Ritzer, 2014).

Harmon mendefinisikan paradigma dalam Moleong (2017) sebagai cara mendasar dalam mempersepsi, berpikir, mengevaluasi, dan melakukan hal-hal spesifik dalam kaitannya dengan visi realitas. Lebih lanjut Ritzer (2014) menambahkan, selain pernyataan di atas tentang paradigma ini, paradigma ini merupakan pandangan dasar suatu disiplin ilmu (gambaran dasar berdasarkan landasan disiplinnya) terhadap subjek yang seharusnya.

Apabila melaksanakan kajian pada disiplin ilmu-ilmu sosial terutama bidang sosiologi maka menurut Ritzer (2014), bahwa “terdapat tiga masalah pokok utama dalam kajian ilmu sosial yang

terdiri dari paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Ketiga paradigma ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendekatan, teori dan metode dalam melaksanakan penelitian”.

Merujuk pada paradigma definisi sosial Ishomuddin (2005) yang dipelopori oleh Weber, yang mana analisisnya adalah tentang tindakan sosial. Paradigma ini memusatkan perhatian pada definisi sosial, cara aktor sosial mendefinisikan situasi sosialnya dan implikasi dari definisi tersebut. Paradigma tersebut adalah teori tindakan, interaksionisme simbolik, teori fenomenologi, mikro-sosiologi, etnometodologi, dan eksistensialisme, dengan menggunakan metode wawancara, observasional, dan dokumenter dengan metode kualitatif, bebas ide, dan transferable. Contohnya, paradigma ini merupakan aspek yang sangat spesifik dari pemikiran Weber. karyanya, yaitu dalam analisisnya tentang perilaku sosial.

Paradigma ini menfokuskan perhatiarnya pada definisi-definisi sosial dalam cara pelaku sosial yang mendefinisikan situasi- situasi sosial mereka dan efek dari definisi-definisi itu. Teori yang digunakan dalam paradigma ini adalah teori aksi (*action theory*), interaksionisme simbolik, teori fenomenologi (*phenomenology*), sosiologi mikro, etnometodologi dan eksistensialisme dengan pendekatan kualitatif, ideogratis dan transferabilitas dengan metode interview, observasi, dan dokumentasi. Sebagai contoh bahwa pada paradigma ini adalah salah satu aspek yang sangat khusus dari karya Weber yakni dalam analisisnya tentang tindakan sosial (*social action*).

Mengenai pelaksanaan kajian ini, karena paradigma pada dasarnya adalah sarana yang menghubungkan dunia empiris (nyata) dan dunia abstrak (konseptual), maka dalam proses melakukan penelitian, paradigma kaidah prosedural dalam pendefinisian masyarakat harus ditegakkan. diikuti, dan perilaku sosial diartikan dalam perilaku sosial Situasi sosial dalam , dimulai dari asumsi

dasar dan menelusuri permasalahan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Karena kajian ini menggunakan paradigma metode kualitatif yang didefinisikan secara sosial, maka proses penelitian, dan khususnya studi gabungan Universitas Muhammadiyah Madiun, memerlukan sumber yang dapat dipercaya berupa data lapangan, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. . Data yang diperoleh kemudian diolah dan digunakan untuk menguji keaslian temuan data lapangan, dan untuk mengetahui keaslian data yang diperoleh juga perlu dibuktikan dengan prosedur dan metode yang tepat.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bertujuan pada paradigma yang mampu menjawab semua pertanyaan mengenai permasalahan sosial, khususnya untuk menetapkan pilihan rasional Universitas Muhammadiyah Madiun yang benar, efektif dan efektif dari segi waktu, waktu dan efisiensi. biaya, dan dilakukan secara alami (natural) dan komprehensif (holistik).

Karena kajian ini menggunakan paradigma definisi sosial, maka secara umum tindakan untuk mendapatkan data dilakukannya jawab, pengamatan dan dokumentasi. Oleh karena itu dalam paradigma definisi sosial ini di samping bertujuan untuk memahami preferensi dan proses Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun berdasarkan teori pilihan rasional.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sifat kajian ini adalah eksploratif, dengan menyediakan beberapa informan untuk mengungkap permasalahan dengan memilih metode kualitatif. Kajian eksploratif menekankan pada pemilihan topik tertentu untuk diteliti berdasarkan pengetahuan penulis, yang belum diteliti secara mendalam oleh peneliti lain” . Bogdan dan Taylor (1992) menulis bahwa “kajian kualitatif adalah

suatu mekanisme untuk memperoleh data deskriptif perilaku yang bersifat verbal, tercatat, dan diamati. Dalam pendekatan kualitatif diperoleh hasil yang mendalam melalui tuturan, catatan, dan pengamatan terhadap perilaku individu, kelompok, masyarakat, atau perkumpulan tertentu dalam suatu hal yang diatur dan dikaji secara komprehensif, tidak memihak, dan holistik". Istilah kajian kualitatif mengacu pada kajian yang hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk komputasi lainnya (Strauss dan Corbin, 2013).

Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif ini adalah agar peneliti dapat dengan mudah memperoleh data yang mendalam dan natural mengenai pilihan rasional pendirian Universitas Mohammad Diyah Madien. Alasan peneliti mengadopsi metode kualitatif ini karena 1. Peneliti adalah peneliti kunci; 2. Peneliti dapat berinteraksi langsung dengan tim pendiri universitas dan pelaksana teknologi pembangunan universitas; 3. Data yang diperoleh peneliti dapat dengan mudah diuraikan karena datanya berbentuk teks; 4. Peneliti lebih diutamakan Pertimbangan proses pelaksanaan dibandingkan hasil penelitian; 5. Peneliti lebih suka menggeneralisasi data.

Berdasarkan alasan di atas, peneliti dapat berkomunikasi secara langsung dengan subjek Tim Pendiri dan Tim Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun, mengenai pilihan rasional. Data dan fakta temuan lapangan itulah nantinya yang memberi makna dalam kajian ini dan didukung pula dengan teori-teori yang terkait dengan rumusan permasalahan yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipandang tepat untuk melakukan kajian pada penelitian, karena masalah yang menjadi rumusan kajian ini adalah terjadi pada pilihan rasional pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun, dimana datanya nanti dideskripsikan dalam bentuk kata-kata pada latar individu pengasuh secara mendalam dan utuh (holistik).

Peneliti memilih pendekatan kualitatif ini karena pada hakikatnya mencoba mengamati pilihan rasional pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun, berinteraksi kepada subjek kajian secara alami dan berusaha memahami serta mencari tafsiran tentang pilihan rasional pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun. Adapun pertimbangan lain peneliti lakukan dalam kajian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui.

Kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai alasan dan proses pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun sebagai subjek kajian yang akan diteliti. Atas dasar itulah, maka dalam upaya menemukan fakta dan data secara alamiah yang melandasi, peneliti menetapkan kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif bagi para pengasuh dengan sukarela mengasuh anak yatim.

Untuk mencapai hasil yang baik dalam penelitian, maka peneliti berusaha semaksimal mungkin melaksanakan kajian sesuai dengan ciri-ciri dan pertanyaan kajian tersebut di atas. Upaya yang dilakukan peneliti adalah: 1. Mengumpulkan data pendiri dan pelaksana lembaga tenis lapangan 2. Data diperoleh pendiri dan pelaksana Universitas Muhammadiyah Madiun sesuai dengan pertanyaan penelitian, dan informasinya digali sampai titik jenuh; 3. Laporan kajian menitik beratkan pada proses dan hasil, Tulislah secara deskriptif ; 4. Melakukan analisis data secara berkesinambungan, mencari konteks atau makna yang sesuai dengan sudut pandang subjek penelitian; 5. Menarik kesimpulan melalui proses verifikasi.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan dalam kajian ini merupakan permasalahan yang sangat penting yang perlu diangkat ke permukaan dalam bentuk data deskriptif yang menggambarkan pilihan rasional pembentukan

tim pelaksana teknis pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun. Oleh karena itu, pemilihan metode kualitatif ini tidak hanya sekedar teknik untuk memudahkan pengumpulan data, tetapi juga sejalan dengan karakter pendiri Universitas Muhammadiyah Madiun ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, selain mampu berpikir secara holistik mengenai kondisi nyata berdirinya Universitas Muhammadiyah Madiun. Peneliti juga dapat memahami data yang diperoleh dari subjek penelitian, percaya bahwa semua informasi data dan subjek yang diperoleh dapat dipercaya sehingga dapat diuraikan dalam laporan penelitian.

Karena data kajian ini berbentuk data deskriptif, maka prosedur kajian yang digunakan lebih banyak di lapangan, sehingga analisis datanya juga dilakukan secara induktif, dan dilakukan terus menerus hingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dengan pemilihan teknik yang wajar. Ditemukan. Membentuk tim pelaksana Universitas Muhammadiyah Madiun untuk memungkinkan penerapan pendekatan ini dalam jangka waktu yang cukup, para peneliti lebih banyak berinteraksi dengan para pendiri Universitas Muhammadiyah Madiun karena dalam melakukan kajian ini, mereka mengutamakan proses daripada hasil.

Pemilihan pendekatan kualitatif ini juga memiliki kesesuaian dengan masalah kajian karena pada hakikatnya bertujuan untuk mengamati Tim Pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun, berusaha memahami dan mencari makna serta tafsiran tentang pilihan rasional pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun. Kajian kualitatif merupakan kajian interpretatif yang di dalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus-menerus dengan para partisipan (Creswell, 2017).

Studi-studi tersebut adalah studi kasus. Alasan digunakannya studi kasus adalah untuk mengungkap fakta-fakta dasar yang melatarbelakangi kajian ini secara detail dan mendalam, sehing-

ga mencapai hasil yang substantif dan holistik. Yin (2003) menyatakan “studi kasus adalah inquiri empirik yang menyelidiki fenomena dalam kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas, dan di mana multi sumber dapat dimanfaatkan”. Kajian studi kasus dipilih untuk mengkaji secara rinci dan mendalam tentang pilihan rasional pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun. Kajian studi kasus ini sesuai dengan sifatnya yang menekankan keutuhan dan kedalaman objek yang diteliti.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka dalam kajian ini peneliti menjelaskan alasan dan proses pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun menurut perspektif pilihan rasional sebagaimana yang terdapat di lokasi penelitian, yaitu di Universitas Muhammadiyah Madiun. Peneliti berusaha memahami preferensi dan proses Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun berdasarkan teori pilihan rasional.

C. Fokus, Unit, dan Lokasi Penelitian

Kajian akan dilakukan pada pendiri Universitas Muhammadiyah Madiun yang berlokasi di Jl. Mayjen Panjaitan 18, Kelurahan banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63137.

1. Fokus kajian memuat rincian pertanyaan mengenai wilayah atau tema yang ingin ditemukan atau digali dalam penelitian. Fokus kajian merupakan garis besar observasi penelitian, yang menjadikan observasi dan analisis hasil kajian lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, indikator digunakan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan berakhir tidak sesuai dengan judul penelitian. Fokus kajian adalah Pilihan Rasional Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun.
2. Unit Kajian dan lokasi kajian merupakan unit yang akan diteliti atau dianalisis. Berdasarkan hal tersebut, maka unit

analisis dari kajian adalah Pilihan Rasional Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun.

D. Subjek dan Informan Penelitian

Seluruh peserta yang terlibat dalam proses pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun menjadi subjek kajian ini. Unit peninjauan data didasarkan pada tujuan dan jenis data yang dikumpulkan berupa penjelasan alasan dan proses pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun, Dalam kajian ini, subjek kajian dipilih secara sengaja. Pemilihan topik yang bertujuan dimulai dengan mengidentifikasi orang-orang kunci atau informan kunci. Kegunaan informan untuk kajian ini terletak pada cara informan mendeskripsikan tentang alasan Pilihan Rasional Tim Pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun mendirikan Universitas Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun dan proses Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun maka yang menjadi.

Oleh karena itu, pengklasifikasian subjek dalam kajian ini adalah Tim Pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun, Masyarakat, Stakeholders pengguna lulusan, Dosen dan Mahasiswa semester berjalan saat proses pendirian sedangkan Informan dalam Kajian ini adalah Ketua PDM Kota Madiun Bapak H.Sutomo, ST., Ketua Pelaksana Pengungusul Pendirian Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Madiun Bapak Edie Sanyoto, S.Sos., Pelaksana Teknis Pendirian/ Penggabungan Universitas Muhammadiyah Madiun yang terdiri dari : Ketua Pelaksana Teknis Pendirian/ Penggabungan yaitu Bapak Mujahidin, S.Sos., S.Pd.I., M.Si M.KPd. Wakil Ketua Bapak Edi Purwanto, S.Kep Ns., M.Ng Sekretaris Tim Pelaksana Teknis Bapak Drs. Mahfudz Daroini, M.Si M.KPd, Bidang Sarana Prasarana Bapak Muhammad Natsir dan Bidang Standar Akreditasi Ibu Yeni Primahesti, M.Pd.

Pada langkah pertama, peneliti melakukan eksplorasi untuk memperoleh gambaran keseluruhan sebagai acuan untuk membuat kerangka konteks kajian global. Pada langkah ini, data dikumpulkan dari informan kunci. Perluas lebih lanjut cakupan pengumpulan data, biarkan subjek biasa berpartisipasi di dalamnya, dan temukan titik jenuh informasi yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian. Perluasan tersebut dilakukan secara bertahap, pertama mengumpulkan data dari kalangan terbatas, memperlakukannya sebagai subjek yang dapat memberikan data, dan terakhir memperluas jumlah subjek kajian ke subjek lain yang mendalam dan komprehensif.

Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data yang dikumpulkan pada langkah eksplorasi, sehingga menghasilkan peta taksonomi sebagai dasar untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan tema atau pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian, dan sebagai dasar untuk memilih tema umum lainnya. Dikatakan mampu memberikan data yang komprehensif. Selama langkah ini, data reflektif yang telah berhasil dideskripsikan akan dikonfirmasi oleh subjek lain agar masuk akal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah proses pengumpulan data adalah sebagai berikut: Pertama, dengan mewawancarai informan kajian yang telah diidentifikasi kriterianya. Yang kedua adalah melakukan observasi langsung terhadap objek kajian yaitu. Dengan begitu, peneliti melihat langsung berbagai pendiri Universitas Muhammadiyah Madiun Identifikasi alat penelitian, yaitu untuk menganalisis dan mengklasifikasikan data, peneliti juga membantu membimbing informan apabila pertanyaan kajian belum dipahami. Dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Proses pengumpulan data melalui wawancara dalam kajian ini dirasa belum mencukupi secara langsung data yang dibutuhkan. Beberapa orang dalam masih kurang detail dalam menjelaskan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti. Untuk itu, para peneliti telah melakukan banyak eksplorasi. Probing adalah teknik penambangan data yang lebih dalam. Caranya adalah dengan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang provokatif agar informan menafsirkan sebagaimana yang ditanyakan peneliti. Namun secara keseluruhan, informan kunci yang memberikan data melalui wawancara memberikan jawaban yang jelas dan rinci terhadap pertanyaan.

2. Observasi

Sugiyono (2020) menyatakan “bahwa observasi atau pengamatan secara langsung oleh peneliti kepada obyek yang diteliti adalah merupakan salah satu cara peneliti untuk mengumpulkan data, dan peneliti datang langsung ke lokasi kajian untuk mengamati subjek yang akan diteliti. Data-data yang diamati dan menjadi fokus pengamatan di sini adalah tentang pilihan rasional yang melatar belakangi pendirian universitas. Dalam melaksanakan observasi ini, peneliti menyaksikan langsung secara utuh (holistik) suatu kejadian mengenai proses pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun.

Melaksanakan observasi untuk memperoleh data informasi rinci dan lengkap ini sesuai dengan masalah yang diteliti, maka peneliti menggunakan teknik observasi, dalam kajian ini adalah peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. (Creswell, 2017)

3. Dokumentasi

Selama penelitian, peneliti juga dapat mengumpulkan dokumentasi, yang mengacu pada penelusuran dan pemurnian data dari wawancara dan observasi. Peneliti mencari informasi administratif dan dokumentasi terkait pertanyaan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen publik seperti surat kabar, surat kabar, laporan kantor, atau dokumen pribadi seperti buku harian, jurnal, surat, email (Creswell, 2017).

Dalam hal data kepustakaan, peneliti perlu memperoleh data tertulis untuk melengkapi temuan dan informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara, terutama untuk mendeskripsikan temuan.

F. Teknik Analisis data

Analisis data dalam kajian ini dilakukan secara terus menerus, baik peneliti berada di dalam maupun di luar lokasi penelitian. Analisis data di tempat mencakup pengkodean dan interpretasi ad-hoc terhadap berbagai informasi yang diperoleh selama setiap langkah kegiatan penelitian. Selain itu, para pendiri Universitas Mohammad Diamadin juga melakukan analisis data off-site yang merupakan kelanjutan dari analisis data on-site, yaitu analisis menyeluruh terhadap seluruh data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Dalam melaksanakan proses analisis data dalam kajian ini pendiri Universitas Muhammadiyah Madiun dilakukan secara terus menerus sejak dimulai sampai akhir penelitian. Adapun proses analisis data yang dilakukan peneliti dalam kajian ini pada dasarnya mengacu pada prosedur kajian kualitatif yang dikemukakan Miles *et al* (2014) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data Kondensasi (*Data Condensation*)

Kegiatan kajian pada tahap ini adalah data-data yang ada, peneliti mengkajinya, kemudian menganalisis dan menyempurnakan data-data yang ada, serta menyusun kembali seluruh data dan catatan lapangan yang diperoleh dari tim pendiri dan tim teknis. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dan temuan yang didokumentasikan dalam bentuk deskripsi atau laporan.

Informasi dan data yang dicatat dalam bentuk catatan lapangan oleh tim pendiri dan teknis Universitas Muhammadiyah Madiun dikategorikan, dirangkum dan dianalisis sesuai dengan konsep, kategori dan tema yang diteliti. Tujuan peneliti dalam analisis data adalah menemukan isi utama yang dianggap penting oleh peneliti terhadap pertanyaan penelitian.

Selain itu, apabila data yang diperoleh dirasa kurang, maka penyidik akan kembali menemui pelapor untuk melengkapi data hingga penyidik menganggap data tersebut cukup. Kegiatan kajian ini dilakukan untuk memperkaya data dengan menelaah seluruh data yang diperoleh berupa catatan pendiri dan tim teknis Universitas Muhammadiyah Madiun serta menganalisis, menyusun dan melengkapi seluruh catatan lapangan. bapak bangsa. Memudahkan peneliti menganalisis langkah selanjutnya.

2. Penampilan Data (*Data Display*)

Pada tahap penampilan data atau data *display* ini merupakan kelanjutan dari kondensasi data, di mana tahap ini masalah pokok selanjutnya dirangkum dan disusun yang lebih sistematis, sehingga data yang didapat dari lapangan dapat dengan mudah digambarkan secara keseluruhan secara umum, maupun hanya untuk melihat bagian-bagian tertentu dalam data penelitian. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman

yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut (Miles *et al.*, 2014).

Penyajian data dilakukan sesuai aspek penelitian, disajikan dalam bentuk tabel dari data yang diperoleh sejak berdirinya Universitas Muhammadiyah Madiun, kemudian disajikan dalam bentuk uraian dan penjelasan sesuai dengan data yang diperoleh. Semua itu bertujuan untuk merangkai informasi yang disusun dalam bentuk yang komprehensif dan mudah dikaji, sehingga peneliti dapat mengontrol data yang diperoleh. Metode ini dilakukan peneliti agar mudah menangkap dan memahami hasil penelitian. Tampilan data-data yang diperoleh dari berdirinya Universitas Muhammadiyah Madiun akan diuraikan secara lengkap oleh peneliti dalam penyajian data langsung dan akan peneliti sajikan pada bab berikutnya.

3. Menggambarkan dan Memverifikasi Kesimpulan (*Drawing and Vefying Conclusions*)

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dengan tujuan untuk menggambarkan secara memadai keadaan sebenarnya dan upaya peneliti untuk menemukan makna dari hasil analisis data kajian secara keseluruhan. Menarik kesimpulan adalah langkah selanjutnya dalam menyajikan data (penyajian data), menekankan implikasi dari semua informasi yang ditemukan peneliti di lapangan, baik itu hasil pengamatan, tanya jawab dan dokumentasi Tim Teknis Pelaksana Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun.

G. Uji Keabsahan Data

Data yang akurat dengan tingkat derajat keabsahan tinggi yang digali dan pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun tentu sangat diperlukan dalam kajian ini. Oleh karena itu, untuk menguji keabsahan data tersebut, maka Lincoln dan Guba (1985) memberikan petunjuk bahwa ada empat macam teknik yang dilakukan untuk menguji derajat kebenaran data penelitian. Ke-

empat macam teknik tersebut adalah 1. Kredibilitas; 2. Transferabilitas; 3. Dependabilitas; dan 4. Konfirmabilitas. Adapun keempat macam teknik tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas adalah merupakan standar untuk memperoleh tingkat kepercayaan data dari hasil kajian yang oleh peneliti dapatkan di lapangan dan dapat diakui kebenarannya oleh informan. Untuk mendapatkan hasil ini peneliti melakukan:

a. Memperpanjang Masa Penelitian

Pengumpulan data yang didapat melalui observasi, wawancara, dan Studi dokumentasi selama kegiatan kajian dilaksanakan di pendiri UMMAD dalam jumlah waktu yang cukup maka peneliti dapat lebih banyak menggali informasi untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang valid, sehingga data yang didapat bisa dipahami mengenai makna sesungguhnya. Untuk mendapatkan data tersebut, maka peneliti berusaha meningkatkan intensitas bertemu dengan para informan, khususnya kepada pendiri Universitas Muhammadiyah Madiun dan aktivis di dalamnya Melakukan Pengamatan Secara Tekun dan Rutin.

Berkenaan dengan pelaksanaan pengamatan secara tekun dan rutin ini peneliti melakukannya kepada informan mengenai berbagai hal yang diperlukan sesuai dengan yang berhubungan masalah-masalah yang dialami aktivis, baik yang dirasakan pada saat melakukan observasi, wawancara dan mencermati dokumentasi. Umpamanya saja peneliti mengamati aktivis pada saat memberikan pelayanan kegiatan harian serta ini peneliti lakukan secara rutin terus menerus.

b. Triangulasi

Agar data yang peneliti dapatkan dapat terpercaya maka peneliti melakukan triangulasi secara berulang-ulang, namun pada

saat triangulasi ini peneliti berusaha melakukan untuk mendapatkan data yang tidak berbeda, peneliti menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen yang berbeda dan tempat satu ke tempat lainnya, serta dari sumber informasi yang satu ke informan yang berbeda. Umpamanya, triangulasi ini peneliti lakukan kepada pendiri Universitas Muhammadiyah Madiun.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Pada saat peneliti melakukan transferabilitas ini peneliti mencari objek kajian yang esensial, maka dengan mengkaji berbagai literatur dan pendapat para ahli bidang prososial serta hasil-hasil kajian yang relevan. Sugiyono (2015: 376) menjelaskan bahwa uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam kajian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil kajian ke populasi dimana sampel itu diambil. Kemudian Moleong (2016: 324) menjelaskan bahwa tranferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima. Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam kajian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil kajian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya kajian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada kajian ini diambil.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas adalah merupakan sesuatu yang berhubungan dengan penilaian atau pengecekan mengenai benar dan salahnya peneliti dalam melakukan serta mendeskripsikan apa yang ditelitinya. Untuk mencapai tingkat kebenaran yang tinggi, maka data yang sudah didapatkan dari subjek, peneliti melakukan audit ulang kebenaran-kebenaran data serta peneliti konsul-

tasikan kepada promotor dan co-promotor untuk memeriksa dan mengarahkan peneliti agar hasil kajian ini lebih bagus.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas merupakan suatu kesesuaian data antara hasil kajian yang diperoleh dengan perspektif informan penelitian. Untuk ini peneliti mempersilahkan kepada promotor dan co-promotor selaku pembimbing dan informan untuk membaca dan menilai kesesuaian hasil penelitian. Apakah data hasil kajian yang didapat sesuai dengan perspektif informan, kalau dari hasil konfirmasi ini belum tuntas maka peneliti menggali ulang dan selalu meminta tambahan penjelasan kembali kepada informan sampai tuntas.

Dilakukan upaya ini adalah dalam rangka untuk memperoleh tingkat validitas hasil kajian yang tinggi, dengan cara meminta informasi secara berulang-ulang kepada para aktivis, walaupun untuk tahap ini dilakukan tidak kepada semua para aktivis di Universitas Muhammadiyah Madiun, namun dengan cara demikian maka peneliti dapat menuntaskan masalah yang menjadi hambatan dalam pendeskripsikan penulisan laporan kajian ke semua teknik yang kajian lakukan dalam mengecek keabsahan data ini dengan maksud untuk memperoleh transparansi, kepercayaan dan memperkecil kesalahan dalam penulisan laporan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kajian

Data temuan lapangan yang merupakan hasil kajian menjadi pemaparan data sesuai rumusan dan tujuan penelitian, yaitu: (1). Preferensi apa yang mendasari Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun berdasarkan Teori Pilihan Rasional.; dan 2. Proses pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun menurut pada perspektif rasional pilihan, diuraikankan lebih lanjut di bawah ini:

1. Preferensi apa yang mendasari Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun berdasarkan Teori Pilihan Rasional

a. Menuju Perguruan Tinggi Sebagai Pusat Pelayanan Universal dan Pemberdayaan Masyarakat

Keberadaan perguruan tinggi swasta diwilayah eks karesidenan madiun sangat berpengaruh terhadap proses penyiapan sumber daya manusia yang kreatif dan potensial terhadap kesiapan tata kelola masalah-masalah sosial diruang lingkup daerah

masing-masing. Walaupun keberadaan alumni atau keterlibatan langsung dari perguruan tinggi negeri di Jawa Timur bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat berjalan lancar, tetapi faktor rutinitas pendampingan terhadap persoalan rutinitas masyarakat tidak bisa dilakukan karena faktor jarak dan waktu. Padahal rutinitas ini menjadi kunci dari kesuksesan dan percepatan realisasi dari setiap program. Maka disinilah letak peran strategis dari perguruan tinggi swasta lokal untuk mampu berperan aktif mengimbangi proses pendampingan dan pemberdayaan masyarakat karena tercukupinya aspek ruang dan waktu yang sama dengan masyarakat, bahkan para pengelola perguruan tinggi lokal tersebut, menjadi bagian langsung dari masyarakat itu sendiri.

Dari aspek ini, semakin dinamisnya masalah sosial ditengah masyarakat seiring dengan berubahnya status desa dengan adanya UU 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa yang dulunya sebagai objek pembangunan, sekarang berubah menjadi subyek pembangunan dengan dukungan dana anggaran kegiatan langsung diterima dan dikelola oleh desa berupa dana desa dan alokasi dana desa. Kedua mata anggaran tersebut digunakan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa melalui Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) dan diimplementasikan melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berjalan. Aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa dan pembinaan masyarakat desa menjadi bagian yang diakumulasikan dalam realisasi dari kedua sumber mata anggaran tersebut.

Melihat kondisi ini, tentunya perguruan tinggi lokal yang mampu untuk berperan serta aktif dan kontinue melakukan pendampingan-pendampingan yang konstruktif secara langsung ditengah masyarakat yang keberadaannya memang betul-betul harus intens mendapatkan pendampingan. Maka perguruan tinggi lokal yang mampu mewujudkan kapasitas sumberdaya dosen dan mahasiswa yang kapabel dibidang masing-masing dan instru-

men perguruan tinggi salah satunya program studi yang uptodate mampu menjawab tantangan kebutuhan jaman, maka perguruan tinggi itu yang akan diminati sekaligus menjadi pusat layanan universal dan menjawab semua tantangan kebutuhan jaman sebagai pusat problem solving masalah-masalah sosial ditengah masyarakat, khususnya eks karesidenan Madiun.

Harapan dalam keinginan pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun untuk menuju Perguruan Tinggi Swasta sebagai Pusat Pelayanan Universal dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi;

1) Mayoritas mahasiswa sebagai ASN dan Karyawan Swasta

Mewujudkan Universitas merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat, khususnya di Eks Karesidenan Madiun untuk memiliki pilihan atas ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menjawab kebutuhan di era disrupsi peradaban yang pergeseran dinamikanya sangat cepat dan berbasis adaptif terhadap setiap aspek perubahan sosial. Maka, keberadaan Universitas Muhammadiyah Madiun ini tentu telah melalui studi kelayakan di beberapa aspek yang urgen untuk level Perguruan Tinggi swasta yang berada tepat di kota Madiun mengacu pada konsepsi pendidikan yang mampu menerjemahkan dan memberi solusi yang realistis, faktual, dan masih dalam koridor aturan akademis atas kebutuhan sekaligus situasi *users* atau pengguna (mahasiswa) yang pada saat masih bernama STISIP Muhammadiyah Madiun mayoritas adalah para birokrasi dan swasta lainnya yang harus membagi waktu antara jam kerja dengan menempuh kewajiban akademik di kampus. Hal ini sesuai penyampaian dari subjek kajian MJ selaku Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun sekaligus sebagai Ketua Tim pelaksana pendirian UMMAD;

“Sudah menjadi trade mark STISIP sejak awal berdiri identik dengan kuliah siang, sore sampai dengan malam hari, mulai hari Senin sampai dengan Jum, at (5 hari ma-

suk) kuliah. Karena mayoritas mahasiswanya adalah para ASN dan Karyawan disektor swasta lainnya yang harus membagi waktu antara tanggungjawab pekerjaan dan tanggungjawab akademik dikampus. Kondisi ini telah berjalan hampir 47 tahun sejak perkuliahan Jurusan Kesejahteraan Sosial FIS UNMUH Malang tahun 1976 dikota Madiun dan dimulainya status mandiri STISIP Muhammadiyah Madiun jurusan Kesejahteraan Sosial pada tahun 1986, selalu menjadi pilihan bagi para PNS di ruang lingkup birokrasi Pemkab.Madiun, Pemkot.Madiun, Pemkab.Ngawi, Pemkab.Magetan dan Pemkab.Pacitan. Sehingga bisa dikatakan, hampir 75 % adalah para PNS dan saat ini mereka sudah banyak yang pensiun maupun yang masih aktif dengan jabatan yang sangat strategis (Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, Sekretaris Dinas dan lain-lain)". (wawancara dengan subjek kajian MJ selaku Ketua Tim pelaksana pendidikan Universitas Muhammadiyah Madiun)

Dari statemen ini menggambarkan kondisi STISIP Muhammadiyah Madiun sudah sejak lama menjadi tujuan utama perkuliahan bagi masyarakat khususnya para PNS yang saat itu pengangkatan awal dari kategori ijazah SLTA / Golongan II, sehingga perlu peningkatan status pendidikan kejenjang pendidikan tinggi strata 1 sebagai jawaban peningkatan karier mereka. Dengan bermodalkan 2 program studi ilmu sosial: prodi ilmu kesejahteraan sosial dan prodi ilmu komunikasi menjadi bagian dari program studi yang mendapatkan legalitas dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai program studi yang dilegalkan untuk penyesuaian ijazah ke jenjang golongan III dan secara otomatis para ASN akan mendapatkan ijin belajar dari atasan langsungnya / Pejabat Pembina Kepegawaian di birokrasi.

Dari aspek praktis, para mahasiswa PNS/ASN tidak kalah piawai dari mahasiswa murni, tetapi dari aspek teori mereka masih

perlu banyak pemahaman dan penyesuaian secara akademis, oleh karena itu STISIP Muhammadiyah Madiun terus berupaya mencari terobosan-terobosan serta strategi yang kreatif dan inovatif melalui sejumlah program pengembangan pembelajaran yang berorientasi andragogi, seperti yang disampaikan subjek kajian MJ berikut:

“Dalam aspek keterampilan penguasaan masalah atau pemahaman masalah sosial, para mahasiswa dari PNS memang sangat cepat tanggap dan responsif, mestinya ini terbiasa dengan rutinitas tugasnya yang selalu melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai tupoksinya masing – masing dan tersebar di Kedinasan tempatnya bekerja. Tapi dari aspek uraian dan pemahaman akademis, karena terbaginya konsentrasi maka agak sedikit lambat dibandingkan mahasiswa murni.”
(wawancara dengan subjek kajian MJ)

Dari sekian aspek kegiatan belajar mengajar yang dilakukan selama lima hari masuk kuliah mulai pukul 15.00 wib sd 21.00 wib mulai hari Senin sd Jum’at, mahasiswa dari PNS aktif melakukan perkuliahan kecuali secara insedentil ijin berbarengan tugas dinas luar kota. Itupun untuk ukuran staf, jarang dilakukan kegiatan dinas luar. Sehingga kesempatan belajar tatap muka dengan dosen masih cukup terpenuhi. Dalam waktu yang berbeda ditemui subyek kajian ES menyampaikan sebagai berikut;

“Banyak dari pejabat pemerintah kota Madiun ini yang alumni dari STISIP menyampaikan ke saya waktu pertemuan undangan hearing dengar pendapat atas program pemkot dengan masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan dilingkup Kota Madiun ini, selalu menekankan ke saya bagaimana agar STISIP bisa berubah menjadi Universitas, dengan harapan trust dan keyakinan masyarakat

atau institusi pemerintah semakin bertambah. Walaupun mereka tetap bangga dengan STISIP, tetapi bila bisa berubah bentuk menjadi Universitas, kadar kepercayaan itu akan semakin tinggi, karena bagaimanapun juga level Universitas itu identik dengan komplitnya sarana pendukung yang ada dan banyaknya pilihan program studi. Sehingga partisipasi dan peran serta para pejabat dari STISIP akan lebih maksimal ditingkatkan serta institusi kebanggaannya yang dulu bernama STISIP bisa menjadi awal dari setiap pemecahan masalah sosial di kota Madiun, khususnya jurusan Kesejahteraan Sosial.”(wawancara dengan subjek kajian ES)

Keberadaan mahasiswa dan alumni mahasiswa yang mayoritas dari unsur PNS dan pekerja swasta lainnya, disatu sisi STISIP meringankan beban atas kebutuhan akademik mereka dan diunsur yang lainnya, sebaliknya karena mereka menjadi bagian integral dari keluarga STISIP, maka dimanapun mereka berada, khususnya ditempat kerjanya akan selalu mensosialisasikan substansi dan dinamisasi perkuliahan di STISIP Muhammadiyah Madiun dengan segala aspek kemungkinan kerjasama dengan institusi kerjanya.

2) Program GIAT SIKADES sebagai solusi kuliah dan praktek

Oleh sebab itu, dalam perkembangan jangka pendek yang dilakukan oleh pihak institusi STISIP Muhammadiyah Madiun, dicanangkan salah satu programnya adalah pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam bentuk Bakti Sosial Kampus (BSK) yang menjadi bagian dari program integrasi kajian dan pengabdian pada masyarakat berupa Berbagi Atensi, Sinergi Kampus dan Desa (GIAT SIKADES) yang nantinya berperan menjadi embrio dalam pelaksanaan pembelajaran *in class* dan *out class*. Program ini sudah tertuang dalam Renstra STISIP Muhammadiyah Madiun Tahun 2018 sd 2022 sejak capaian akreditasi dua Program Studi yang

dimiliki STISIP Muhammadiyah Madiun mencapai level B, sesuai penuturan Bapak Mujahidin selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendidikan Universitas Muhammadiyah Madiun sekaligus sebagai inisiator dan konseptor program GIAT SIKADES :

“Sebagai sebuah solusi akademik yang substansinya saling mendukung dan menopang antar matakuliah dan antar program studi, tentu Program Berbagi Atensi Sinergi Kampus dengan Desa/GIAT SIKADES menjadi jalan keluar yang terbaik bagi dosen dengan mahasiswa dari aspek teori dan praktek yang langsung link dengan obyek masalah yang dihadapi, sehingga fakta sosial yang ada langsung bisa dianalisis dengan substansi teori- teori sesuai mata kuliah yang diampu dilapangan. Tugas - tugas mahasiswa selalu akan uptodate dengan fenomena yang dihadapi dengan harapan tugas karya ilmiah dan kajian mahasiswa maupun dosen bisa langsung menganalisisnya dengan mengefektifkan forum diskusi melalui lembaga musyawarah desa dan akhirnya menghasilkan sebuah rekomendasi bagi Pemerintahan Desa Binaan (inkubator desa) dalam mencari alternatif pemecahan masalah dalam menjalankan tugasnya mengawal pembangunan agar tercipta pembangunan yang efektif dan efisien sehingga kesejahteraan masyarakat didesa dapat diwujudkan oleh pemerintah desa sebagai desa mandiri.”.”(wawancara dengan subjek kajian MJ)

Pada waktu yang berbeda lebih lanjut beliau menyampaikan:

“GIATSIKADES sebagai wahana mahasiswa sebagai dasar pembentukan soft skill, yakni usaha penerapan ilmu pengetahuan melalui kegiatan riset dan pengabdian pada masyarakat, agar mempunyai kesiapan dalam penerapan ilmu pengetahuan serta pengembangan wawasan, sehingga mampu menciptakan jaringan

komunikasi dengan masyarakat, sesuai dengan potensi ilmiah yang dimilikinya dan pada akhirnya dapat menjadikan seorang mahasiswa sebagai agen perubahan ke arah yang lebih baik dimanapun mereka berada dalam kehidupan bermasyarakat.””(wawancara dengan subjek kajian MJ)

Maka lokasi pengabdian masyarakat penting untuk dilakukan di desa binaan /desa inkubator dalam rangka mengembangkan potensi dari mahasiswa dan mencari alternatif pemecahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan program yang mengarahkan pada kemandirian, kesinambungan dan keberlanjutan bagi masyarakat desa sesuai dengan potensi lokalitas yang ada. Jika selama ini pemberdayaan selalu menganggap masyarakat desa sebagai obyek program, alangkah baiknya jika masyarakat desa diposisikan sebagai agen/pelaku atau subyek dalam perubahan desa ke arah yang lebih mandiri dan maju

Selain itu Program Berbagi Atensi Sinergi Kampus dengan Desa (GIAT SIKADES) menjadi Pemberdayaan dosen dan mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah, memiliki nilai strategis dalam meningkatkan pembangunan masyarakat di berbagai aspek kehidupan, melalui konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan Pengajaran, Kajian serta Pengabdian pada masyarakat. Pemberdayaan mahasiswa dalam mengenal lingkungan sekitar maupun lingkungan global pada era saat ini banyak dilakukan dengan menerapkan pengabdian masyarakat. Konsep pengabdian masyarakat yang dijalankan oleh setiap institusi pendidikan tinggi memiliki kekhasan masing-masing disesuaikan dengan kondisi, misi dan visi institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Pengabdian masyarakat berfungsi untuk mengasah *soft skill* dari setiap peserta didik, dimana *soft skill* yang terbentuk dengan baik maka akan mempengaruhi kemampuan adaptasi peserta didik pada saat beraktivitas di lingkungan masyarakat yang sebe-

narnya. Konsep kegiatan kampus yang terintegrasi diruanglingkup desa binaan ini akan semakin dinamis menjadi bagian pelengkap rutinitas dari pemerintah desa terkait dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukannya, seperti yang disampaikan subjek kajian MJ selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun :

“Program strategis berupa GIAT SIKADES yang merupakan program perkuliahan out class selama 1 (satu) semester di desa binaan (incubator desa) dan perkuliahan in class selama 1 (satu) semester di kampus, dengan mengedepankan konsep kuliah berbasis riset ditengah masyarakat. Tiap semester bergantian sesuai jadwal kalender akademik yang telah disusun. Pelaksanaan BSK dan GIAT SIKADES pada desa inkubator berfungsi sebagai pemberdayaan berkelanjutan, dan sebagai substansi materi pokok dari kegiatan riset, pengabdian pada masyarakat bagi dosen maupun mahasiswa, sehingga kebutuhan kredit poin kajian bagi dosen akan terpenuhi, begitu juga kebutuhan praktek kajian dan pengabdian bagi mahasiswa juga akan tecukupi, bahkan kedepan kalau kegiatan ini bisa berjalan lancar dan terstruktur, maka mahasiswa sudah tidak perlu KKN/KPM serta membuat Skripsi, karena pointnya telah melebihi. Sebab praktek berbagai disiplin ilmu diaplikasikan secara normatif, melalui berbagai kegiatan, antara lain; identifikasi masalah-masalah sosial, observasi dan studi kelayakan, diskusi masalah-masalah sosial serta mencari solusi pemecahan masalah sosial. Seluruh kegiatan yang dijalankan merupakan refleksi dari link and match yaitu keterkaitan dan kesepadanan antara aplikasi ilmu pengetahuan dari institusi kampus, dengan upaya pembangunan kesejahteraan sosial dari intitusi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa utamanya bidang penyelenggaraan pemdes, bidang pelaksanaan pemba-

ngunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa”.”(wawancara dengan subjek kajian MJ)

Penjelasan informan tersebut menegaskan melalui mekanisme checks and balances dan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Tri dharma bahkan Catur Dharma Perguruan Tinggi maka di awal tatap muka semester telah di bahas dan diinformasikan kepada seluruh mahasiswa terkait Rencana Proses kegiatan pembelajaran, selain itu topik dan lokasi Bakti sosial Kampus (BSK) sebagai bagian dari program GIAT SIKADES sudah teragendakan dalam kalender akademik tahun berjalan.

Pelaksanaan kegiatan GIAT SIKADES yang dilakukan STISIP Muhammadiyah Madiun merupakan bentuk kerja sama institusional antara pihak Perguruan Tinggi kampus STISIP Muhammadiyah Madiun dengan birokrasi pemerintah khususnya Kabupaten Madiun dengan 198 desanya yang tersebar di 15 Kecamatan dalam rangka percepatan usaha-usaha pembangunan desa guna mencapai kesejahteraan sosial masyarakat. Dari kegiatan ini bermaksud sebagai cerminan dari harmonisasi komunikasi antara STISIP Muhammadiyah Madiun sebagai institusi pendidikan tinggi dengan Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai institusi pemerintahan dan merupakan semangat untuk mempercepat pembangunan yang dimulai dari masyarakat perdesaan.

3) Permintaan Pengguna Lulusan

Kinerja STISIP Muhammadiyah Madiun juga ditentukan oleh faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal antara lain kebijakan pemerintah, pemangku kepentingan (stakeholders), alumni. Sebagai institusi pendidikan Tinggi, Sekolah Tinggi tidak bisa lepas dari beberapa kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang lain diruang lingkup Madiun serta para alumni yang terikat pada institusi dunia kerjanya sebagai pengguna lulusan. Maka kebijakan internal STISIP

Muhammadiyah Madiun harus menyesuaikan dengan alternatif dan solusi yang dibutuhkan atau harus adaptif dengan kebutuhan eksternal kampus, karena menyangkut input (mahasiswa baru) dan pasar kerja bagi alumni (*output*) lulusan. *Stakeholders* STISIP Muhammadiyah Madiun yang menyangkut dengan input adalah masyarakat umum yang berasal dari masyarakat dengan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, suku bahkan agama yang beranekaragam. Persoalan utama yang dihadapi oleh STISIP Muhammadiyah Madiun di wilayah Eks Karesidenan Madiun adalah kurangnya pemahaman dari para lulusan SMA/SMK/MA tentang Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Komunikasi yang ada serta kurang variatifnya/ragam pilihan program studi di STISIP Muhammadiyah Madiun. Kurangnya pemahaman tersebut dan terbatasnya pilihan program studi, menjadikan rendahnya animo masyarakat khususnya milenial untuk mengenal lebih jauh tentang STISIP Muhammadiyah Madiun. Kondisi ini menjadikan tantangan bagi para pengelola STISIP Muhammadiyah Madiun untuk memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana keberadaan program studi yang dimiliki dan bagaimana proses perkuliahan dengan soft skill apa yang akan dimiliki termasuk prospek kerja setelah lulus dari STISIP Muhammadiyah Madiun. Pendapat dari masyarakat tentang pentingnya perubahan bentuk perguruan tinggi diutarakan oleh Bapak Nugroho selaku alumni STISIP Muhammadiyah Madiun:

“Memang yang diketahui oleh sebagian besar masyarakat terutama para orang tua dan anak-anak lulusan SLTA di wilayah Kabupaten Madiun ini, bahwa STISIP Muhammadiyah Madiun adalah kampusnya para orang tua dan pilihan program studinya sedikit. Dengan sebutan Sekolah Tinggi, identik dengan perguruan tinggi yang kurang bonafit dan terbatas fasilitas – fasilitas pendukung belajarnya.” (wawancara dengan NG alumni STISIP Muhammadiyah Madiun)

Pendapat yang hampir sama disampaikan subjek kajian HD selaku alumni STISIP Muhammadiyah Madiun:

“Setahu saya STISIP Muhammadiyah Madiun itu sudah sangat lama, dulu kampusnya digedung Muhammadiyah jalan Mastrip Kota Madiun, dekatnya/timurnya Stadion Wilis Kota Madiun, kuliahnya para pegawai-pegawai negeri. Lha kalau sampai sekarang masih Sekolah Tinggi, berarti kurang berkembang atau bahkan tidak bisa mengikuti tuntutan perkembangan jaman. Padahal di Ponorogo ada Unmuh dan sudah lama berdiri, mengapa dikota Madiun yang banyak Universitasnya tidak bisa diikuti oleh berkembangnya STISIP Muhammadiyah Madiun? Jadi sudah seharusnya segera berubah jadi Universitas, biar masyarakat memandang sebagai tempat kuliah yang layak bagi generasi penerusnya.”
(Wawancara dengan Subyek Kajian HD selaku Alumni STISIP Muhammadiyah Madiun)

Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, akan diikuti oleh perkembangan dan pergeseran budaya masyarakat dengan konsekuensi munculnya masalah sosial-masalah sosial yang semakin berkembang jumlah dan jenisnya. Dalam situasi inilah, prospek program studi Kesejahteraan Sosial yang ada di STISIP Muhammadiyah Madiun yang masuk katagori prodi langka (di Jawa Timur hanya ada di 4 perguruan tinggi) dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam menangani masalah-masalah sosial, memiliki peran yang luas dengan dukungan turunya regulasi UU No.14 Tahun 2019 tentang Profesi Pekerja Sosial yang keberadaannya sebagai jawaban/jalan keluar atas penyelesaian maraknya masalah-masalah sosial ditengah masyarakat dan sekaligus menjadi beban kewajiban pemerintah daerah untuk mencari solusi jalan pemecahannya. Dalam kapasitas ini, Pekerja Sosial profesional akan melakukan praktek pekerjaan sosial den-

gan tujuan mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial serta meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan.

Langkah ini diimbangi dengan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu maupun masyarakat yang muaranya tumbuhnya kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Para Pekerja Sosial dalam prakteknya akan mendampingi dan memberikan pelayanan kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial baik secara personal maupun menjadi bagian dari tim penuntasan masalah sosial di lingkup pemerintah daerah. Dan gayung bersambut, dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah yang tengah menggalakkan pemberdayaan masyarakat diperdesaan yang berorientasi pada langkah-langkah praktek pekerjaan sosial yang meliputi: pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan pengembangan sosial yang leading sektornya berada di lingkup perdesaan. Maka lulusan STISIP Muhammadiyah Madiun memiliki kesempatan yang sangat luas dalam memasuki dunia kerja, terutama karena kebutuhan pemerintah dan masyarakat akan semakin meningkat terhadap penanganan masalah-masalah sosial. Terbukti alumni dari STISIP Muhammadiyah Madiun sekarang banyak yang berkiprah di dunia kerja baik instansi Negeri maupun Swasta. Berikut penuturan subjek kajian JL selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun menyatakan:

“Kerjasama antara STISIP Muhammadiyah Madiun dengan Pemerintah Kabupaten Madiun yang sudah terjalin lama dalam melakukan pemberdayaan mas-

yarakat di desa-desa wilayah Kabupaten Madiun, akan semakin mantap dan kredibel bila program studi yang ada ditambah sebagai tanggungjawab material atas kebutuhan solusi dan jalan keluar atau rekomendasi ilmiah dari bidang keahlian ilmu diperguruan tinggi yang sesuai dengan bidang dan sub bidang permasalahan diperdesaan. Akan lebih yakin dan afdhol bila institusi STISIP bisa menjadi Universitas, apalagi program – program Pemda tentang peningkatan indeks pembangunan manusia dikabupaten Madiun khususnya para generasi muda atau biasa disebut Karang Tarunadi desa – desa masih sangat membutuhkan perguruan tinggi lokal yang kredibel.” (wawancara subjek kajian JL)

Berkaitan dengan terbatasnya pilihan program studi yang berada di STISIP Muhammadiyah Madiun dan mengingat usia STISIP yang sudah 37 tahun, maka perlu dilakukan langkah – langkah taktis dan strategis untuk melakukan perubahan bentuk dari institusi Sekolah Tinggi ke Universitas, perubahan bentuk menjadi institusi Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD) perlu segera diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi yang menjawab dan membekali kebutuhan *soft skill/life skill* menghadapi tantangan zaman bagi lulusan jenjang pendidikan menengah atas di Karesidenan Madiun.

b. Rencana penyatuan AKBID Muhammadiyah dan STISIP Muhammadiyah Madiun ke Universitas Muhammadiyah Malang.

Pada bulan Nopember 2018 STISIP Muhammadiyah Madiun dihadiri secara langsung oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Madiun yang dipimpin langsung oleh Ketua PDM yaitu H.Sutomo berkunjung sekaligus mengajak musyawarah dengan para Pimpinan untuk menyampaikan beberapa hal penting, khususnya tentang rencana permohonan PDM Kota Madiun dan AKBID Muhammadiyah Madiun, akan menyatukan AKBID Mu-

hammadiyah Madiun ke Universitas Muhammadiyah Malang, serta ajakan STISIP Muhammadiyah Madiun untuk mengikuti langkah rencana tersebut. Dalam suasana kekeluargaan, subjek kajian ST selaku Ketua PDM Kota Madiun menyampaikan:

“AKBID Muhammadiyah Madiun sejak angkatan 2015 peminatnya mulai menurun, walaupun sudah ditangani langsung oleh Direktur yang diangkat dari UMM. Hal ini mestinya kondisi umum yang dialami oleh semua perguruan Tinggi yang mengelola D3 Kebidanan, apalagi saat ini yang mulai trend S1 Kebidanan. Sehingga calon mahasiswa lebih kampus memilih yang memiliki Prodi S1, maka keberadaan AKBID Muhammadiyah yang hanya memiliki 1 prodi D3 Kebidanan dengan luas tanah, gedung ruang belajar dan ruang serta alat – alat laboratorium yang sekian banyak, butuh biaya operasional yang tinggi, belum jumlah tenaga dosen yang banyak dan tenaga karyawan yang banyak pula. Sementara income semakin menurun, besar pengeluaran dari pada pemasukan, maka bila dilanjutkan terasa kurang memungkinkan”. (wawancara dengan subjek kajian ST selaku Ketua PDM Kota Madiun)

Pada kenyataannya di masing–masing perguruan tinggi penyelenggara D3 Kebidanan khususnya di Kota Madiun, ada yang mulai berkurang peminatnya dan ada yang tetap eshtablish jumlah peminatnya sesuai dengan situasi kondisi tata kelola Bidang Penerimaan Mahasiswa Baru. Lebih lanjut subjek kajian ST selaku Ketua PDM Kota Madiun menuturkan:

“Persyarikatan Muhammadiyah Kota Madiun sudah saatnya memiliki Perguruan Tinggi yang mapan dan menjadi pilihan dari para calon mahasiswa baru lulusan dari Sekolah Menengah Atas di Kota Madiun dan sekitarnya. Maka untuk mewujudkan keinginan terse-

but, dan kita kurang mampu mengelola, AKBID Muhammadiyah Madiun akan menyatukan diri dengan Fakultas Kesehatan UMM yang nantinya menjadi program studi D3 Kebidanan UMM di Madiun. Agar langkah ini bisa sekalian jalan, saya minta STISIP Muhammadiyah Madiun juga ikut menyatukan diri dengan FISIP UMM tanpa harus mengeluarkan biaya untuk operasional penyatuan tersebut, justru nanti kita langsung memiliki nama kampus yang bergengsi". (wawancara dengan subjek kajian ST selaku Ketua PDM Kota Madiun)

Dengan konsep penyatuan ini harapannya kendala – kendala akademis maupun non akademis (pembiayaan investasi, operasional rutin dan lainnya) bisa teratasi dengan rentang kendali langsung dari pengelola yang sudah sangat berpengalaman dalam tatakelola perguruan tinggi serta penganggaran yang sangat melimpah. Karena menjadi kemauan dan target dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Madiun, demi pertimbangan kepentingan stabilitas dinamika persyarikatan Muhammadiyah dan kemajuan institusi perguruan tinggi, Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun menyepakati dan siap mengikuti menyatukan institusi STISIP Muhammadiyah Madiun dengan institusi perguruan tinggi UMM sebagaimana penuturan Bapak Mujahidin selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun:

"Sebagai petugas persyarikatan dan ini saya tekankan berkali-kali kepada seluruh jajaran pejabat struktural maupun fungsional dikampus STISIP Muhammadiyah Madiun ini, kita ini semuanya adalah petugas persyarikatan yang diberi amanah dan mandat untuk melaksanakan amal usaha tata kelola perguruan tinggi di Madiun. Walaupun banyak keterbatasan-keterbatasan, itulah tantangan kita selaku petugas, bagaimana ikh-

tiar yang harus kita lakukan demi terwujudnya karya terbaik dan pelayanan terbaik untuk user maupun institusi. Sehingga, bilamana deputi pemilik institusi dalam hal ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madiun menghendaki langkah-langkah yang harus diikuti dan dilakukan oleh STISIP Muhammadiyah Madiun, maka demi kepatuhan sebagai petugas, ajakan itu kita anggap sebagai perintah dan mesti akan kita patuhi. Apalagi atas pertimbangan eksistensi dan stabilisasi perwujudan tata kelola dan menjawab tantangan kebutuhan jaman serta terbukanya peluang untuk pengembangan institusi STISIP yang lebih baik kedepan, dan khususnya prodi Kesejahteraan Sosial STISIP, dari dulu dalam berbagai bentuk pembinaan dan pemberdayaansampai saat ini dibawah pembinaan langsung Prodi Kesejahteraan Sosia dan FISIP UMM, tiada kata selain menerima tawaran dan ajakan yang konstruktif ini. Karena UMM bagi STISIP ibarat orang tua yang telah menumbuhkembangkan sejak dahulu berupa support moril maupun materii. Kedekatan UMM dengan STISIP Muhammadiyah Madiun sudah terbina lama sejak dimulainya FIS Unmuh Malang jurusan Kesejahteraan Sosial di Kota Madiun pada tahun 1976 dan akhirnya pada tahun 1986 berdiri mandiri menjadi STISIP Muhammadiyah Madiun dengan 1 Program Studi Kesejahteraan Sosial yang secara hierarki terus menerus dibina oleh UMM sejak kepemimpinan Profesor Malik Fajar MSc. Pada fase tahun 1988 beliau pernah menahkodai rintisan pendirian Unmuh Madiun, tetapi keberuntungan masih belum berpihak ke Madiun. Pembinaan dan perhatian dilanjut oleh kepemimpinan Prof.Dr. Muhadjir Effendi,M.AP, dan sampai saat ini dilanjut oleh kepemimpinan Dr.Fauzan, M.Pd.” ”. (wawancara dengan Ketua Pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun)

Berlanjut pada proses kesepakatan antara pihak PDM Kota Madiun dengan AKBID Muhammadiyah Madiun dengan Direktornya saat itu Bapak Edi Purwanto dari UMM dan STISIP Muhammadiyah Madiun. Dengan rombongan satu mobil yang terdiri dari Bapak Sutomo selaku Ketua PDM Kota Madiun, Bapak Sugiyanto selaku Ketua BPH AKBID, Eni Pemilu Kusparlina selaku perwakilan Dosen AKBID, Bapak Mujahidin selaku Ketua STISIP, Bapak Mahfudz Daroini selaku Waka Akademik STISIP dan Bapak Saiful Ahmad selaku Dosen STISIP berangkat kekampus UMM di Kota Malang menemui Rektor Universitas Muhammadiyah Malang untuk dilakukan konsultasi dan konsolidasi persiapan penyatuan dengan menginventarisasi dan menyatukan langkah - langkah sesuai dengan tahapan - tahapan yang telah dibakukan oleh Direktorat Kelembagaan DIRTJEND DIKTI KEMENRISTEK DIKTI. Adapun persiapan dan gerak langkah di Madiun, diangkat dan ditugaskan saudara SA sebagai koordinator persiapan AKBID dan STISIP untuk penyatuan dengan UMM, sebagaimana disampaikan oleh yang bersangkutan:

“Insyaa Allah saya siap untuk mengkoordinir persiapan dan melakukan langkah inventarisasi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh direktorat kelembagaan dirtjend dikti berkaitan dengan dua perguruan tinggi ini. Apalagi saya yakin dengan kesigapan dari Ketua STISIP yang all out dan memahami banyak faktor tentang perguruan tinggi” (wawancara dengan subjek kajian SA)

Dalam kesempatan berbeda, terkait dengan argumentasi penyatuan dua institusi AKBID dan STISIP Muhammadiyah Madiun menyatu dengan UMM, Bapak Mujahidin selaku Ketua Pelaksana teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun menyatakan:

“Bahwa sesuai regulasi yang berlaku pada direktorat Kelembagaan disebutkan bahwa pengertian penyatuan PTS adalah penyatuan beberapa PTS yang dikelola oleh 1 Badan Penyelenggara menjadi 1 PTS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama, dalam hal ini adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Contoh: PTS A dan PTS B yang dikelola oleh yayasan A disatukan menjadi PTS C yang dikelola oleh yayasan A juga.” (wawancara dengan subjek kajian MJ selaku Ketua Pelaksana teknis Pendidikan Universitas Muhammadiyah Madiun)

Lebih lanjut Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun terkait dengan sebab – sebab atau alasan rasional mengapa harus disatukan dengan PTS lainnya walaupun masih dalam satu ruang lingkup Persyarikatan Muhammadiyah, beliau menyatakan:

“Alasan atau argumentasi penyatuan PTS: (1) Terdapat kesamaan visi PTS pada beberapa PTS, sehingga akuisisi beberapa PTS tersebut oleh 1 badan penyelenggara akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi PTS yang disatukan. (2) Beberapa PTS yang dikelola oleh badan penyelenggara yang sama tidak memiliki kemampuan secara akademik maupun non akademik, dalam penyelenggaraan program studinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila beberapa PTS tersebut disatukan dalam 1 badan penyelenggara lainnya. (3) Untuk meningkatkan mutu, efisiensi dan efektifitas pengelolaan beberapa PTS, maka 1 badan penyelenggara yang mengelola beberapa PTS tersebut menyatukan beberapa PTSnya menjadi 1 PTS atau disalah satu PTS, nya yang sudah eshtablish.” (wawancara dengan subjek kajian MJ selaku Ketua Pelaksana teknis Pendidikan Universitas Muhammadiyah Madiun)

Proses inventarisasi data dari kedua institusi perguruan tinggi ini sudah hampir 1 bulan berjalan, dan dipertengahan Desember 2018 dilaporkan ke UMM untuk dijadikan bahan lampiran ajuan penyatuan oleh BPH terkait. Ketika sampai pada evaluasi 2 (dua) program studi yang dimiliki STISIP Muhammadiyah Madiun, ternyata kedua prodi tersebut baru saja reakreditasi dari BAN-PT pada bulan Januari 2018 melalui Asesmen Lapangan dan memperoleh predikat nilai yang memuaskan yaitu: program studi ilmu kesejahteraan sosial terakreditasi B dan program studi ilmu komunikasi juga terakreditasi B. Sedangkan prodi D3 Kebidanan AKBID terakreditasi C. Sehingga untuk dua prodi dibawah STISIP Muhammadiyah Madiun menurut tim UMM kurang tepat untuk disatukan karena dianggap masih sehat dan layak sebagai Sekolah Tinggi. Dari kesimpulan ini, proses tindaklanjut untuk sementara terhenti dan akhirnya pada minggu keempat bulan desember 2018 mendapatkan kepastian dari UMM agar *collingdown* dulu sambil menunggu situasi dan kondisi yang tepat.

Pada situasi yang berbeda tapi masih dalam bulan yang sama tepatnya pada tanggal 6 Desember 2018, kampus STISIP Muhammadiyah Madiun mendapat kiriman 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Bus Kampus) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI atas usulan atau proposal pengajuan dalam rangka mendukung kegiatan antar jemput mahasiswa sesuai dengan titik domisili kekampus serta untuk mendukung kegiatan Berbagi Atensi, Sinergi Kampus dengan Desa (GIAT SIKADES) yang mana kegiatan dimaksud mesti membutuhkan sarana transportasi yang intens khususnya untuk desa-desa diwilayah Kabupaten Madiun yang tersebar dikaki gunung wilis dan beberapa dataran rendah yang ada. Sarana transportasi ini menjadi urgen dan penting untuk kolektivitas kehadiran dilokasi kegiatan. Seperti yang disampaikan oleh subjek kajian Bapak M. Natsir, MPd selaku bidang sarana dan Prasarana Pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun:

“Ya alhamdulillah kita mendapat bantuan sarana transportasi Bus Kampus dari Kementerian Perhubungan / Kemenhub.RI yang Insya Allah ini satu- satunya kampus se Eks Karesidenan Madiun yang mendapatkan bantuan. Sehingga berketepatan kampus kita ini sangat membutuhkan sarana transportasi mengingat semakin meningkatnya kegiatan dilapangan, utamanya kegiatan GIAT SIKADES dan program – program pendampingan desa- desa di Kabupaten Madiun yang melibatkan penuh mahasiswa dan dosen-dosen.” (wawancara dengan subjek kajian MN selaku bidang sarana dan Prasarana Pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun)

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua 1 STISIP Muhammadiyah Madiun Bapak Drs.Mahfudz Daroini, M.Si,MKPD menyampaikan :

“Kegiatan – kegiatan outclass kampus oleh para dosen dan mahasiswa sesuai dengan jadwal dikalender akademik telah sedemikian rupa padatnya dengan pembagian tiap semester bergantian. Dengan harapan target capaian pembelajaran dan target capaian kajian dan pengabdian oleh dosen maupun mahasiswa bisa terpenuhi, maka dengan daya dukung sarana transportasi bus kampus ini semakin meningkatnya mobilitas kegiatan dan semakin semangatnya untuk melaksanakan aktivitas itu.” (wawancara dengan subjek kajian MZD)

Daya dukung keberadaan bantuan Bus kampus semakin menjadikan motivasi untuk sesegera mungkin mewujudkan instansi perguruan tinggi dari metamorfosis STISIP Muhammadiyah Madiun menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun.

Untuk menindaklanjuti impian perubahan bentuk perguruan tinggi diinternal persyarikatan Muhammadiyah kota madi-

un dengan bermodalkan dua institusi perguruan tinggi dilakukan musyawarah–musyawarah antara STISIP Muhammadiyah Madiun dengan PDM Kota Madiun baik di sekretariat PDM maupun dikampus STISIP Muhammadiyah jalan Mayjend. Panjaitan 18 Kota Madiun, sampai pada suatu diskusi yang disampaikan oleh Bapak Mujahidin selaku Ketua pelaksana teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun kepada Ketua PDM Kota Madiun seperti penuturannya:

“Peraturan Menteri Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI) Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, merupakan peluang dan kesempatan bagi kita untuk menggabungkan STISIP Muhammadiyah Madiun (prodi ilmu kesejahteraan sosial, prodi ilmu komunikasi) dan AKBID Muhammadiyah Madiun (prodi D3 Kebidanan) ditambah beberapa Program Studi baru yang berbasis Sains, Technology, Engineering, Mathematic (STEM) dengan konsep variasi Prodi yang Up to date (Prodi Aktuaria, Prodi Bisnis Digital, Prodi Sains Lingkungan, Prodi Biokewirausahaan dan Prodi Administrasi Kesehatan) menuju perubahan bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD).” (wawancara dengan subjek kajian MJ selaku Ketua Pelaksana teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun)

Lebih lanjut dalam diskusi tersebut, Bapak Mujahidin selaku Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun menyampaikan:

“Ini adalah moment berharga yang harus segera diambil dan dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah Kota Madiun, mumpung Pemerintah melalui Kemenristek-

dikti memfasilitasi proses perubahan bentuk perguruan tinggi swasta dalam rangka efisiensi dan efektifitas perguruan tinggi dalam melakukan pelayanan akademik pada masyarakat. Apalagi mengingat perjalanan panjang ikhtiar para perintis pendirian universitas sejak kepemimpinan PDM mulai tahun 1984 kurang beruntung, dilanjut tahun 2000 juga belum berhasil dan terakhir pada tahun 2008 ikhtiar pendirian UMMAD Raya sampai 2010 juga belum berpihak. Maka menurut feeling saya, inilah kesempatan dan peluang untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan PDM saat ini dibawah kepemimpinan bapak Sutomo akan menoreh prestasi sebagai PDM pendiri Universitas Muhammadiyah Madiun, dan jangan sampai disebut Fase Kepemimpinan yang menghilangkan aset – aset sejarah rintisan dan wujud dari perguruan tinggi Muhammadiyah Madiun yang sudah ada oleh perintis pendahulu. Marilah kita merapatkan barisan bersama dan konsentrasi memulai langkah tersebut pada Januari 2019 sebagai langkah awal tahun untuk mewujudkan cita-cita yang tertunda, yaitu terwujudnya Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD wawancara dengan subjek kajian MN selaku Ketua Pelaksana teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun)

Berdasarkan penjelasan dari subyek kajian di atas bahwa di tahun ini pemerintah memberi kesempatan perguruan tinggi swasta dalam rangka efisiensi dan efektifitas perguruan tinggi. Dengan ini subyek kajian MN memberi semangat untuk mewujudkan kembali dari perjalanan panjang ikhtiar para perintis pendirian universitas sejak kepemimpinan PDM mulai tahun 1984 kurang beruntung, dilanjut tahun 2000 juga belum berhasil dan terakhir pada tahun 2008 ikhtiar pendirian UMMAD Raya sampai 2010 juga belum berpihak. inilah kesempatan dan peluang untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan PDM saat ini akan menoreh

prestasi sebagai PDM pendiri Universitas Muhammadiyah Madiun, dan jangan sampai disebut Fase Kepemimpinan yang menghilangkan aset–aset sejarah rintisan dan wujud dari perguruan tinggi Muhammadiyah Madiun yang sudah ada oleh perintis pendahulu.

2. Proses Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Dari STISIP Muhammadiyah Madiun, AKBID Muhammadiyah Madiun Menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun berdasarkan Teori Pilihan Rasional

Dalam sub hasil kajian ini memaparkan data yang berisi tentang Penggabungan Institusi AKBID Muhammadiyah dan STISIP Muhammadiyah Madiun beserta Penambahan Prodi Baru menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun. Perubahan perguruan tinggi swasta dalam Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 adalah tentang Pendirian, Perubahan, Pencabutan ijin PTS dan terdiri dari: (1) Perubahan nama PTS, (2) Perubahan Lokasi PTS, (3) Perubahan Bentuk PTS, (4) Pengalihan Pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara Baru (5) Penggabungan dua PTS atau lebih menjadi satu PTS baru (6) Penyatuan dari satu PTS atau lebih kedalam satu PTS lain. Maka untuk proses di Madiun lebih tepat disebut proses penggabungan dua institusi perguruan tinggi swasta menjadi PTS baru. Seperti yang di sampaikan oleh subjek kajian MJ berikut;

“Tanggal 20 desember 2018, dimulai rapat internal di STISIP Muhammadiyah Madiun bersama BPH STISIP Muhammadiyah Madiun membahas rencana tentang pendirian Universitas. Hal ini dilakukan dari hasil konsultasi dan pencermatan ketua STISIP Muhammadiyah Madiun pada Direktorat Jenderal Kelembagaan Kemendikdikti tentang Permenristek dikti nomor 51 tahun 2018 persyaratan dan prosedur pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta serta pembukaan program

studi pada perguruan tinggi. Waktu terus bergulir sampai pada tanggal 23 Januari 2019, terbit kebijakan dari Kemenristekditi tentang Reformasi Kebijakan pendirian program studi dan pendirian/ perubahan PTS Tahun 2019, dari semula pendirian Universitas mempersyaratkan minimal ada 10 Prodi (6 Prodi IPA dan 4 Prodi IPS), dipersempit menjadi minimal 5 Prodi (3 Prodi STEM dan 2 prodi IPS). Sementara ini, STISIP Muhammadiyah Madiun sudah memiliki dua Prodi IPS yang sudah establish, yakni Prodi Kesejahteraan Sosial dan Prodi Ilmu Komunikasi yang dua-duanya terakreditasi B". (wawancara dengan subjek kajian MD)

Hal yang serupa juga yang disampaikan oleh Bapak Mahfudz Daroini Wakil Ketua 1 bidang akademik STISIP Muhammadiyah Madiun:

"Alhamdulillah kebijakan pemerintah yang sangat menggembirakan, dari sebelumnya minimal pemilikan 10 program studi yang terdiri dari 6 Prodi berbasis IPA dan 4 Prodi berbasis IPS, kita di STISIP Muhammadiyah Madiun sudah memiliki 2 prodi IPS yang keduanya telah terakreditasi B, jadi tinggal pengusulan 3 prodi yang ketentuannya berbasis Sains, Technology, Engineering dan Mathematic (STEM). Insya Allah atas arahan dan masukan dari Bapak Ketua STISIP, kita siap menindaklanjuti proses tersebut." (wawancara dengan sebyek kajian MZD)

Pada kesempatan dan waktu yang sama, Ketua BPH STISIP Muhammadiyah Madiun, Bapak Edy Sanyoto menuturkan:

"Saya sangat sepatat dengan ide dan gagasan serta kemauan yang kuat dari Ketua STISIP, dan sekaligus saya minta segenap pimpinan STISIP Muhammadiyah Madiun atas arahan dari Ketua STISIP segera menindaklan-

juti proses penggabungan dan penambahan program studi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melibatkan semua unsur yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah Kota Madiun untuk mewujudkan langkah ini. Kita satukan seluruh potensi, Insya Allah akan banyak jalan keluar, saya yakin dengan saudara Ketua STISIP, seperti yang sudah - sudah, walau banyak keterbatasan yang kita hadapi, mesti akan banyak cara dan jalan keluar untuk tuntasnya maksud tersebut, apalagi perwujudan Universitas adalah cita-cita yang sudah sangat lama dari para perintis PDM Kota Madiun sebelum-sebelumnya dan sangat mulia.” (wawancara dengan subjek kajian ES)

Akhirnya sampai pada tanggal 30 Januari 2019, Bapak Mujahidin selaku Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun mengundang unsur-unsur persyarikatan dan pimpinan beserta BPH kedua institusi perguruan tinggi Muhammadiyah Madiun untuk dilakukan rapat di STISIP Muhammadiyah Madiun. Dalam rapat tersebut membahas tentang teknis dan tata cara rencana penggabungan antara STISIP Muhammadiyah Madiun dengan AKBID Muhammadiyah Madiun dan penambahan program studi untuk menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun. Dalam rapat itu diputuskan bahwa rencana penggabungan STISIP Muhammadiyah Madiun dan AKBID Muhammadiyah Madiun serta penambahan prodi baru untuk menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun, sambil menunggu SK BPH Pendirian dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah perlu untuk membentuk Tim Pendirian, seperti yang disampaikan oleh Bapak Mujahidin, inisiator dan fasilitator pendirian :

“Secara formal sesuai regulasi yang ada, proses pendirian atau perubahan bentuk perguruan tinggi swasta dalam hal ini penggabungan institusi PTS dan penambahan prodi baru, cukup dilakukan oleh Badan Penyeleng-

gara atau BPH Pendirian Universitas Muhammadiyah yang di SK, kan oleh PP Muhammadiyah dan tugasnya secara formal melakukan surat menyurat secara resmi baik diinternal hierarki Persyarikatan Muhammadiyah maupun ke eksternal dengan institusi terkait proses penggabungan. Selanjutnya BPH Pendirian melakukan fungsi administratif proses pengajuan mulai kebenaran material akademik maupun non akademik ke LLDIKTI 7 Surabaya serta berlanjut sampai pada tahap verifikasi dan asesmen kelayakannya. Setelah layak mendapat rekomendasi berlanjut memohon akun website serta mengupload ke Kemenristekdikti melalui Ditjend Kelembagaan, sampai pada proses sesuai tahapan-tahapan yang telah dibakukan oleh ditjend. Kelembagaan. Sambil menunggu Surat Keputusan pengangkatan Badan Pembina Harian (BPH) Pendirian Universitas, maka sangat penting dibentuk Tim pelaksana teknis pendirian sebagai sub sistem dari Tim Pendirian (PDM Kota Madiun) yang sebenarnya nantinya juga PDM Kota Madiun menjadi bagian dari BPH Pendirian. Tim Pendirian ini secara substansi mengedepankan dan menempatkan PDM Kota Madiun sebagai struktur utama dalam proses pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun, khususnya untuk diketahui masyarakat lokal Madiun, karena secara formal diKemenristekdikti, melalui Ditjend. Kelembagaan, pendiri Universitas Muhammadiyah Madiun adalah Badan Penyelenggara atau BPH Pendirian.” (wawancara dengan subjek kajian MD)

Oleh sebab itu untuk mengawali inventarisasi data-data kedua institusi yang akan digabung serta penyiapan bahan-bahan akademik program studi baru yang akan diusulkan, dimatangkan dan dibakukan struktur Tim Pendirian, yang didalamnya sebagai pelaksana proses ini ada Tim Pelaksana Teknis Pendirian/Penggabungan sebagai motor penggerak, dan senyatanya semuanya pros-

es pelaksana dan penanggungjawab lancar tidaknya tahapan ada pada Tim Pelaksana Teknis ini.

Pada saat itu, Pengelola AKBID Muhammadiyah Madiun yang diwakili oleh wakil direktur 1, 2 dan 3 (Bu Eni Pemilu, Bu Ruri Narulitasari dan Bu Sundari, merasa kurang berkenan dengan rencana penggabungan tersebut, karena lebih cenderung menyatu dengan institusi PTS di atasnya, tapi kenyataan berbicara lain. Akhirnya melalui musyawarah mufakat, dibentuklah Tim Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun dengan dibuatkan Surat Keputusan oleh PDM Kota Madiun dengan komposisi berikut:

Tim Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun dari proses penggabungan antara STISIP Muhammadiyah Madiun dengan AKBID Muhammadiyah Madiun dan Penambahan 5 Prodi Baru.

1. Penasehat: Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.
2. Tim Pendiri : Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Madiun.
3. Ketua : H. Sutomo ST (Ketua PDM Kota Madiun)
4. Pelaksana Pengusul Pendirian ; Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Madiun
5. Ketua ; H. Eddie Sanyoto, S.Sos Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Madiun
6. Pelaksana Teknis Pendirian/Penggabungan ;
7. Ketua ; Mujahidin, S.Sos., S.Pd.I., M.Si., M.KPd (Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun)
8. Wakil Ketua ; Edi Purwanto, S.Kep. Ns., M.Ng (Direktur AKBID Muhammadiyah Madiun)
9. Sekretaris Drs. Mahfudz Daroini, M.Si., M.KP.d
10. Bendahara; Drs. Suyono, M.Pd

11. Koordinator Bidang-Bidang

a. Bidang Sarana Prasarana ; Muhammad Natsir, M.Pd

b. Bidang Standar Akreditasi ; Yeni Primahesti, M.Pd

Selanjutnya, terutama dari unsur PDM Kota Madiun dan kedua belah pihak BPH STISIP dan AKBID, diputuskan bahwa Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun, Bapak Mujahidin diminta untuk menjadi Ketua Tim Pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun.

Dengan segala ikhtiar dimulailah kegiatan rencana penggabungan dengan lebih dulu menghubungi Direktur AKBID Muhammadiyah Madiun (Bp. Edi Purwanto) untuk memberitahukan rencana penggabungan tersebut, yang kemudian disambut dengan gembira oleh beliau. Kemudian dibuatlah Surat Pernyataan Kesediaan bergabung antara Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun (Mujahidin, S.Sos., S.Pd.I., M.Si., M.K.Pd.) dengan Direktur AKBID Muhammadiyah Madiun (Edi Purwanto, S.Kep.Ns., M.Ng) ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2019

Tanggal 8 Februari 2019, dimulai rapat pertama untuk menindaklanjuti SK Tim Pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun, dengan merencanakan prodi-prodi baru yang berbasis STEM. Alasan utamanya adalah karena jika mengandalkan penggabungan antara STISIP dan AKBID Muhammadiyah Madiun, belum dapat memenuhi standar minimal jumlah prodi yang ditetapkan (2 Prodi Strata 1 Sosial dan 3 Prodi Strata 1 berbasis STEM). Sementara AKBID Muhammadiyah Madiun hanya memiliki satu Prodi Diploma D3 Kebidanan yang tidak dapat diakui sebagai Prodi baru di Universitas, karena mempersyaratkan harus Strata Satu (S-1). Oleh sebab itu, untuk menutup kekurangan prodi yang dimiliki oleh AKBID Muhammadiyah Madiun, harus didirikan prodi baru Strata Satu dan berbasis STEM.

Adapun prodi-prodi baru yang direncanakan adalah; (1) Prodi Administrasi Kesehatan S-1 (2) Prodi Administrasi Rumah Sakit S-1 (3) Prodi Gizi S-1 (4) Sains Lingkungan S-1 (5) Prodi Sistem dan Teknologi Informasi S-1 (6) Prodi Bisnis Digital S-1

Tanggal 23 Februari 2019, Ketua tim Pelaksana Teknis Pendirian mengutus 3 orang (bapak Mahfudz Daroini, Bu Yeni Primahesti dan Bu Ningrum Palupi Widyasari) untuk berkonsultasi kepada Biro Kelembagaan LLDikti Wilayah VII di Surabaya tentang rencana penggabungan STISIP Muhammadiyah Madiun dan Akbid Muhammadiyah Madiun serta rencana pendirian prodi-prodi baru berbasis STEM. Dari hasil konsultasi tersebut diperoleh saran; (1) Prodi kesehatan agar dikurangi (2) Prodi yang sudah pasaran agar diganti prodi lain yang berbeda atau belum ada, dengan prodi di Universitas lain di sekitar Madiun (3) pilih prodi-prodi STEM yang *marketable*.

Tanggal 24 Februari 2019, Tim Pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun melakukan rapat untuk menindaklanjuti hasil konsultasi ke LLDikti wilayah VII tersebut. melalui berbagai argumentasi dari masing-masing peserta rapat, akhirnya diputuskan bahwa prodi-prodi baru yang akan dibuka adalah; (1) Prodi Administrasi Kesehatan S1 (2) Prodi Sain Lingkungan S1, (3) Prodi Bisnis Digital S1 (4) Prodi Sains Aktuaria S1 dan (5) Prodi Bio Kewirausahaan S1.

Beberapa alasan penting dari rencana dibukanya prodi-prodi tersebut adalah; (1) *marketable* (2) belum ada di perguruan tinggi lain di wilayah madiun dan sekitarnya (3) ketersediaan calon dosen yang telah melamar serta (4) kemampuan penyediaan sarana dan prasarana sebagai syarat pendirian prodi baru.

1. Persyaratan pendirian PTS:

- a. Memiliki Badan Penyelenggara / Badan Pelaksana Harian pendirian Universitas.

Sebagai langkah awal yang dipersyaratkan oleh aturan dari Kemenristek dikti, Ditjend Kelembagaan, bahwa pengusul/pemohon ajuan penggabungan kedua institusi perguruan tinggi adalah BPH Pendirian Universitas, guna kepentingan dimaksud harus melakukan konsultasi dan konsolidasi ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur selaku koordinator dan perekomendasi perguruan tinggi muhammadiyah di tingkat provinsi. Sambil bersilaturahmi maka pada tanggal 8 maret 2019 dilakukan perjalanan ke Surabaya seperti yang disampaikan oleh subjek kajian MJ kepada Ketua PDM Kota Madiun Bapak Sutomo:

“Pangapunten Pak, mengingatkan, nanti jam 1 siang / 13.00 wib kita rombongan berangkat ke PWM Jatim. Rombongan mobil konsepnya tetap seperti kemarin ketika ke Majelis diktilibang PP Muhammadiyah Jogja. Rombongan mobil 1 (bapak sutomo, bapak sugijanto bapak suyono dan bapak satrio). Rombongan mobil 2 (bapak eddie sanyoto, bapak Mujahidin, bapak mahfudz, bapak m. natsir dan bu yeni primahesti).” (Wawancara dengan Bapak Mujahidin, S.Sos., S.Pd.I., M.Si M.KPd selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendirian/Penggabungan Universitas Muhammadiyah Madiun dan Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun)

Percakapan ini penting untuk ditampilkan karena merupakan alur satu rangkaian dari temuan data dilapangan. Keberadaan tim silaturahmi ini walaupun keanggotaannya sering bergantian, tetapi keanggotaan yang ini, selalu terus menerus/paling sering melakukan baik dengan hierarki Persyarikatan Muhammadiyah maupun ke sesama perguruan tinggi Muhammadiyah untuk studi banding. Seperti yang disampaikan oleh subjek kajian MZD tentang silaturahmi di Kantor sekretariat PWM Jawa Timur, beliau Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Bapak Dr.H. Saad Ibrahim, MA menyampaikan:

“Kita PWM Jawa Timur mendukung dan mensupport langkah-langkah yang dilakukan Madiun untuk mewujudkan Universitas Muhammadiyah Madiun. Kita bantu semaksimal mungkin, toh kita juga sudah ada universitas Muhammadiyah yang sudah senior dan mapan dalam tatakelola Good University Governounce. maka untuk siapa yang layak menjadi BPH Universitas Muhammadiyah Madiun, saya pikir Madiun lebih tau persis siapa-siapa yang pantas. Tapi ingat, BPH ini memulai suatu proses, ghiroh perjuangan harus dikedepankan, dan yang penting guyub rukun, jangan tukaran sesama aktivis Muhammadiyah. Segera ajukan permohonannya, Insya Allah secepatnya saya tanda tangani rekomendasinya.” (wawancara dengan subjek kajian MZD)

Sehari setelah selesai dari Konsultasi Ke PWM Jawa Timur, maka pada tanggal 9 Maret 2019 dilakukan musyawarah di internal Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madiun dengan BPH STISIP Muhammadiyah Madiun dan BPH AKBID Muhammadiyah Madiun di ruang rapat STISIP Muhammadiyah Madiun, membahas dan menyepakati siapa nama – nama yang akan masuk menjadi BPH Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD). Pada momen ini Bapak H.Eddie Sanyoto, S.Sos sebagai Ketua BPH STISIP Muhammadiyah Madiun menyampaikan :

“Untuk komposisi BPH Pendirian Universitas sebagai syarat pertama dan berfungsi sebagai penanggungjawab utama melakukan semua proses ajuan penggabungan, walaupun nanti secara teknis dilakukan oleh tim pelaksana teknis pendirian. Melihat fungsi yang begitu vital, harapan saya keanggotaan ini benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas serta ghiroh perjuangan yang kuat untuk melakukan proses ini. Maka komposisinya harus mengakomodir ketiga unsur dari

PDM Kota Madiun dan kedua BPH STISIP maupun AKBID Muhammadiyah Madiun.”

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh subjek kajian SG selaku Ketua BPH AKBID:

“Memang harus berimbang, biar semuanya satu langkah bersama mewujudkan harapan besar dari semua civitas akademik dikedua perguruan tinggi serta harapan yang sekian panjang dari para perintis perguruan tinggi Muhammadiyah Madiun sejak dahulu. Apalagi saya ini termasuk pelaku lama dipersyarikatan Muhammadiyah Madiun, jadi tau persis bagaimana para perintis ini dulu berjuang.” (wawancara dengan subjek kajian SG)

Akhirnya komposisi Pengurus BPH Universitas Muhammadiyah Madiun sudah mufakat dan disepakati dengan susunan dan jabatan masing-masing sebagai berikut :

Ketua	H.Eddie Sanyoto, S.Sos (unsur Ketua BPH STISIP Muhammadiyah Madiun)
Sekretaris	Sugianto, SPd, MPd (unsur Ketua BPH AKBID Muhammadiyah Madiun)
Bendahara	Sutomo, S.T (unsur Ketua PDM Kota Madiun)
Anggota	Satriyo Priyo Handoko, M.Si (Sekretaris PDM Kota Madiun)
Anggota	Ely Inayah, S.Ag., M.Pd (Ketua Majelis Dikdasmen PDM Kota Madiun)

Akhirnya pada tanggal 11 Maret 2019 dilayangkan Surat oleh Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur perihal Rekomendasi Permohonan Penerbitan Surat Keputusan BPH Universitas Muhammadiyah Madiun. Tanggal 18 Maret 2019 turun Surat Rekomendasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk selanjutnya diajukan ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan tanggal

23 Maret 2019 turun Surat Perihal Usul Penetapan Pengurus BPH Universitas Muhammadiyah Madiun ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Akhirnya tanggal 20 April 2019 turunlah Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengangkatan Pengurus BPH Universitas Muhammadiyah Madiun.

b. Memperoleh rekomendasi tertulis dari LLDIKTI Wilayah VII Jawa timur.

Tahap ini sangat ditunggu dan diharapkan oleh seluruh komponen yang ada di ruang lingkup Persyarikatan Muhammadiyah Madiun, karena bagaimanapun juga persiapan dan inventarisasi data-data akademik untuk kevalidasian bahan ajuan untuk universitas tidaklah ringan. Selain variannya lebih kompleks, kecermatan dan ketelitian harus disesuaikan dengan standart Nasional Perguruan Tinggi, sehingga kurun waktu lima bulan sudah terasa sangat dinamis sekali interaksi yang dibangun dan dijalin intern maupun antar institusi amal usaha perguruan tinggi dengan persyarikatan Muhammadiyah serta dengan stakeholders lainnya. Maka turunnya rekomendasi dari LLDIKTI Wilayah VII Jawa timur sebagai angin segar yang menyejukkan kepenatan dan membangun semangat bagi semuanya, karena ini menyangkut fit and proper test, uji kepatutan dan kelayakan dari sekian aspek materi kelayakan prodi, tingkat prospek dan eksistensi program studi yang ada maupun usulan baru serta eksistensi dari Badan Penyelenggara atau BPH Universitas, seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana Teknis Pendirian, Bapak Mujahidin :

“Pada tanggal 13 Mei 2019, turun rekomendasi dari LLDikti Wilayah VII Surabaya, tentang penggabungan STISIP Muhammadiyah Madiun dan AKBID Muhammadiyah Madiun serta pendirian prodi baru, menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun. Setelah dilakukan evaluasi atas rekam jejak badan penyelenggara atau BPH Universitas yang berisi tentang riwayat berdirin-

ya badan penyelenggara dalam hali ini Persyarikatan Muhammadiyah dan badan hukum nirlaba lainnya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku beserta dasar hukum terbentuknya badan penyelenggara tersebut. Dan terkait dengan kegiatan badan penyelenggara lainnya juga harus diuraikan. Termasuk organ badan penyelenggara, identitas ketua, sekretaris, bendahara dan anggota lainnya. Dilanjut proses analisis kejenuhan dan keberlanjutan program studi yang diusulkan harus dijelaskan secara logis dan berbasis data dari berbagai sumber yang relevan serta otentik. Program studi berbasis Sains, Teknik, Engineering, Mathematic (STEM) adalah jawaban atas kebutuhan jenjang pendidikan tinggi di era disrupsi budaya, era percepatan perubahan pola pikir, pola perilaku di masa digitalisasi. Perubahan – perubahan jenis pekerjaan yang semakin lekat dengan teknologi digital semakin menggeser tenaga manusia. Maka kesiapan sumber daya manusia selaku aktor pelaku pencipta dunia kerja dan aktor yang membutuhkan ruang lingkup kerja harus menyesuaikan dengan percepatan teknologi digital. Lulusan peserta didik dari sekolah lanjutan atas yang membutuhkan pendidikan lanjut tentunya harus difasilitasi dengan luaran capaian pembelajaran yang bisa dijadikan modal untuk mengurai masalah pekerjaan saat ini dan kedepan. Program studi seperti Aktuaria lebih berperan dominan dibanding akuntansi semata. Sebagai prodi yang menganalisis dan menekuni manajemen resiko keuangan dimasa depan, sangat tepat untuk bidang pekerjaan apapun. Program studi bisnis digital lebih menekuni mekanisme bisnis berbasis digital seperti prospek bisnis start up, gojek, gopay dll. Prodi biokewirausahaan fokus pada teknis dan tatakelola pendidikan interdisipliner yang menggabungkan pengetahuan dasar dan ketera, pilan riset bidang ilmu hayati serta keterampilan ma-

najemen, bisnis dan enterpreneurship. Program studi administrasi kesehatan berorientasi pada bidang manajerial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan institusi pelayanan kesehatan yang bermutu. Program studi sains lingkungan, mengeksplorasi bidang rekayasa dan manajemen lingkungan”.(wawancara dengan subjek kajian MJ)

- c. Dosen untuk satu program studi paling sedikit berjumlah lima orang dosen tetap

Untuk dosen tetap harus berijazah paling rendah Magister dalam bidang keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan prodi yang diusulkan. Berusia paling tinggi 58 tahun, bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) yaitu 37,5 jam per minggu dan belum memiliki NIDN. Selain itu calon dosen harus membuat surat pernyataan kesediaan menjadi dosen tetap pada perguruan tinggi akan didirikan. Dalam penyampaiannya, MZD selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Sekretaris tim pelaksana:

“Mulai tanggal 8 Februari, sekretaris tim Pelaksana dibantu Tim IT membuat pengumuman rekrutmen calon dosen yang dipublikasikan melalui media sosial; antara lain Instagram, marketplace, FB dan lain-lain. Dalam waktu kurang lebih satu bulan telah terkumpul lebih dari 300 orang pelamar calon dosen dari berbagai disiplin ilmu. Maka Tim pelaksana segera melakukan seleksi berdasarkan kebutuhan masing-masing prodi”. (wawancara dengan subjek kajian MZD Wakil Ketua Bidang Akademik dan Sekretaris tim pelaksana)

Selanjutnya, Drs.Mahfudz Daroini menyampaikan:

“Pada tanggal 18 April 2019 (bertepatan dengan tanggal 13 Romadhon 1440 H) seluruh calon dosen masing-mas-

ing prodi dipanggil untuk hadir ke Madiun dalam rangka meminta kesediaan menjadi calon dosen dengan mengisi formulir kesediaan menjadi dosen". Dalam proses ini, ada beberapa calon dosen yang mengundurkan diri karena pertimbangan jarak yang terlalu jauh. Oleh karena itu, Tim Pelaksana Pendirian segera bergerak cepat untuk mencari pengganti calon dosen yang mengundurkan diri tersebut. (wawancara dengan subjek kajian MZD)

- d. Lahan untuk kampus Universitas yang akan didirikan paling sedikit memiliki luas 10.000 m dengan status hak milik.

Kepemilikan lahan tanah dengan status hak milik atau status hak guna bangunan dan lainnya telah diatur oleh regulasi yang ada, menjadi persyaratan pokok untuk berdirinya perguruan tinggi swasta. Seperti yang disampaikan oleh subjek kajian MJ sebagai berikut;

"Sebagai sarana ruang gerak untuk bangunan gedung permanen pendidikan, sarana ruang belajar, laboratorium dan sarana pendukung pendidikan tinggi lainnya menjadi suatu syarat yang harus dimiliki. Untuk perguruan tinggi Muhammadiyah, sebagai salah satu amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, atas nama pemilik yang tertera di sertifikat hak milik adalah Persyarikatan Muhammadiyah selaku Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu, seluruh aset tanah yang diajukan dalam penggabungan dua institusi STISIP Muhammadiyah dan AKBID Muhammadiyah Madiun, sertifikat tanahnya harus atas nama pemiliknya yaitu Persyarikatan Muhammadiyah" (Wawancara dengan subjek kajian MJ selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendirian/Penggabungan Universitas Muhammadiyah Madiun dan Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun)

Sementara sebagai kelengkapan informasi, Bapak Drs. Mahfudz Daroini, Msi sebagai pelaku yang paling lama dan bertahan di STISIP Muhammadiyah Madiun menyampaikan:

“Untuk aset tanah AKBID Muhammadiyah Madiun sebagai calon Kampus 2 di jalan ringroad barat Kota Madiun semuanya atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, karena keberadaan AKBID Muhammadiyah Madiun terhitung masih baru berdiri pada tahun 2008 hasil dari ikhtiar rintisan yang dimulai pada tahun 2005 dan pendirian yang dipelopori oleh pimpinan STISIP Muhammadiyah Madiun pada saat itu. Sampai saat ini para perintis dan pendiri AKBID Muhammadiyah Madiun yang masih ada adalah Bapak Mahfudz Daroini dan Bapak Mujahidin sebagai saksi pelaku sejarah pendirian Akbid yang masih eshtablish pada STISIP Muhammadiyah Madiun sampai saat ini”.

Mekanisme dan proses pengurusan tanah untuk bangunan gedung STISIP Muhammadiyah Madiun yang direncanakan sebagai Kampus 1 atau Kampus Pusat administrasi terus dikejar dan diseriusi serta melibatkan banyak pihak. Mengingat ini adalah aset utama yang seharusnya sudah kelar dan mapan terlebih dahulu. Tapi karena mekanisme dan penyimpanan bukti fisik surat-surat berharga termasuk sertifikat tanah semuanya tidak berada di kampus, maka kadangkala terjadi trouble dalam tatakelola bukti fisik tersebut, seperti yang disampaikan oleh subjek kajian MJ selaku Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun dan Ketua Tim Pelaksana Teknis Pendirian :

“Untuk proses tanah wakaf yang berdiri bangunan gedung STISIP Muhammadiyah Madiun, prosesnya tetap sampai Badan Wakaf Indonesia Propinsi Jatim. Bapak H. Eddie Sanyoto akan mengawal proses tersebut, kebetulan ketua Badan wakaf Indonesia (BWI) Madiun se-

bagai wakil sekretaris Baznas Kota Madiun, yang mana Bapak H.Eddie Sanyoto adalah sebagai Ketua Baznas Kota Madiun. Selain itu, Bapak H. Eddie Sanyoto selaku Ketua BPH STISIP Muhammadiyah Madiun, beliau menyempatkan diri dan menyanggupi untuk menjalin komunikasi dengan putra putri almarhum Drs.H.Imam Ghozali untuk kepentingan mengurus tanah yang di atasnya terbangun gedung STISIP. Tanah seluas 3000 m2 yang dipakai untuk bangunan gedung STISIP Muhammadiyah Madiun sejak tahun 1985 ini sebenarnya adalah tanah pembelian dari infaq dan shodaqoh yang digalang oleh tim pendirian/pembangunan perguruan tinggi muhammadiyah Madiun diruang lingkup PDM Madiun saat itu. Karena model pensertifikatan tanah saat itu kalau,milik organisasi, maka pengusulnya adalah ketuanya, sehingga disertifikat tanah persyarikatan tertulis atas nama identitas KTP Ketua PDM bukan atas nama persyarikatan muhammadiyah seperti saat ini dan saat itu pola seperti ini berlaku umum dimanapun juga. Drs.H. Imam Ghozali menyempatkan menulis dokumen surat pernyataan bahwa tanah seluas 3000 m2 tersebut adalah benar-benar milik Persyarikatan Muhammadiyah (PDM Madiun) dan menyatu dengan sertifikat tanah tersebut. Akan tetapi karena kepentingan yang dianggap mendesak untuk pengembangan amal usaha kesehatan, pada tahun 2008 ketika RSI Aisyah Kota Madiun mau mengembangkan gedung bangunan pelayanan, butuh pengembangan ruang-ruang pasien, untuk keperluan jaminan pinjaman bank, PDM Kota Madiun saat itu merubah status atas nama tanah dari Drs.H. Imam Ghozali ke ahli warisnya, karena beliau sudah meninggal dunia, sehingga bisa dipakai jaminan bank untuk pengembangan RSI Aisyah Kota Madiun. Dengan diprosesnya pendirian Universitas maka status tanah dibangun gedung STISIP Muhammadiyah

Madiun perlu dikembalikan lagi ke status yang sesungguhnya. Almarhum Drs.H.Imam Ghozali sebagai tokoh Muhammadiyah Madiun, putra putrinya telah sukses dan tersebar domisilinya di berbagai kota di pulau Jawa, khususnya putra pertama beliau yaitu Dr.H.Bambang Supriastoto,SH,MH (mantan Ketua PDM Kab.Madiun, Kepala PA Kab.Malang) , dengan suka cita dan ikhlas menyediakan waktu dan tenaganya untuk mempermudah setiap proses pengembalian status tanah tersebut guna legalitas aset untuk pendirian Universitas dan alhamdulillah sukses tepat waktu sampai pada saat tanah tersebut harus menjadi bukti aset kepemilikan dari proses ajuan Universitas Muhammadiyah Madiun.” (wawancara dengan subjek kajian MJ selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendirian/Penggabungan Universitas Muhammadiyah Madiun dan Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun)

Untuk kepentingan pemenuhan syarat tersebut, langkah-langkah yang diambil oleh PDM Kota Madiun cukup signifikan dengan menyiapkan aset-aset yang ada di wilayah Kota Madiun, seperti yang disampaikan oleh Bidang Sarana dan Prasarana pendirian, seperti yang disampaikan oleh subjek kajian MN sebagai berikut:

“menurut regulasi, persyaratan untuk pendirian universitas harus memiliki lahan minimal 10.000 meter persegi...., kebetulan waktu itu STISIP memiliki lahan seluas 3.000 M² dan AKBID lahannya 6.500 M²., jadi baru terpenuhi 9.500 M², maka untuk memenuhi kekurangan lahan diputuskan untuk memasukkan lahan Islamic Centre Madiun seluas 2.500 M² dan lahan SMP MBS Prof. Hamka seluas 4.500 M²..., sehingga total keseluruhan lahan 4 lokasi tersebut sejumlah 16.500 M²..., dengan melebihi kebutuhan lahan yang hanya butuh 10.000 M²

(wawancara dengan subjek kajian MN selaku Bidang Sarana Prasarana dan Wakil Ketua II STISIP Muhammadiyah Madiun)

e. Tersedia sarana dan prasarana untuk Universitas yang didirikan:

1. Ruang kuliah paling sedikit 1m per mahasiswa
2. Ruang dosen tetap paling sedikit 4m per orang
3. Ruang administrasi/kantor paling sedikit 4m per orang
4. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 m termasuk ruang baca.
5. Ruang laboratorium, komputer, sarana praktikum sesuai kebutuhan tiap program studi
6. Koleksi Buku paling sedikit 200 judul per program studi

Lebih lanjut tentang kelengkapan sarana pendukung lainnya, seperti yang disampaikan oleh subjek kajian MN sebagai berikut:

“sarpras untuk persiapan pendirian UMMAD dari awal kita sudah siapkan semampu kita..., kalau dari STISIP sudah ada lab komputer, studio broadcast, studio radio, perpustakaan, masjid, ruang kuliah, ruang dosen maupun pimpinan sudah mencukupi..., dari AKBID sudah ada lab kebidanan, baby spa, lab komputer, perpustakaan, masjid, ruang kelas dan ruang praktek kebidanan...karena untuk menjadi universitas harus memiliki minimal 5 prodi maka kita harus menambah beberapa prodi baru untuk memenuhi itu, karena setelah kita hitung, gabungan AKBID dan STISIP hanya dihitung 2 prodi S1 dari STISIP saja..., karena prodi D3 Kebidanan dari AKBID tidak masuk hitungan sebagai persyaratan karena harus S1..., sehingga kita kekurangan 3 prodi untuk memenuhi persyaratan tersebut maka

diajukanlah pendirian 5 prodi baru untuk pemenuhan kekurangan tersebut...., konsekwensinya kita juga harus memenuhi kebutuhan sarpras untuk 5 prodi baru yang akan diajukan tersebut, mulai dari ruang kelas hingga laboratorium....., alhamdulillah kita dapat memenuhi kebutuhan sarpras tersebut...., walaupun yang lolos 4 pendirian prodi baru....”(wawancara dengan subjek kajian MN selaku Bidang Sarana Prasarana dan Wakil Ketua II STISIP Muhammadiyah Madiun)

Selain itu temuan data di lapangan yang masih terkait dengan sarana dan prasarana berdasarkan wawancara dengan subjek kajian MJ selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendirian/Penggabungan Universitas Muhammadiyah Madiun dan Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun adalah sebagai berikut;

Pada tanggal 31 mei 2019 “Tadi malam kita dan kawan-kawan ke kantor PDM gedung ICM jalan Sumatera ternyata tidak ada orang sama sekali. Lantas kalau dicermati tentang rencana pemaparan hutang 1,5 milyar ke RSI Siti Aisyah Kota Madiun oleh tim pelaksanateknis pendirian, yang akan memaparkan / presentasi hutang 1,5 milyar tersebut akan digunakan untuk apa, bagaimana teknis mengangsurnya dan lain sebagainya, adalah dalam pengertian bahwa Tim Pelaksana Pendirian adalah Tim teknis/Tim Pekerja dari Tim Pendirian Universitas. Maka secara substansi, pemaparan tersebut dilakukan “oleh siapa kepada siapa”. Kalau oleh BPH pendirian Unmuh kepada PDM, lha wong BPH Pendirian Unmuh itu bendaharanya adalah sebagai Ketua PDM. Lantas presentasi kepada PDM Kota Madiun, lha wong PDM Kota Madiun itu sebagai Tim Pendiri Unmuh dengan Ketua Pendirinya sebagai Ketua PDM Kota Madiun. Jadinya kan seperti jeruk minum jeruk ? Saya kira kita segera action saja, sepanjang rencana anggaran biaya

pemakaian untuk belanja bahan/ alat persiapan universitas sudah sesuai dengan perencanaan bersama dan mengenai harga sesuai standart biaya umum. Kita butuh gerak cepat tetapi tetap terukur. Sehingga momentnya kurang bagus kalau dipresentasikan, karena bagi anggota PDM yang jarang mengikuti perkembangan ini justru dikhawatirkan akan menjadi trouble dalam upaya memahami perencanaan, karena pemahaman terkait institusi akademik yang tidak semua orang paham, kita khawatir debat kusir saja. Lha wong pinjaman itu disetujui / cair sudah menjadi domainnya PDM selaku Tim Pendiri atas jaminan BPH Pendirian Unmuh Madiun selaku pengusul pendirian Unmuh dan pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa adalah PDM sendiri juga. Maka cukup dimusyawarahkan dan diinformasikan diinternal PDM saya kira sudah cukup. Saat ini kita semua butuh support mental untuk memacu gerak langkah yang berharga ini.” (Wawancara dengan (wawancara dengan subjek kajian MJ selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendirian/Penggabungan Universitas Muhammadiyah Madiun dan Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun)

- f. Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi

Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat jumlah program studi dalam rumpun ilmu untuk suatu bentuk perguruan tinggi swasta Hasil temuan di lapangan berdasarkan wawancara dengan informan oleh Bapak Mujahidin selaku Tim Ketua Tim Pelaksana Teknis Pendirian, berkenaan dengan persiapan program studi baru yang akan dibuka pada saat pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun, dalam pemilihan verifikasi Prodi Baru secara Internal tim melewati berbagai diskusi diskusi

untuk menentukan tujuan dan kesesuaian program studi dengan standar akademik. Seperti yang di sampaikan sebagai berikut;

“Tahapan awal Pendirian Prodi Baru, kisaran waktu awal tahun 2019 dilakukan Diskusi hanya dengan tim Pelaksana Teknis Secara Intens ya empat orang saja, waktunya ya mulai pagi sampai dengan tengah malam bahkan hingga pagi lagi dengan membahas terkait review borang pengajuan prodi baru dalam rangka memperjelas tujuan dan sasaran program studi; di mana tim pengembang program studi dapat membahas dan menyepakati tujuan dan sasaran program studi baru. Hal ini dapat memastikan bahwa program studi yang diusulkan akan menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dunia kerja dan masyarakat di era disruptif dan memastikan kesesuaian program studi dengan standar akademik; diskusi revisi penyusunan borang pengajuan program studi baru juga membantu memastikan bahwa program studi tersebut sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Hal ini meliputi kurikulum yang dirancang, metodologi pembelajaran, fasilitas yang dibutuhkan, pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Setelah melewati berbagai diskusi internal kami mengundang dan mempresentasikan kepada pihak persyarikatan yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madiun dan BPH Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun, dalam diskusi hal ini dapat membantu memilih dari sekian alternatif Program Studi yang sudah disiapkan pilihan-pilihan dengan berbagai alternatif karakteristiknya masing-masing oleh Tim Pelaksana Teknis Pendirian”. (wawancara dengan subjek kajian MJ selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendirian/Penggabungan Universitas Muhammadiyah Madiun dan Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun)

Berdasarkan hasil kajian tersebut bahwa dalam masa persiapan Pengajuan Program Studi baru ketua Tim Pelaksana Teknis membuat perencanaan dengan merumuskan Program Studi yang sesuai dengan kondisi dilapangan saat ini. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Inti saja yang berjumlah empat orang, Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan secara Intens mulai pagi sampai dengan tengah malam bahkan hingga pagi lagi untuk merumuskan alternatif pilihan-pilihan Program Studi, yang nantinya akan di presentasikan ke persyarikatan yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madiun dan BPH Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun.

Penjelasan yang lain terkait syarat untuk pemenuhan jumlah program studi dalam rumpun ilmu untuk suatu bentuk perguruan tinggi swasta berdasarkan wawancara dengan subjek kajian MJ selaku Tim Ketua Tim Pelaksana Teknis Pendirian, Berkenaan dengan persiapan program studi baru yang akan dibuka pada saat pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun seperti yang menyampaikan sebagai berikut;

“...dalam pemenuhan Pembukaan Program Studi Baru pada sebuah perguruan tinggi telah di dalam Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Baru Akademik pada Perguruan Tinggi Swasta. Persyaratannya ya mencakup kelengkapan Sumberdaya Manusia, Sarana Prasarana dan Kurikulum yang pas dan sesuai dengan disrupsi 4.0. secara garis besar pembukaan prodi melewati studi kelayakan dengan program studi yang ada di wilayah karesidenan Madiun ini, jangan sampai prodi yang akan didirikan nanti memiliki konsentrasi pembelajaran yang sama dengan program studi dengan perguruan tinggi lain dalam satu regional. Tentunya ya prodi bergengsi prodi yang langka dan diminati masyarakat. Verifikasinya melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengako-

modasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata kelola didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata kelola (input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata kelola yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi melalui peraturan dan prosedur yang berlaku dan disesuaikan dengan keadaan STISIP Muhammadiyah Madiun dan AKBID Muhammadiyah Madiun selaku Institusi yang digabungkan". (wawancara dengan subjek kajian MJ selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendirian/Penggabungan Universitas Muhammadiyah Madiun dan Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun)

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Mujahidin di atas bahwa dalam pembukaan program studi baru pada saat dengan melewati studi kelayakan guna menjaga eksistensi program studi yang akan di buka harus sesuai dengan kecukupan persyaratan kelengkapan Sumberdaya Manusia, Sarana Prasarana dan Kurikulum yang pas dan sesuai dengan disrupsi 4.0 disesuaikan dengan nilai keadaan STISIP Muhammadiyah Madiun dan AKBID Muhammadiyah Madiun selaku Institusi yang digabungkan.

"Selanjutnya, Tim pelaksana pendirian segera menyusun form instrumen pemenuhan standar minimum akreditasi untuk pengusulan pembukaan prodi baru tersebut sejak minggu keempat Februari sampai minggu kedua bulan April tahun 2019. Untuk melengkapi isian form tersebut, dirasa perlu untuk memanggil calon dosen yang telah diseleksi agar hadir ke Madiun un-

tuk mengisi form kesediaan menjadi Dosen. Yang perlu dicatat, para pelamar calon dosen berasal dari seluruh wilayah Indonesia (mulai dari Aceh sampai Papua)” (Wawancara dengan Bapak Mujahidin, S.Sos., S.Pd.I., M.Si M.KPd selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendirian/ Penggabungan Universitas Muhammadiyah Madiun dan Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun)

g. Kurikulum program studi baru

Penjelasan terkait syarat untuk pemenuhan jumlah program studi dalam rumpun ilmu untuk suatu bentuk perguruan tinggi swasta serupa disampaikan oleh bapak Mahfud Daroini selaku Sekretaris Tim pelaksana teknis pendirian, yang pada saat itu bertugas dalam pemenuhan calon dosen pada prodi baru, seperti yang disampaikan sebagai berikut;

Saat pemilihan program studi baru sebagai penambahan dari prodi-prodi yang sudah ada dilaksanakan dengan cermat, prodinya harus yang tidak jenuh di pasaran, di cari oleh para user dalam arti bahwa lulusannya dapat terserap di dunia kerja setelah lulus nanti. Dan prodi yang akan di buka nanti mudah dalam mencari tenaga pengajarnya, maksud saya Dosen tetap, Dosen tetap dalam borang adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen kontrak dengan masa kontrak sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi yang bekerja penuh waktu setara dengan minimal 40 (empat puluh) jam per minggu. Dosen dosen yang dimaksud yaitu Dosen tetap yang memiliki kualifikasi ijazah paling rendah Magister yang sebidang, Berusia paling tinggi 58 tahun dalam hal berstatus PNS, atau belum berusia 35 tahun dalam hal belum berstatus PNS,

pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan membuka program studi, Belum memiliki NIDN/NIDK atau telah memiliki NIDN/NIDK pada program studi lain yang rasio dosen dan mahasiswanya 1:30 untuk ilmu pengetahuan sosial, 1:20 untuk ilmu pengetahuan alam, Bukan guru yang telah memiliki NUP dan tenaga kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain. Informasi itu di share pada Media sosial dengan harapan bisa segera tercukupi. (Wawancara dengan Bapak Drs. Mahfudz Daroini, M.Si M.KPd., selaku Sekretaris Tim Pelaksana Teknis dan Wakil Ketua STISIP bidang akademik)

Masih dalam Penjelasan terkait syarat untuk pemenuhan jumlah program studi dalam rumpun ilmu untuk suatu bentuk perguruan tinggi swasta serupa disampaikan oleh subjek kajian MJ Selaku Ketua Tim Pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun. Dengan penjelasan sebagai berikut;

Dalam pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun, Selain Kualifikasi Dosen juga menjelaskan rencana Pengembangan Dosen Tetap yang ada pada prodi tersebut yang meliputi kesesuaian dan kerealistikan rencana pengembangan dosen tetap 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan empat aspek, yaitu visi keilmuan program studi, tata kelola, kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, dan kemampuan keuangan. Penjelasan tersebut disertai analisis yang mengaitkan dengan perencanaan mahasiswa dan lulusan, perencanaan keuangan, dan ketersediaan sarana dan prasarana, profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya berdasarkan studi keterlaksanaan lulusan dari program studi sejenis tingkat lokal, nasional, regional ASEAN, dan/atau internasional. selain itu juga kecukupan tenaga kependidikan Program

Studi..” (Wawancara dengan Bapak Mujahidin, S.Sos., S.Pd.I., M.Si M.KPd selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendirian/Penggabungan Universitas Muhammadiyah Madiun dan Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun)

Berdasarkan Penjelasan mengenai rencana Pengembangan Dosen Tetap bahwa direncanakan dosen yang ada pada program studi baru tersebut dengan kelinieritasan disiplin ilmu yang dimiliki dapat menterjemahkan visi program studi ke dalam program kerja dan program kegiatan tiap tahun berbasis kegiatan produktif sebagai Sumber daya adalah suatu yang dapat dikontrol oleh aktor atas kepentingan tertentu. Peneliti dalam hal ini akan melihat bagaimana Tim pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun dalam mengambil sebuah tindakan atas paparan perencanaan untuk pengembangan Program Studi Baru tersebut

Penjelasan terkait syarat untuk pemenuhan jumlah program studi dalam rumpun ilmu untuk suatu bentuk perguruan tinggi swasta surupa disampaikan oleh subjek kajian YP Selaku Tim pelaksana teknis bidang Akreditasi pendirian Program Studi, yang pada saat itu bertugas dalam pemenuhan calon dosen pada prodi baru, seperti yang menyampaikan sebagai berikut;

Dalam pemenuhan syarat pendirian program studi baru meliputi, Sumberdaya Manusia, Sarana Prasana dan Kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaian, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi level 5 (lima) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012 dan Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang SN-Dikti, yang terstruktur untuk tercapainya tujuan,

terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. selain itu metode dan bentuk pembelajaran per mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran dengan memperhatikan jumlah mahasiswa per kelas, ketercukupan sumber belajar, dan ketercukupan sarana pembelajaran. sistem penilaian pembelajaran dan tata cara pelaporan penilaian yang transparan dan akuntabel diindikasikan dengan adanya metode yang sistematis untuk mengukur capaian pembelajaran, standar penilaian yang dikomunikasikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan, dan tata cara pelaporan hasil evaluasi yang dapat diakses secara mudah oleh mahasiswa, serta sistem sekuritas otoritas akses". (Wawancara dengan subjek kajian YP selaku Bidang Pelaksana Akreditasi)

Berdasarkan penjelasan dari informan di atas bahwa mekanisme pelaksanaan kurikulum dalam pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: 1) metode dan bentuk pembelajaran per mata kuliah, 2) sistem penilaian pembelajaran, 3) ketersediaan dan kelengkapan prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika. Karakteristik pelaksanaan pembelajaran hendaknya memperhatikan sifat interaktif, holistik,

integratif, saintifik, kontekstual, tematik, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Holistik mencerminkan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Integratif menunjukkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. Kontekstual menjelaskan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Tematik berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam upaya meraih capaian pembelajaran. Berpusat pada mahasiswa menunjukkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

- h. Memiliki organisasi dan tata kerja perguruan tinggi dan Laporan keuangan Badan Penyelenggara/BPH dengan audit akuntan public Dalam rangka evaluasi atas kesehatan dan kesiapan penggabungan institusi perguruan tinggi serta penambahan program studi baru, harus diaudit oleh akuntan publik atau lembaga audit intern yang kredibel, seperti yang disampaikan oleh subjek kajian MN sebagai berikut;

Audit internal dari Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah dilakukan pada Institusi STISIP Muhammadiyah Madiun tahun 2019 dan pada AKBID Muhammadiyah Madiun tahun 2018. Hasil dari kedua institusi ini khususnya STISIP masih memenuhi aspek standar kesehatan keuangan, antara pemasukan dan pengeluaran masih berimbang.”. (Wawancara dengan subjek kajian MN)

Penjelasan lebih lanjut Wakil Ketua 2 bidang Keuangan dan SDM STISIP Muhammadiyah Madiun, sekaligus sebagai pelaksana bidang Sarpras Tim pelaksana teknis pendirian ini menyampaikan:

“Kalau berbicara tentang keuangan memang gak mudah..., karena waktu awal pendirian kondisi keuangan dari AKBID sangat minim, hanya ada uang cash sekitar dua juta rupiah..., dari STISIP masih cukup lumayan untuk operasional kampus..., maka untuk memenuhi besarnya kebutuhan anggaran untuk pendirian prodi-prodi baru yang mencapai nilai sebesar 3 miliar lebih per prodi maka pimpinan mengajukan permohonan dana ke PP Muhammadiyah di Yogyakarta..., dari PP waktu itu berikan anggaran untuk deposit di Bank sebesar 24 Milyar untuk memenuhi syarat kesehatan keuangan... Waktu itu kami juga harus menyiapkan anggaran operasional rutin untuk kampus, termasuk anggaran tambahan untuk membiayai transport, honor dan gaji para

calon-calon dosen yang datang dari berbagai daerah, termasuk dari sumatra dan sulawesi..., anggaran itu di-luar dari anggaran yang diberikan oleh PP Muhammadiyah....” (Wawancara dengan subjek kajian MN)

Masih paparan data di lapangan berkaitan dengan laporan keuangan, subjek kajian MN ditemui waktu yang berbeda menyampaikan sebagai berikut;

Selebihnya, Bapak M.Natsir,MPd menyatakan: “Sebenarnya bila melihat kondisi keuangan waktu itu, pendirian UMMAD itu merupakan hal yang mustahil..., tapi pak rektor sangat yakin pasti bisa mewujudkan cita-cita tersebut..., beliau selalu mensupport tim pendiri secara terus menerus siang maupun malam tanpa mengenal lelah..., wira-wiri surabaya, jakarta dalam seminggu bisa 2 sampai 3 kali pak rektor lakukan untuk memastikan kelancaran proses pendirian prodi baru dan penggabungan kampus STISIP dan AKBID..., beliau sudah tidak memikirkan berapa uang pribadi yang beliau keluarkan..., yang penting misi pendirian prodi baru dan penggabungan kampus sukses..., alhamdulillah..., akhirnya memang berhasil....”(Wawancara dengan subjek kajian MN)

Berdasarkan penjelasan subjek kajian di atas bahwa kondisi keuangan kedua Institusi dalam masa proses pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun.

- i. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari perguruan tinggi yang didirikan, ditanda tangani oleh semua anggota Badan penyelenggara/BPH

“BPH Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun dalam proses penerimaan keuangan dari Pimpinan Pu-

sat Muhammadiyah telah beberapa kali dan beberapa tahap kita terima dalam kurun waktu satu bulan khususnya pada saat proses pengajuan pendirian yang ditransfer langsung ke rekening BPH Pendirian. Sehingga kita semua telah menandatangani pada surat pernyataan kesanggupan menyediakan dana investasi dan dana operasional kampus untuk kurun waktu lima tahun kedepan.” (Wawancara dengan subjek kajian MJ selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendirian/Penggabungan Universitas Muhammadiyah Madiun dan Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun)

Berdasarkan penjelasan dari subjek kajian di atas bahwa pada saat proses pendirian Uni keuangan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah beberapa kali dan beberapa tahap kita terima dalam kurun waktu satu bulan khususnya pada saat proses pengajuan pendirian yang ditransfer langsung ke rekening BPH Pendirian.

j. Rancangan statuta, rancangan renstra, rancangan SPMI

Dalam penyusunan Statuta ini, tidak banyak yang bersedia terlibat secara aktif, terutama BPH dan PDM Kota Madiun. Akhirnya, dengan segala ketekadan dan kemauan yang kuat, Tim teknis Pendirian bekerja siang malam untuk dapat mewujudkan Statuta Universitas Muhammadiyah Madiun, rancangan renstra dan standart penjaminan mutu internal sebagai syarat penting secara administratif persyaratan pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun. Seperti yang disampaikan oleh subjek kajian MJ sebagai berikut;

Sepanjang bulan Mei sampai Juni, Tim Teknis pelaksanaan pendirian terus bekerja keras untuk mempersiapkan semua persyaratan, mulai dari persiapan fisik kampus, kelengkapan sarana prasarana serta administrasi pendirian, salahsatunya adalah Statuta Universitas

Muhammadiyah Madiun. Dalam penyusunan Statuta ini, tidak banyak yang mau terlibat secara aktif, terutama BPH dan PDM Kota Madiun. Akhirnya, dengan segala ketekadan dan kemauan yang kuat, Tim teknis Pendirian bekerja siang malam untuk dapat mewujudkan Statuta Universitas Muhammadiyah Madiun, rancangan renstra dan standart penjaminan mutu internal sebagai syarat penting secara administratif persyaratan pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun. (Wawancara subjek kajian MJ selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendirian/Penggabungan Universitas Muhammadiyah Madiun dan Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun)

Berdasarkan penjelasan subjek kajian di atas bahwa keterlibatan petugas dalam menyusun rancangan statuta, rancangan renstra, rancangan Sistem penjaminan mutu internal begitu terbatas.

Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta

Diawali Pengajuan permohonan rekomendasi kepada LL-DIKTI 7 dengan melampirkan dokumen:

- a. Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara/BPH Pendirian Universitas
- b. Surat keputusan pejabat berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum
- c. Surat keputusan izin pendirian STISIP dan AKBID
- d. Tingkat keberlanjutan perguruan tinggi swasta
- e. Kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk prodi vokasi
- f. Rekam jejak Badan Penyelenggara dan PTS

Evaluasi legalitas badan penyelenggara berupa pemeriksaan kesesuaian dokumen huruf a, huruf b dan huruf c dan Evaluasi

legalitas perguruan tinggi berupa pemeriksaan status akreditasi program studi dan status pembinaan perguruan tinggi

Rekomendasi LLDIKTI wilayah VU Jawa Timur jika semua persyaratan terpenuhi, usul perubahan PTS akan diproses dengan prosedur sebagai berikut:

1. Badan penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Dirjen kelembagaan iptek dikti melalui silemkerma.go.id dengan melampirkan surat permohonan akun
2. Ditjen Kelembagaan melakukan verifikasi dokumen usulan akun
3. Apabila permintaan akun disetujui, maka badan penyelenggara dapat melanjutkan proses mengunggah dokumen dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Usul akun
 - b. Verifikasi dokumen usul akun
 - c. Persetujuan
 - d. Badan penyelenggara yang mengusulkan penggabungan mengunggah dokumen yang terdiri dari:
 1. Surat permohonan izin penggabungan PTS kepada Menristekdikti
 2. Rekomendasi dari LLDIKTI 7
 3. Semua instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi prodi baru dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditanda tangani oleh badan penyelenggara.

“Akhirnya dengan segala jerih payah tak kenal lelah, setelah melalui beberapa kesulitan dan hambatan, pada tanggal 21 juli 2019 upload data data ke dirjen kelembagaan 30 Juli 2019 sampai pukul 23.45 WIB, seluruh proposal persyaratan penggabungan dan pendirian prosi-prodi baru berhasil di submit ke laman PD-Dikti

Kemenristek Dikti. (Wawancara dengan subjek kajian MJ selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendirian/Penggabungan Universitas Muhammadiyah Madiun dan Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun)

Dengan diunggahnya instrument akreditasi tentunya mulailah pembukaan prodi baru berproses secara sistem. penjelasan lebih lanjut disampaikan oleh subjek kajian berikut;

“pada tanggal 1 juli 2019 Akbid mengakui ketinggalan sangat jauh dalam hal proses mengurus penggabungan dan pendirian universitas. Tetapi agar tidak tertinggal jauh, ya dipaksa diundang saja”.

Berdasarkan penjelasan dari subjek kajian di atas bahwa dokumen prodi baru telah selesai diverifikasi dengan final, dan pada tanggal 30 Juli 2023 pukul 23.45 berhasil di submit melalui aplikasi silemkerma. Dan Dengan demikian Akbid mengakui ketinggalan sangat jauh dalam hal proses mengurus penggabungan dan pendirian universitas.

e. Ditjen Kelembagaan melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen dan kurikulum pendirian prodi baru. penjelasan lebih lanjut disampaikan oleh subjek kajian berikut;

“Pada tanggal 15 Agustus 2019, turun rekomendasi hasil penilaian terhadap pengajuan prodi baru dari kemenristek dikti yang menyatakan bahwa hanya prodi Sains Aktuaria yang lolos dan empat prodi lainnya masih memerlukan revisi. Dengan sesegera mungkin, Tim Pelaksana Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun, segera melakukan revisi sebagaimana yang dipersyaratkan. Akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2019, revisi proposal empat prodi (Adminkes, Sains Lingkungan, Bisnis Digital dan Bio Kewirausahaan) berhasil di submit ke

laman PD-Dikti kemenristekdikti” (Wawancara dengan subjek kajian MJ selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendidikan/Penggabungan Universitas Muhammadiyah Madiun dan Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun)

Dan tahapan dilanjut dengan menyiapkan kelengkapan visi-tasi. seperti yang disampaikan oleh subjek kajian berikut;

“Tahap kedua, visitasi menunggu kelengkapan sarana di masing-masing program studi. Maka harus segera kita musyawarahkan dan siapkan. Apalagi dengan sudah terlampauinya tahap paling berat pengadaan (kurikulum dan dosen). Untuk mengejar september ini ya segera konsolidasi internal berkaitan sarana pendukung tersebut”. ” (Wawancara dengan subjek kajian MJ selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendirian/Penggabungan Universitas Muhammadiyah Madiun dan Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun)

Setelah mendapat informasi di atas selanjutnya yaitu tahapan yang kedua yaitu menyiapkan sarana pendukung pada masing-masing program studi.

- f. Hasil evaluasi apabila disetujui, maka ditjen kelembagaan memberikan persetujuan proses lanjut atau badan penyelenggara melanjutkan proses ke tahap berikutnya
- g. Badan penyelenggara mengunggah dokumen pernyataan komitmen pemenuhan syarat minimum akreditasi perguruan tinggi
- h. Setelah persetujuan proses lanjut diumumkan, LLDIKTI 7 mengevaluasi instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan program studi khusus untuk kriteria non dosen
- i. Apabila hasil penilaian kriteria non dosen untuk setiap program studi telah memenuhi persyaratan minimum

akreditasi, jumlah dan jenis program studi telah memenuhi syarat minimum bentuk perguruan tinggi hasil penggabungan, maka akan dilakukan evaluasi lapangan yang dilakukan LLDIKTI wilayah VII Jawa Timur dan Ditjen Kelembagaan dan sekaligus mengevaluasi pemenuhan pernyataan komitmen syarat minimum akreditasi perguruan tinggi. Pada Tanggal 24 September 2019, turun surat pemberitahuan dari Kemenristekdikti tentang rencana Asesmen lapangan (Visitasi) yang akan dilakukan pada tanggal 27 dan 28 September 2019. Seperti penjelasan yang disampaikan oleh subjek kajian berikut;

“pada tanggal 24 september 2019 saya mendapat informasi Terkait usul penggabungan STISIP Muhammadiyah dengan AKBID Muhammadiyah Madiun, kami Ditjend Kelembagaan Kemenristekdikti akan melakukan visitasi yang Insya Alloh akan dilaksanakan pada hari Jum’at 27 September 2019 sesuai undangan terlampir”. (Wawancara dengan subjek kajian MJ selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendirian/Penggabungan Universitas Muhammadiyah Madiun dan Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun)

Masih dalam keberlanjutan proses evaluasi pendirian prodi baru dan pada tanggal 26 Agustus 2019 saya mendapat kabar bahwa 4 prodi yang lolos verifikasi penilaian telah dianggap memenuhi syarat. Seperti yang di sampaikan oleh subjek penelitian berikut

“pada tanggal 26 agustus 2019 akhirnya 4 prodi itu yang dianggap memenuhi persyaratan kurikulum dan kesesuaian tenaga dosennya, dan siang tadi langsung diupload dari kemenristekdikti ke web pengusul universitas muhammadiyah madiun”.

Informasi lebih lanjut terkait Asesmen lapangan (Visitasi) dengan itu juga para calon dosen diminta hadir ke Madiun. Seperti penjelasan yang disampaikan oleh subjek kajian berikut;

“Tanggal 27 dan 28 September 2019 dilakukan asesmen lapangan yang dilakukan oleh kemenristekdikti untuk mengecek kebenaran data ajuan penggabungan STISIP Muhammadiyah Madiun dan AKBID Muhammadiyah Madiun serta pendirian prodi-prodi baru (Adminkes, Sains Lingkungan, Sains Aktuaria dan Biokewirausahaan) bertempat di Calon Kampus 3 (Islamic Center Madiun). Dalam asesmen lapangan tersebut 90 persen calon dosen baru, dapat hadir ke Madiun. Sementara yang tidak dapat hadir adalah calon dosen yang berasal dari Aceh, Riau, Mataram, Pontianak dan Kendari”. (Wawancara dengan subjek kajian MJ selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendirian/Penggabungan Universitas Muhammadiyah Madiun dan Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun)

Dengan adanya informasi tersebut selain dengan calon dosen, subjek kajian menghubungi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk menyampaikan berita tersebut. Seperti penjelasan yang disampaikan oleh subjek kajian berikut;

“Masih pada hal yang sama, PWM Jatim memahami berbeda tentang surat pemberitahuan visitasi tersebut, bahwa tugas asesor di atas, bukan untuk visitasi tapi menjelaskan hasil visitasi yang lalu dari LLDIKTI 7. Jadi tidak perlu lagi menunjukkan rekening yang sekian milyard itu Pak Tomo. Dan saya jawab Setelah penambahan 4 program studi direkomendasi, kita masih akan divisitasi institusi yang pertama kali oleh 8 orang tim evaluator. Lihat diagenda kegiatan (rundown) hari Jum'at dan hari Sabtu. Evaluasi dan verifikasi dokumen aspek hu-

kum, aspek keuangan, aspek program studi, dan aspek umum (sarana prasarana). Wawancara dengan subjek kajian MJ selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendirian/Penggabungan Universitas Muhammadiyah Madiun dan Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun)

Penjelasan lain terkait info yang disampaikan oleh subjek kajian berkaitan dengan komunikasi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur adalah sebagai berikut

Tetapi dari PWM Jatim masih tetap membantah bahwa “Coba sampean baca ulang, untuk Madiun hanya nomor 1,2, dan 3. Hanya verifikasi. Hanya memberi penjelasan, bukan verifikasi.” Wawancara dengan subjek kajian MJ selaku Ketua Pelaksana Teknis Pendirian/Penggabungan Universitas Muhammadiyah Madiun dan Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun)

Dari penjelasan di atas bahwa hasil komunikasi dengan subjek kajian bahwa Pimpinan Muhammadiyah Wilayah membantah bahwa itu belum visi tasi tetapi hanya verifikasi.

j. Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan telah memenuhi persyaratan, LLDIKTI 7 menyampaikan hasil evaluasi kepada Ditjen kelembagaan

k. Ditjen Kelembagaan melakukan validasi

“Sesuai hasil asesmen lapangan, diketahui masih ada beberapa kekurangan berkas persyaratan, antara lain; (1) Surat Keterangan domisili bagi Calon Dosen yang tempat tinggalnya berjarak lebih dari 100 kilometer dari Madiun (2) Surat Keterangan alasan bagi calon dosen yang tidak dapat hadir pada saat visitasi, dan (3) rekam jejak administrasi keuangan STISIP dan AKBID yang belum diperiksa oleh Akuntan Publik”.

Dalam waktu maksimal 30 hari setelah asesmen lapangan, semua kekurangan persyaratan tersebut sudah dapat dipenuhi oleh Tim Pelaksana Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun dan dikirim ke Kemenristekdikti di Jakarta.

1. Apabila hasil validasi memenuhi persyaratan, Ditjen Kelembagaan mengajukan usul tertulis penerbitan ijin penggabungan perguruan tinggi swasta kepada Sekjen, dan Sekjen atas nama Mendikbud menerbitkan Surat Keputusan tentang penggabungan perguruan tinggi swasta. Seperti yang disampaikan oleh subjek kajian berikut;

“Seharusnya, pada bulan Oktober 2019 SK Universitas Muhammadiyah Madiun sudah bisa turun. Namun terhambat oleh momentum Pelantikan Presiden periode 2, pada tanggal 20 Oktober 2019. Konsekuensinya adalah adanya perubahan kabinet dan pejabat menteri di lingkungan kemenristekdikti. Lebih parah lagi, kemenristekdikti diubah menjadi kemendikbud. Kemenristekdikti yang dulunya ada 7 dirjen, dalam kementerian yang baru berubah menjadi 1 dirjen saja. Pada waktu kemenristekdikti, yang menangani usulan penggabungan STISIP dan AKBID Muhammadiyah Madiun dan Pendirian prodi baru adalah dirjen kelembagaan, maka setelah berganti menjadi kemendikbud, dirjen kelembagaan dibubarkan. Yang lebih menyedihkan adalah pejabat kemendikbud yang baru, belum dilantik. Akhirnya, setelah melalui beberapa regulasi baru tentang proses usulan pendirian/penggabungan dan pembukaan prodi baru di perguruan tinggi, serta berkat usaha yang gigih dari Ketua Tim Pelaksana Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun (Bapak Mujahidin) melalui berbagai pengorbanan material dan immaterial, maka lahirlah SK Universitas Muhammadiyah Madiun dari Kemendikbud pada tanggal 20-02-2020 dengan nomor

360/M/2020.(wawancara dengan subjek kajian dengan MZD Wakil Ketua Bidang Akademik dan Sekretaris tim pelaksana)

Berdasarkan penjelasan subjek kajian di atas bahwa bulan Oktober 2019 SK Universitas Muhammadiyah Madiun sudah bisa turun. Namun terhambat oleh momentum Pelantikan Presiden. Konsekuensinya adalah adanya perubahan kabinet dan pejabat menteri di lingkungan kemenristekdikti. Lebih parah lagi, kemenristekdikti diubah menjadi kemendikbud. Kemenristekdikti yang dulunya ada 7 dirjen, dalam kementerian yang baru berubah menjadi 1 dirjen saja. Pada waktu kemenristekdikti, yang menangani usulan penggabungan STISIP dan AKBID Muhammadiyah Madiun dan Pendirian prodi baru adalah dirjen kelembagaan, maka setelah berganti menjadi kemendikbud, dirjen kelembagaan dibubarkan. Yang lebih menyedihkan adalah pejabat kemendikbud yang baru, belum dilantik. Akhirnya, setelah melalui beberapa regulasi baru tentang proses usulan pendirian/penggabungan dan pembukaan prodi baru di perguruan tinggi, serta berkat usaha yang gigih dari Ketua Tim Pelaksana Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun (Bapak Mujahidin) melalui berbagai pengorbanan material dan immaterial, maka lahirlah SK Universitas Muhammadiyah Madiun dari Kemendikbud pada tanggal 20-02-2020 dengan nomor 360/M/2020.

B. Pembahasan

Data temuan lapangan yang merupakan hasil kajian menjadi pemaparan data sesuai rumusan dan tujuan penelitian, yaitu 1. Alasan Tim Pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun dalam Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun menurut perspektif Pilihan Rasional.; dan 2. Proses pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun menurut pada perspektif rasional pilihan diuraikankan lebih lanjut di bawah ini:

1. Preferensi apa yang mendasari Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun berdasarkan Teori Pilihan Rasional

Pemaparan pertama pada sub rumusan/data pertama hasil kajian ini memaparkan Alasan Tim Pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun dalam Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun menurut perspektif Pilihan Rasional. Masing-masing data temuan lapangan tersebut dijabarkan lebih lanjut pada pembahasan di bawah ini. Berdasarkan data temuan lapangan, terdapat dua hal penting yang terkait dengan Proses Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun menurut perspektif Pilihan Teori pilihan rasional Coleman ini tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Coleman menyatakan bahwa memerlukan konsep tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan juga sumber daya.

Dalam kajian ini aktor dan sumberdaya merupakan alasan Tim Pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun Mendirikan Universitas Muhammadiyah Madiun menurut perspektif Pilihan Rasional, pemaparan data temuan lapangan ini menjawab rumusan masalah sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan data temuan lapangan, terdapat dua hal penting yang terkait dengan Proses Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun menurut perspektif Pilihan Teori pilihan rasional Coleman ini tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Coleman menyatakan bahwa memerlukan konsep tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor

memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan juga sumber daya.

a. Menuju Perguruan Tinggi Sebagai Pusat Pelayanan Universal dan Pemberdayaan Masyarakat

Harapan dalam proses pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun untuk menuju Pelayanan Universal Sebagai Pusat Gerakan Pemberdayaan Masyarakat meliputi;

1) Mayoritas mahasiswa sebagai PNS

Pendirian UMMAD merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat, khususnya di Eks Karesidenan Madiun untuk memiliki pilihan atas ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menjawab kebutuhan di era disrupsi peradaban yang pergeseran dinamikanya sangat cepat dan berbasis adaptif terhadap setiap aspek perubahan sosial. Maka, keberadaan Universitas Muhammadiyah Madiun ini tentu telah melalui studi kelayakan di beberapa aspek yang urgen untuk level Perguruan Tinggi swasta yang berada tepat di Ibukota Karesidenan Madiun mengacu pada konsepsi pendidikan yang mampu menerjemahkan dan memberi solusi yang realistis, faktual, dan masih dalam koridor aturan akademis atas kebutuhan sekaligus situasi *users* atau pengguna (mahasiswa) yang pada saat masih bernama STISIP Muhammadiyah Madiun mayoritas adalah para pekerja birokrasi dan swasta lainnya yang harus membagi waktu antara jam kerja dengan menempuh kewajiban akademik di kampus.

Kondisi STISIP Muhammadiyah Madiun sudah sejak lama menjadi tujuan utama perkuliahan bagi masyarakat khususnya para PNS yang saat itu pengangkatan awal dari kategori ijazah SLTA / Golongan II, sehingga perlu peningkatan status pendidikan kejenjang pendidikan tinggi strata 1 sebagai jawaban peningkatan karier mereka. Dengan bermodalkan 2 program studi ilmu sosial,

prodi ilmu kesejahteraan sosial dan prodi ilmu komunikasi menjadi bagian dari program studi yang mendapatkan legalitas dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai program studi yang di-legalkan untuk penyesuaian ijazah ke jenjang golongan III dan secara otomatis para PNS akan mendapatkan ijin belajar dari atasan langsungnya di birokrasi.

Dari aspek praktis, para mahasiswa PNS/ASN tidak kalah piawai dari mahasiswa murni, tetapi dari aspek teori mereka masih perlu banyak pemahaman dan penyesuaian secara akademis, oleh karena itu STISIP Muhammadiyah Madiun terus berupaya mencari terobosan-terobosan serta strategi yang kreatif dan inovatif melalui sejumlah program pengembangan pembelajaran yang berorientasi andragogi, Menurut Sudarwan Danim (2010, 48 – 49), ada tiga isu terkait dengan penggunaan istilah pedagogi, yakni (1) pedagogi merupakan sebuah proses yang bertujuan, dalam makna umum istilah pedagogik digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan praktik mengajar anak-anak, (2) banyak pekerjaan “pedagogi sosial” yang telah digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip mengajar anak-anak dan kaum muda, dan (3) pengertian pedagogi telah dipahami dan dominan mewarnai proses pembelajaran dalam konteks sekolah. Secara tradisional istilah pedagogi adalah seni mengajar. Sementara dilihat dari pedagogi modern, dilihat dari hubungan dialektis yang bermanfaat antara pedagogi sebagai ilmu dan pedagogi sebagai seni.

Beberapa definisi yang terkait pengertian pedagogi sebagai ilmu dan seni menurut Sudarwan Danim (2010: 54-55) antara lain: 1) Pengajaran (teaching) yaitu teknik dan metode kerja guru dalam mentransformasikan konten pengetahuan, merangsang mengawasi dan memfasilitasi pengembangan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, pengertian ini menempatkan guru pada posisi sentral. 2) Belajar (learning) yaitu proses siswa mengembangkan kemandirian dan inisiatif dalam memperoleh dan mening-

katkan pengetahuan serta ketrampilan 3) Hubungan mengajar dengan belajar dengan segala factor lain yang ikut mendorong minat pedagogi. Hubungan ini bisa bermakna siswa dibimbing guru atau kegiatan belajar yang berpusat pada siswa, namun tetap dibawah bimbingan guru. 4) Hubungan mengajar dan belajar berkaitan dengan semua pengaturan dan pada segala tahapan usia, sebagaimana dikembangkan di lembaga pendidikan formal dan nonformal. Sekolah merupakan salah satu bagian dari total spektrum pengaruh pendidikan. Dengan demikian pedagogi yang efektif mencoba menggabungkan alternative strategi pembelajaran yang mendukung keterlibatan intelektual, memiliki keterhubungan dengan dunia yang lebih luas, lingkungan kelas yang kondusif dan pengakuan atas perbedaan penerapan pada semua pelajaran.

2) Program GIAT SIKADES sebagai solusi kuliah dan praktek

Dalam perkembangan jangka pendek yang dilakukan oleh pihak institusi STISIP Muhammadiyah Madiun, dicanangkan salah satu programnya adalah pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam bentuk Bakti Sosial Kampus (BSK) yang menjadi bagian dari program integrasi kajian dan pengabdian pada masyarakat berupa Berbagi Atensi, Sinergi Kampus dan Desa (GIAT SIKADES) yang nantinya berperan menjadi embrio dalam pelaksanaan pembelajaran *in class* dan *out class*. Program ini sudah tertuang dalam Renstra STISIP Muhammadiyah Madiun Tahun 2018 sd 2022 sejak capaian akreditasi dua Program Studi yang dimiliki STISIP Muhammadiyah Madiun mencapai level B.

Lokasi pengabdian masyarakat penting untuk dilakukan di desa binaan /desa inkubator dalam rangka mengembangkan potensi dari mahasiswa dan mencari alternatif pemecahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan program yang mengarahkan pada kemandirian, kesinambungan dan keberlanjutan bagi masyarakat desa sesuai dengan potensi lokalitas yang ada. Jika selama ini pemberdayaan selalu menganggap

masyarakat desa sebagai obyek program, alangkah baiknya jika masyarakat desa diposisikan sebagai agen/pelaku atau subyek dalam perubahan desa ke arah yang lebih mandiri dan maju

Selain itu Program Berbagi Atensi Sinergi Kampus dengan Desa/GIAT SIKADES menjadi Pemberdayaan dosen dan mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah, memiliki nilai strategis dalam meningkatkan pembangunan masyarakat di berbagai aspek kehidupan, melalui konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan Pengajaran, Kajian serta Pengabdian pada masyarakat. Pemberdayaan mahasiswa dalam mengenal lingkungan sekitar maupun lingkungan global pada era saat ini banyak dilakukan dengan menerapkan pengabdian masyarakat. Konsep pengabdian masyarakat yang dijalankan oleh setiap institusi pendidikan tinggi memiliki kekhasan masing-masing disesuaikan dengan kondisi, misi dan visi institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Pengabdian masyarakat berfungsi untuk mengasah *soft skill* dari setiap peserta didik, dimana *soft skill* yang terbentuk dengan baik maka akan mempengaruhi kemampuan adaptasi peserta didik pada saat beraktivitas di lingkungan masyarakat yang sebenarnya. Konsep kegiatan kampus yang terintegrasi diruanglingkup desa binaan ini akan semakin dinamis menjadi bagian pelengkap rutinitas dari pemerintah desa terkait dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukannya

Pelaksanaan kegiatan GIAT SIKADES yang dilakukan STISIP Muhammadiyah Madiun merupakan bentuk kerja sama institusional antara pihak Perguruan Tinkampus dengan birokrasi pemerintah khususnya Kabupaten Madiun dengan 198 desanya yang tersebar di 15 Kecamatan dalam rangka percepatan usaha-usaha pembangunan guna mencapai kesejahteraan sosial masyarakat. Dari kegiatan ini bermaksud sebagai cerminan dari harmonisasi komunikasi antara STISIP Muhammadiyah Madiun sebagai institusi pendidikan tinggi dengan Pemerintah Kabupaten Madiun

sebagai institusi pemerintahan dan merupakan semangat untuk mempercepat pembangunan yang dimulai dari masyarakat perdesaan.

Perguruan tinggi mempunyai keistimewaan dibanding institusi lain karena berada pada fungsi utamanya, yaitu berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran, kajian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat (tri dharma perguruan tinggi). Fungsi-fungsi tersebut yang lantas menggambarkan suatu peranan PT dalam masyarakat (Sukirman dan Sari, 2012). Ikhtiar penggabungan STISIP Muhammadiyah Madiun dengan AKBID Muhammadiyah Madiun menjadi UMMAD memperkuat program-program strategis berupa GIAT SIKADES yang merupakan program perkuliahan *out class* selama 1 (satu) semester di desa binaan (*incubator* desa) dan perkuliahan *in class* selama 1 (satu) semester di kampus.

3) Permintaan Pengguna Lulusan

Kinerja STISIP Muhammadiyah Madiun juga ditentukan oleh faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal antara lain kebijakan pemerintah, pemangku kepentingan (*stakeholders*), alumni. Sebagai institusi pendidikan Sekolah Tinggi tidak bisa lepas dari beberapa kebijakan pemerintah dimana dalam implementasinya disesuaikan dengan kondisi STISIP Muhammadiyah Madiun.

Keberadaan *stakeholders* eksternal sangat menentukan perkembangan STISIP Muhammadiyah Madiun, karena menyangkut input (mahasiswa baru) dan pasar kerja bagi alumni (*output*). *Stakeholders* STISIP Muhammadiyah Madiun yang menyangkut dengan input adalah masyarakat umum yang berasal dari masyarakat dengan kondisi Sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, suku bahkan agama yang beranekaragam. Persoalan utama yang dihadapi oleh STISIP Muhammadiyah Madiun di wilayah Karesidenan Madiun adalah kurangnya pemahaman dari para lulusan SMA/SMK/MA tentang Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial

dan Ilmu Komunikasi yang ada serta kurang variatifnya / ragam pilihan program studi di STISIP Muhammadiyah Madiun. Kurangnya pemahaman tersebut dan terbatasnya pilihan program studi, menjadikan rendahnya animo masyarakat khususnya milenial untuk mengenal lebih jauh tentang STISIP Muhammadiyah Madiun. Kondisi ini menjadikan tantangan bagi para pengelola STISIP Muhammadiyah Madiun untuk memberikan informasi yang jelas tentang prospek kerja setelah lulus dari STISIP Muhammadiyah Madiun.

Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, akan diikuti oleh perkembangan dan pergeseran budaya masyarakat dengan konsekuensi munculnya masalah sosial-masalah sosial yang semakin berkembang jumlah dan jenisnya. Dalam situasi inilah, prospek program studi Kesejahteraan Sosial yang ada di STISIP Muhammadiyah Madiun yang masuk katagori prodi langka (di Jawa Timur hanya ada di 4 perguruan tinggi) dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam menangani masalah – masalah sosial, memiliki peran yang luas dengan dukungan turunya regulasi UU No.14 Tahun 2019 tentang Profesi Pekerja Sosial yang keberadaannya sebagai jawaban / jalan keluar atas penyelesaian maraknya masalah – masalah sosial ditengah masyarakat dan sekaligus menjadi beban kewajiban pemerintah daerah untuk mencari solusi jalan pemecahannya. Dalam kapasitas ini, Pekerja Sosial profesional akan melakukan praktek pekerjaan sosial dengan tujuan mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial serta meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan. Langkah ini diimbangi dengan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu maupun masyarakat yang muaranya tumbuhnya kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan terbatasnya pilihan program studi yang berada di STISIP Muhammadiyah Madiun dan mengingat usia STISIP yang sudah 37 tahun, maka perlu dilakukan langkah – langkah taktis dan strategis untuk melakukan perubahan bentuk dari institusi Sekolah Tinggi ke Universitas, perubahan bentuk menjadi institusi Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD) perlu segera diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi yang menjawab dan membekali kebutuhan *soft skill/life skill* menghadapi tantangan zaman bagi lulusan jenjang pendidikan menengah atas di Karesidenan Madiun.

b. Rencana penyatuan AKBID Muhammadiyah dan STISIP Muhammadiyah Madiun ke Universitas Muhammadiyah Malang.

Pada bulan Nopember 2018 sebagai bulan yang bersejarah khususnya bagi STISIP Muhammadiyah Madiun karena dihadiri secara langsung oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Madiun yang dipimpin langsung oleh Ketua PDM yaitu H. Sutomo berkunjung sekaligus musyawarah dengan para Pimpinan untuk menyampaikan beberapa hal penting khususnya tentang wacana bergabungnya AKBID Muhammadiyah Madiun ke Universitas Muhammadiyah Malang dan penjajagan kemungkinan STISIP Muhammadiyah Madiun mengikuti langkah tersebut.

Kedekatan UMM dengan STISIP Muhammadiyah Madiun sudah terbina lama sejak dimulainya FIS Unmuh Malang jurusan Kesejahteraan Sosial di Kota Madiun pada tahun 1976 dan akhirnya pada tahun 1986 berdiri mandiri menjadi STISIP Muhammadiyah Madiun dengan 1 Program Studi Kesejahteraan Sosial yang secara hierarki terus menerus dibina oleh UMM sejak kepemimpinan Profesor Malik Fajar MSc. Pada fase tahun 1988 beliau pernah menahkodai rintisan pendirian Unmuh Madiun, tetapi keberuntungan masih belum berpihak ke Madiun.

Berlanjut pada proses kesepakatan antara pihak PDM Kota Madiun dengan AKBID Muhammadiyah Madiun dengan Direkturnya saat itu Bapak Edi Purwanto dari UMM dan STISIP Muhammadiyah Madiun berangkatlah kekampus UMM untuk dilakukan konsolidasi persiapan penyatuan dengan menginventarisasi dan menyatukan langkah2 sesuai dengan tahapan2 yang telah dibakukan oleh direktorat kelembagaan dirjend dikti.

Proses inventarisasi data dari kedua institusi perguruan tinggi ini sudah hampir 1 bulan berjalan, dan dipertengahan desember 2023 dilaporkan ke UMM untuk dijadikan bahan lampiran ajuan penyatuan oleh BPH terkait. Ketika sampai pada evaluasi 2 program studi yang berada di STISIP Muhammadiyah Madiun, ternyata kedua prodi tersebut yaitu Program studi ilmu kesejahteraan sosial terakreditasi B dan program studi ilmu komunikasi juga terakreditasi B. Sedangkan prodi D3 Kebidanan AKBID baru terakreditasi C. Sehingga untuk dua prodi dibawah STISIP Muhammadiyah Madiun menurut tim UMM tidak memungkinkan untuk disatukan karena dianggap masih sehat dan layak sebagai Sekolah Tinggi. Dari kesimpulan ini, proses tindaklanjut untuk sementara terhenti dan akhirnya pada minggu keempat bulan desember 2018 mendapatkan kepastian dari UMM agar collingdown dulu sambil menunggu situasi yang tepat.

2. Proses Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Dari STISIP Muhammadiyah Madiun, AKBID Muhammadiyah Madiun Menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun

Pembahasan kedua pada sub rumusan/data pertama hasil kajian ini memaparkan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Dari STISIP Muhammadiyah Madiun, AKBID Muhammadiyah Madiun Menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun. Masing-masing data temuan lapangan tersebut dijabarkan lebih lanjut pada pembahasan di bawah ini;

Penggabungan AKBID Muhammadiyah dan STISIP Muhammadiyah Madiun serta Penambahan Prodi Baru Menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun sebagai solusi. Untuk menindaklanjuti impian perubahan bentuk perguruan tinggi diinternal persyarikatan Muhammadiyah kota madiun dengan bermodalkan dua institusi perguruan tinggi dilakukan musyawarah – musyawarah antara STISIP Muhammadiyah Madiun dengan PDM Kota Madiun baik di sekretariat PDM maupun dikampus STISIP Muhammadiyah jalan Mayjend. Panjaitan 18 Kota Madiun, melalui mekanisme checks and balances dan bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan untuk mendukung pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi maka di awal tatap muka semester telah di bahas dan diinformasikan kepada seluruh mahasiswa terkait Rencana Proses kegiatan pembelajaran, selain itu topik dan lokasi Bakti sosial Kampus. Bakti Sosial Kampus merupakan *wahana implementasi* berbagai disiplin ilmu yang diaplikasikan secara normatif, melalui berbagai kegiatan, antara lain; identifikasi masalah-masalah sosial, observasi dan studi kelayakan, diskusi masalah-masalah sosial serta mencari solusi pemecahan masalah sosial. Seluruh kegiatan yang dijalankan merupakan refleksi dari *link and match* yaitu keterkaitan dan kesepadanan antara aplikasi ilmu pengetahuan yang diperoleh dari kampus.

Teori pilihan rasional Coleman ini tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Coleman menyatakan bahwa memerlukan konsep tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan juga sumber daya. Sumber daya ialah setiap potensi yang ada atau bahkan yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat beru-

pa sumber daya pendidikan, yaitu sumber daya yang telah disediakan atau potensi alam yang dimiliki oleh kedua belah pihak Institusi. Menurut Heryati&Muhsin (2014) dalam bukunya berjudul *Managemen Sumber Daya Pendidikan* bahwa dalam pelaksanaan pendidikan diperlukan konsep untuk mengatur, mengarahkan, dan mengkoordinasikan untuk mengelola sumber daya pendidikan yang tepat. Sumber daya pendidikan tersebut dikelompokkan dalam enam aspek, yaitu : men (manusia, siswa, guru, tenaga, dan unsur kependidikan lainnya), Methods (metode, kurikulum), Materials (sarana prasarana), Money (dana), Machines (teknologi pendidikan), dan market (pemasaran). Sedangkan aktor ialah seseorang yang melakukan sebuah tindakan. Dalam hal ini ialah individu yang mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik.

Pertama, Sumberdaya yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Kota Madiun yang memiliki 2 Program Studi jenjang Strata 1(S-1) yakni Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi BAN-PT dengan Nilai Akreditasi Baik dan Program Studi Ilmu Komunikasi yang terakreditasi BAN-PT dengan Nilai Akreditasi Baik pula, kedua Program Studi tersebut memiliki potensi meliputi men (manusia, siswa, guru, tenaga, dan unsur kependidikan lainnya) berupa Dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, staf karyawan bidang akademik&staf karyawan non akademik beserta petugas keamanan dan kebersihan.

Methods (metode, kurikulum) berupa seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Capaian Pembelajaran Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Program Studi Ilmu Komunikasi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. kurikulum Program Studi Ilmu Kesejahteraan

Sosial dan Program Studi Ilmu Komunikasi dikemas dalam program strategis berupa GIAT SIKADES sebagai program perkuliahan *out class* selama 1 (satu) setengah semester di desa binaan (*incubator* desa) dan perkuliahan *in class* selama 1 (satu) setengah semester di kampus. Program GIAT SIKADES berfungsi sebagai sarana mengkombinasikan antara teori dengan praktek bagi semua program studi, sekaligus sebagai lahan kajian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa bisa berjalan dan semakin mendapat atensi dari para *stakeholders* terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten Madiun. Gengsi peminat (calon mahasiswa) terhadap institusi tujuan juga punya nilai diri yang setara dengan kampus lainnya. Faktor pilihan program studi juga semakin bervariasi dan memenuhi selera pasar sebagai preferensi calon mahasiswa.

Sedangkan Sumberdaya Materials (sarana prasarana) meliputi lahan dan bangunan kampus yang berlokasi strategis tepi di jalur Provinsi di jalan Mayjend Panjaitan kota Madiun dengan luas lebih kurang 3.000 m² yang saat ini menjadi kampus utama atau kampus pusat Universitas Muhammadiyah Madiun dengan sarana dan prasarana pendukung meliputi Ruang Kelas, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Studio Podcast, Masjid, Bus Kampus sebagai sarana Transportasi Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan Kajian dan Pengabdian di Desa Binaan. Money (dana) meliputi segala asset uang Tunai dan Piutang kepada mahasiswa, Machines (teknologi pendidikan) yang meliputi alat pendukung Pembelajaran meliputi LCD Proyektor dan Studio Podcast, dan market (pemasaran) pemasaran STISIP Muhammadiyah Madiun merupakan kampus yang adaptif dengan para mahasiswa PNS/ASN di Karesidenan Madiun memiliki kedekatan jaringan relasi birokrasi, Media Cetak, LSM, Desa Binaan dalam hal ini sebagai kantong kantong calon mahasiswa baru tetapi dari aspek teori mereka masih perlu banyak pemahaman dan penyesuaian secara akademis, oleh karena itu STISIP Muhammadiyah Madiun terus

berupaya mencari terobosan-terobosan serta strategi yang kreatif dan inovatif melalui sejumlah program pengembangan pembelajaran yang berorientasi andragogi, dari sekian aspek kegiatan belajar mengajar yang dilakukan selama lima hari masuk kuliah mulai jam 16.00 wib sd 21.30 wib mulai hari Senin sd Jum,at hampir rata-rata mahasiswa dari PNS aktif melakukan perkuliahan kecuali secara insedentil ijin berbarengan tugas dinas luar kota. Itupun untuk ukuran staf, jarang dilakukan kegiatan dinas luar. Sehingga kesempatan belajar tatap muka dengan dosen masih cukup terpenuhi. Selain mahasiswa PNS/ASN di Karesidenan Madiun pangsa pasar STISIP Muhammadiyah Madiun berasal dari luar daerah dan luar Pulau.

Kedua, Sumberdaya yang dimiliki oleh AKBID Muhammadiyah Madiun yang memiliki satu Program Studi jenjang Diploma Tiga Kebidanan yang terakreditasi BAN-PT Program Studi dan Institusi dengan Nilai Akreditasi Cukup yang memiliki potensi meliputi men (manusia,siswa,guru, tenaga, dan unsur kependidikan lainnya) berupa Dosen Prodi D3 Kebidanan staf karyawan bidang akademik&staf karyawan non akademik beserta petugas keamanan dan kebersihan.

Methods (metode, kurikulum) berupa seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Capaian Pembelajaran Program Studi D3 Kebidanan.program unggulan tersebut adalah Kebidanan Komplementer. Dijelaskannya, Kebidanan Komplementer adalah terapi pelengkap kebidanan yang merupakan terapi non medis yang dipraktekkan pada proses kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas serta menyusui.

Sedangkan Sumberdaya Materials (sarana prasarana) meliputi lahan dan bangunan kampus yang berlokasi di di jalan Lumbang Hidup Ring Road Barat Kota Madiun dengan luas leb-

ih kurang 5.690 m2 yang saat ini menjadi kampus dua tempat domisili Fakultas Ilmu Formal Ilmu terapan atau kampus pusat Universitas Muhammadiyah Madiun dengan sarana dan prasarana pendukung meliputi Ruang Kelas, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Laboratorium Kebidanan, Ruang Pelayanan Komersial Baby Spa dan Masjid. Money (dana) meliputi segala asset uang Tunai dan Piutang kepada mahasiswa, Machines (teknologi pendidikan) yang meliputi alat pendukung Pembelajaran meliputi LCD Proyektor dan alat praktek kebidanan dan market (pemasaran) pemasaran AKBID Muhammadiyah Maadiun berbeda dengan pangsa pasar STISIP Muhammadiyah Madiun dimana mahasiswanya adalah sebagian besar mahasiswa murni yang sesuai dengan tahapan wajib belajar, mayoritas mahasiswa AKBID Muhammadiyah Madiun berasal dari Karesidenan Madiun.

Ketiga, Menurut Coleman dalam teori pilihan rasional, aktor dipandang mempunyai pilihan atau nilai. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor, di mana aktor dipandang mempunyai tujuan dan mempunyai maksud. Aktor yang memiliki tujuan, tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuannya. Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkat pilihan aktor (Upe, 2010). Dalam penjelasan aktor pada pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun ini adalah Tim Pendirian yang terdiri dari

Ketua BPH Pendirian Yaitu Bapak Eddy Sanyoto selaku Ketua BPH STISIP Muhammadiyah Madiun, Ketua Tim Teknis Pendirian yaitu Bapak Mujahidin, S.Sos., S.Pd.I., M.Si M.KPd selaku Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun, Sekretaris Bapak Suyono selaku anggota PDM Kota Madiun Koordinasi Bidang Pendidikan. Bendahara Bapak H. Sutomo, ST selaku Ketua PDM Kota Madiun. Sekretaris Tim Teknis Bapak Drs. Mahfudz Daroini, M.Si M.KPd,

Tim Teknis Sarana Prasarana Bapak Muhammad Natsir selaku Wakil Ketua II STISIP Muhammadiyah Madiun dan Tim Teknis Akreditasi Ibu Yeni Primahesti, M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi STISIP Muhammadiyah Madiun. Dalam Tim pendirian aktor yang dominan dan paling berperan dalam proses penyusunan dan proses pengajuan Dokumen kecukupan Institusi pendirian Universitas dan Penyusunan Dokumen kecukupan pembukaan Program Studi baru adalah Bapak Mujahidin, S.Sos., S.Pd.I., M.Si M.KPd selaku Ketua STISIP Muhammadiyah Madiun beliau mengarahkan dan memastikan alur Pendirian dan pembukaan Program studi baru sampai pada Dirjen Dikti.

Aktor dan sumber daya menjadi elemen yang penting dalam teori pilihan rasional oleh James Coleman. Coleman pun menyebutkan bahwa dua elemen dalam teori pilihan rasionalnya yaitu pelaku dan benda/sumber daya yang mana hubungan keduanya adalah kuasa dan kepentingan (Coleman, 2011:37-38). Pada dasarnya, teori pilihan rasional menganggap bahwa aktor akan menentukan tujuan berdasarkan preferensi-preferensinya. Terdapat beberapa asumsi dasar terkait dengan teori pilihan rasional. Beberapa asumsi dasar dari teori pilihan rasional (dalam Turner, 1998: 304) dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Individu beorientasi pada tujuan
2. Individu memiliki seperangkat preferensi secara hirarkis
3. Dalam menentukan pilihan, individu membuat pertimbangan yang rasional berdasar pada:
 - a. Perilaku yang mengacu pada hirarki preferensi
 - b. Resiko pada masing-masing preferensi
 - c. Cara yang terbaik untuk memaksimalkan pilihan Prinsip dasar teori pilihan rasional oleh Coleman secara mendalam dapat dijabarkan sebagai berikut:

" the main principle of rational choice theory is that people are" actors" who act to gain something for themselves. Often this involves interacting with other people who are seeking the same" resources" as other actors. This assumes that all people act in self-serving ways and look out their best interest first"

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip utama teori pilihan rasional adalah bahwa individu sebagai aktor yang bertindak untuk memperoleh sesuatu bagi diri mereka sendiri. Seringkali, hal ini melibatkan interaksi dengan orang lain dengan tujuan yang sama seperti aktor lain. Hal ini mengasumsikan bahwa semua orang bertindak dengan caranya sendiri dan tertuju pada kepentingan terbaik.

Aktor dalam hal ini dapat berbentuk korporat (kelompok) atau individu. Dari pandangan inilah kemudian dapat dikatakan bahwa Tim Pelaksana Pendirian Universitas merupakan aktor yang membuat keputusan demi tujuan dari negara. Seperti yang dikatakan oleh Brian Fay, bahwa salah satu tugas utama dari ilmu sosial interpretif adalah menemukan niat atau latar belakang aktor dalam melakukan suatu tindakan (Gibbons 2002; 91). Inilah yang secara historis disebut dengan *verstehen*. Maka, untuk dapat menemukan rasionalitas dari suatu tindakan yang dilakukan negara, dilakukan penafsiran terhadap keputusan tersebut, berdasarkan pada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan negara yang bersangkutan. Coleman juga menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu tindakan, individu melakukan hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan informasi yang didapat. Berkaitan dengan hal ini dijelaskan bahwa pertimbangan tersebut dilakukan demi mendapatkan keputusan yang terbaik.

Dengan demikian, teori pilihan rasional dapat diterapkan di level masyarakat, baik pada sektor budaya maupun politik. Selanjutnya, pendapat yang menekankan pada komponen kognitif

dalam melakukan pertimbangan demi membuat keputusan juga didukung oleh pendapat Philip Mellor (1999) yang menyatakan bahwa proses belajar (kognitif) itu tidak hanya didapatkan dari akumulasi mengumpulkan informasi semata tetapi juga sebuah fenomena yang dipengaruhi oleh hubungan dengan teman, keluarga, komunitas serta kekuatan-kekuatan lainnya.

Program Studi S1 Kesejahteraan Sosial dan S1 Ilmu Komunikasi masuk ke dalam Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP). Sedangkan, semua program studi rumpun ilmu STEM berada pada Fakultas Ilmu Formal Ilmu Terapan (FIFIT) yang terdiri dari 5 (lima) program studi, yaitu 4 (empat) program studi baru, yaitu Program Studi S1 Ilmu Aktuaria, Program Studi S1 Ilmu lingkungan, Program Studi S1 Bio Kewirausahaan, dan Program Studi S1 Administrasi Kesehatan, serta 1 (satu) program studi lama, yaitu Program Studi D3 Kebidanan.

Universitas Muhammadiyah Madiun pada tanggal 20 Februari 2020 berdiri melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 310/M/2020 tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun Menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur Yang Diselenggarakan Oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Berikut Proses Pendirian berdasarkan Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi tahun 2019.

Proses pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun merupakan penggabungan antara STISIP Muhammadiyah Madiun dengan AKBID Muhammadiyah Madiun sudah memiliki modal dua prodi dari rumpun ilmu sosial, yakni Program Studi S1 Kesejahteraan Sosial dan Program Studi S1 Ilmu Komunikasi. Sementara program studi dari rumpun ilmu alam, ilmu formal, dan/

atau ilmu terapan belum ada. Oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan menjadi universitas, diperlukan usulan pembukaan program studi baru yang berbasis rumpun ilmu alam, ilmu formal, dan/atau ilmu terapan. Akhirnya, melalui pengajuan 5 (lima) program studi baru yang berbasis rumpun ilmu alam, ilmu formal, dan/atau ilmu terapan dengan 4 (empat) program studi baru yang disetujui, yaitu Program Studi S1 Ilmu Aktuaria, Program Studi S1 Ilmu lingkungan, Program Studi S1 Bio Kewirausahaan, dan Program Studi S1 Administrasi Kesehatan yang berbasis multidisiplin ilmu serta berbasis STEM (*Science, Technology, Engineering, Mathematic*).

Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat jumlah program studi dalam rumpun ilmu untuk suatu bentuk perguruan tinggi swasta Hasil temuan di lapangan berdasarkan wawancara dengan informan oleh Bapak Mujahidin selaku Tim Ketua Tim Pelaksana Teknis Pendirian, Berkenaan dengan persiapan program studi baru yang akan dibuka pada saat pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun, dalam pemilihan verifikasi Prodi Baru secara Internal tim melewati berbagai diskusi diskusi untuk menentukan tujuan dan kesesuaian program studi dengan standar akademik. menjelaskan kombinasi-kombinasi tindakan antarindividu yang akhirnya menghasilkan perilaku sistem, pertautan itu berarti pertautan mikro ke makro. Namun, Coleman juga menjelaskan pertautan makro ke mikro, yaitu dengan men-erangkan bagaimana sistem-sistem yang telah terbentuk mem-batasi orientasi para aktor dengan memberikan otoritas kepada para aktor dalam menentukan tindakannya, sehingga cenderung menghasilkan subordinasi satu aktor terhadap aktor lainnya karena sumberdaya yang dimiliki mempengaruhi pilihan seseorang, semakin besar sumberdaya yang dimiliki, maka pilihannya pun semakin banyak atau semakin luas. Dari teori pilihan rasional ini, Coleman juga menciptakan fenomena makro yang paling men-

dasar, yaitu sistem independen. Dalam sistem tersebut, Coleman menjelaskan bahwa aktor bertindak bukan untuk mencapai tujuannya sendiri, melainkan tujuan bersama atau tujuan kolektif yang independen.

Pembukaan program studi baru pada saat dengan melewati studi kelayakan guna menjaga eksistensi program studi yang akan di buka harus sesuai dengan kecukupan persyaratan kelengkapan Sumberdaya Manusia, Sarana Prasarana dan Kurikulum yang pas dan sesuai dengan disrupsi 4.0 disesuaikan dengan nilai keadaan STISIP Muhammadiyah Madiun dan AKBID Muhammadiyah Madiun selaku Institusi yang digabungkan. Menurut Coleman (1990) *rational choice theory* menekankan pada tindakan perseorangan mengarah kepada suatu tujuan serta tindakan ditentukan oleh nilai atau pilihan (Ritzer, 2008:394). Coleman menjelaskan terdapat dua unsur utama dalam teorini yaitu aktor dan sumber daya. Aktor memilih tindakan dengan memaksimalkan kegunaan atau memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui sumber daya yang dikontrol oleh aktor. dalam hal ini bapak Mujahidin selaku KetuaTim Pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun beliau sebagai Aktor dengan Ranah makro, perilaku aktor dapat berubah kedalam sistem sebagai bentuk perilaku kolektif sebagai upaya dalam memaksimalkan kepentingan individu sehingga menyebabkan keseimbangan kontrol dimasyarakat. Perilaku rasional ketika upaya untuk memaksimalkan kegunaan sumber daya yang efektif dengan biaya murah.

Rasionalitas menurut Coleman adalah aktor atau individu mempunyai nilai atau pilihan yang ditentukan oleh pilihan rasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada pilihan rasionalitas ini, para actor disini akan mulai melakukan beberapa bentuk tindakan-tindakan yakni dalam rangka untuk lebih memaksimalkan manfaat yang ada, keuntungan serta pemuasan yang mereka inginkan yang sesuai pada kebutuhan mereka (George Ritzer, dkk,

2010:394). Rasional ternyata bukan hanya rasionalitas saja yang mengambil alih peran dalam pemikiran manusia. Rasional dalam hal ini ada beragam jenis rasionalitas yang dikonsepsi oleh beberapa filsuf. Habermas mengemukakan tiga jenis rasionalitas

1. Rasionalitas Kognitif adalah kemampuan intelektual yang mampu mengembangkan akal pikiran manusia dengan berpikir secara logis (rasional) dan adanya bukti fisik yang dapat digunakan untuk menguatkan klaim (contoh dalam pikiran kehidupan nyata, yang mendukung teori abstrak);
2. Rasionalitas Moral adalah pemikiran yang diklaim harus memiliki kebenaran (kebenaran normatif) di dunia sosial, Klaim harus sesuai antara batas normatif masyarakat tempat mereka dibuat. Ini adalah aspek validasi yang sulit, karena batas-batas ini seringkali membuat validasi tidak mungkin karena harus bisa membedakan aturan kesusilaan yang meliputi norma kelakuan, perbuatan, sopan santun yang dilandasi oleh akal manusia sesuai dengan logika tanpa diluar akal sehat manusia; dan
3. Rasionalitas Estetik yakni sebuah pemikiran yang mempercayai halhal yang mereka katakan. Jika mereka tidak tulus atau tidak menyakinkan ini akan diperhatikan oleh publik karena rasionalitas estetik ini lebih kepikiran bahasa tubuh yang harus menunjukkan kebenaran agar tidak menimbulkan kecurigakan oleh publik. Ketiga jenis rasionalitas tersebut, masing-masing rasionalitas ini dipahami yakni sebagai konsep yang sangat memiliki beberapa carapandang yang otonom didasari oleh prinsip yang berbeda dan metode-metode tersendiri. Setiap konsep tidak dapat direduksi ke dalam konsep lainnya, juga tidak dapat dinilai berdasarkan kriteria yang diambil dari jenis lain. Setiap jenis rasionalitas menentukan sendiri prinsip-prinsipnya serta memiliki pengertian dan kebenaran yang memadai.

Dalam hal ini pengambilan keputusan pemilihan program studi baru memperhatikan Nilai adalah suatu bentuk yakni bangun yang sangat penting dalam sebuah kebijakan pada setiap cabang ilmu sosial yang ada, seperti halnya dalam berbagai bidang ekonomi, filsafat, teologi, pendidikan dan penyuluhan. Kenyataan kurangnya ada konsensus yang untuk memperhatikan apa sebenarnya nilai dan daripada definisi sebuah kata sikap. Untuk sebagian yang ada, inilah mungkin sebabnya, mengapa definisi nilai yang akan digunakan itu dalam sebuah berbagai cara dan untuk melakukan berbagai teori, baik dari sebuah disiplin ilmu ke disiplin ilmu yang lain-lainnya. Alasan lain mengenai tentang apa itu bangun nilai yakni adalah lebih dibiarkan menderita sekarang-kurangnya dukungan pada konsensus, karena inilah bangun yang lebih abstrak daripada sebuah kata sikap, dan dengan demikianlah maka bisa dikonseptualisasikan lebih jelas, Tidak hanya itu saja, seperti halnya dari definisi nilai dengan kata sikap, pada hal nilai ini lebih melibatkan soal penilaian. Secara umum, pada hal ini telah disetujui oleh beberapa para ahli khususnya ahli teori pada sosial, yang bahwasannya mereka lebih beranggapan bahwa nilai itu di definisikan lebih abstrak, yang dimana bangun susunan lebih permanen dan tidak hanya itu saja lebih tahan super lama terhadap adanya perubahan, dan mempunyai banyaknya pengaruh yang secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku. Adanya sebuah kesepakatan umum yakni bahwa nilai ini bisa menyebabkan sikap. Lebih khususnya lagi, suatu sikap ini bisa ke arah suatu obyek adalah fungsi yang sedemikian rupa yang dimana bahwa obyek itu bisa diartikan untuk memberi sebuah kemudahan pencapaian dalam nilai-nilai penting. Kelembagaan hadir karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan dan perilaku dengan melihat aturan-aturan tersebut. Kelembagaan untuk mengatur perilaku manusia sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutu-

han harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Manusia akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dirinya dengan menggunakan atau berkelit dari aturan-aturan yang telah di bentuk melalui kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi (keuntungan) bagi kehidupan masyarakat. Perspektif kelembagaan sebagai aturan (Regulative Institution) yang ada dan keuntungan yang diperoleh dari keberadaan kelembagaan tersebut, di pengaruhi oleh perspektif rational choice theory (pilihan rasional) dari James S Colemans.

Analisa peranan aktor dengan menggunakan pendekatan teori pilihan rasional, Coleman melihat individu sebagai pemilik kuasa penuh dan hak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat tidak lain disebabkan oleh tindakan individu. Lebih jauh, Coleman menjelaskan tentang perubahan sosial, baginya perubahan sosial yang utama adalah kemunculan para aktor korporat untuk menyempurnakan oknum alamiah para aktor. Keduanya dapat dikatakan sebagai aktor yang mengendalikan berbagai sumberdaya dan peristiwa-peristiwa; mereka adalah orang-orang yang memiliki keahlian dalam mengambil tindakan untuk mewujudkan kepentingan kolektif melalui pengendalian-pengendalian itu. Oleh karena itu, dalam masyarakat modern, aktor dianggap memiliki kedudukan yang semakin penting.

Coleman berpendapat bahwa sosiologi harus berfokus pada sistem-sistem sosial, tetapi realitas sistem sebagai fenomena makro, sebaiknya juga harus dijelaskan dengan faktor-faktor internal individu secara prototipikal. Baginya, level mikro lebih tepat menjelaskan level makro karena data-data dan fakta dikumpulkan pada level mikro oleh para individu, dan kemudian menjadi sebuah sistem. Selain itu, menurut Coleman intervensi-intervensi se-

hari-hari yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dihasilkan pada level mikro. Fokus dari perspektif Coleman adalah, teori sosial seharusnya bukan hanya suatu latihan akademis, tetapi juga harus mempengaruhi dunia sosial melalui intervensi-intervensi yang dihasilkan oleh individu. Orientasi ide dasar pilihan rasional Coleman itu menjelaskan bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan suatu tujuan sehingga dengan adanya tujuan tersebut terbentuklah pilihan-pilihan dalam bertindak. Dua unsur yang membentuk teori pilihan rasional adalah aktor dan sumberdaya. Sumberdaya adalah hal-hal yang dikendalikan aktor. Adanya sumberdaya yang dikendalikan oleh aktor inilah yang menyebabkan terjadinya sistem. Coleman menjelaskan terbentuknya suatu sistem sebagai berikut; dalam tindakan sosial paling tidak melibatkan dua orang. Di antara keduanya memiliki sumberdaya-sumberdaya yang diinginkan atau dibutuhkan oleh yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan mereka masing-masing. Oleh karena adanya sumberdaya yang diinginkan dari aktor lainnya itulah, maka terjadi suatu kerjasama, saling ketergantungan, dan membentuk tindakan-tindakan yang sistematis.

Perencanaan Pengembangan Dosen Tetap bahwa direncanakan dosen yang ada pada program studi baru tersebut dengan kelinieritasan disiplin ilmu yang dimiliki dapat menterjemahkan visi program studi ke dalam program kerja dan program kegiatan tiap tahun berbasis kegiatan produktif sebagai Sumber daya adalah suatu yang dapat dikontrol oleh aktor atas kepentingan tertentu. Peneliti dalam hal ini akan melihat bagaimana Tim pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun dalam mengambil sebuah tindakan atas paparan perencanaan untuk pengembangan Program Studi Baru tersebut, tentunya tindakan aktor penumpang akan mempertimbangkan nilai dan pilihan-pilihan yang bisa aktor ambil untuk memaksimalkan ke-

butuhan, manfaat dan keinginan aktor. Pertimbangan nilai dari pilihan-pilihan dan tindakan yang diambil oleh aktor inilah yang nantinya akan peneliti telusuri. Coleman menjelaskan bahwa dalam sistem sosial terdapat basis minimal untuk sistem sosial yaitu dua orang aktor untuk mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian bagi individu lain. Aktor selalu memiliki tujuan, dimana masing-masing memiliki tujuan untuk memaksimalkan kepentingannya dengan berciri khas saling tergantung pada tindakan aktor tersebut.

Dalam teori pilihan rasional terdapat dua pemaksa tindakan yaitu keterbatasan sumber daya dan lembaga sosial. Setiap aktor memiliki tingkat akses yang berbeda pada sumber daya. Aktor yang memiliki akses sumber daya yang besar atau banyak dapat dengan mudah digunakan untuk menggapai tujuannya. Aktor yang minim akan akses sumber daya maka akan lebih sulit untuk meraih tujuannya. Pada konteks mengejar tujuan, aktor akan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan suatu tindakan selanjutnya. Hal ini terjadi karena aktor sadar akan keberadaan sumber daya yang terbatas sehingga mengakibatkan aktor tidak mengejar tujuan tersebut karena dapat mengancam peluangnya untuk meraih tujuannya yang lain.

Karakteristik pelaksanaan pembelajaran hendaknya memperhatikan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Holistik mencerminkan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Integratif menunjukkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan

dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Sainifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. Kontekstual menjelaskan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Tematik berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam upaya meraih capaian pembelajaran. Berpusat pada mahasiswa menunjukkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

BAB V

PENUTUP

Pada bab penutup ini memuat kesimpulan dari keseluruhan isi disertasi yang telah dikemukakan sebelum ini, beserta saran-saran dalam Memahami pilihan rasional dalam tindakan sosial aktor Tim Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun:

A. Kesimpulan

1. Preferensi apa yang mendasari Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun dalam Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun berdasarkan Teori Pilihan Rasional.

Harapan dalam proses pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun untuk menuju Pelayanan Universal Sebagai Pusat Gerakan Pemberdayaan Masyarakat. keberadaan Universitas Muhammadiyah Madiun ini tentu telah melalui studi kelayakan di beberapa aspek yang urgen untuk level Perguruan Tinggi swasta yang berada tepat di Ibukota kotaMadiun mengacu pada konsepsi pendidikan yang mampu menerjemahkan dan memberi solusi yang realistis, faktual, dan masih dalam koridor aturan akademis

atas kebutuhan sekaligus situasi *users* atau pengguna (mahasiswa) yang pada saat masih bernama STISIP Muhammadiyah Madiun mayoritas adalah para pekerja birokrasi dan swasta lainnya yang harus membagi waktu antara jam kerja dengan menempuh kewajiban akademik di kampus. Dari aspek praktis, para mahasiswa PNS/ASN tidak kalah piawai dari mahasiswa murni, tetapi dari aspek teori mereka masih perlu banyak pemahaman dan penyesuaian secara akademis, oleh karena itu STISIP Muhammadiyah Madiun terus berupaya mencari terobosan-terobosan serta strategi yang kreatif dan inovatif melalui sejumlah program pengembangan pembelajaran yang berorientasi andragogi.

Program integrasi kajian dan pengabdian pada masyarakat berupa Berbagi Atensi, Sinergi Kampus dan Desa (GIAT SIKADES) yang nantinya berperan menjadi embrio dalam pelaksanaan pembelajaran *in class* dan *out class* Program Berbagi Atensi Sinergi Kampus dengan Desa/GIAT SIKADES menjadi “Pemberdayaan dosen dan mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah, memiliki nilai strategis dalam meningkatkan pembangunan masyarakat di berbagai aspek kehidupan, melalui konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan Pengajaran, Kajian serta Pengabdian pada masyarakat”. Pemberdayaan mahasiswa dalam mengenal lingkungan sekitar maupun lingkungan global pada era saat ini banyak dilakukan dengan menerapkan pengabdian masyarakat. Konsep pengabdian masyarakat yang dijalankan oleh setiap institusi pendidikan tinggi memiliki kekhasan masing-masing disesuaikan dengan kondisi, misi dan visi institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Pengabdian masyarakat berfungsi untuk mengasah *soft skill* dari setiap peserta didik.

Rencana penyatuan AKBID Muhammadiyah dan STISIP Muhammadiyah Madiun ke Universitas Muhammadiyah Malang, secara langsung oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Madiun yang dipimpin langsung oleh Ketua PDM yaitu H.

Sutomo berkunjung sekaligus musyawarah dengan para Pimpinan untuk menyampaikan beberapa hal penting khususnya tentang wacana bergabungnya AKBID Muhammadiyah Madiun ke Universitas Muhammadiyah Malang dan peninjauan kemungkinan STISIP Muhammadiyah Madiun mengikuti langkah tersebut.

2. Proses Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun Berdasarkan Teori Perspektif Rasional Pilihan

Penggabungan AKBID Muhammadiyah dan STISIP Muhammadiyah Madiun serta Penambahan Prodi Baru Menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun sebagai solusi. Untuk menindaklanjuti impian perubahan bentuk perguruan tinggi diinternal persyarikatan Muhammadiyah kota madiun dengan bermodalkan dua institusi perguruan tinggi dilakukan musyawarah – musyawarah antara STISIP Muhammadiyah Madiun dengan PDM Kota Madiun baik di sekretariat PDM maupun dikampus STISIP Muhammadiyah jalan Mayjend. Panjaitan 18 Kota Madiun. “Penggabungan ini merupakan bentuk penggabungan sumberdaya yang ada pada kedua Institusi tersebut yang dikelompokkan dalam enam aspek, yaitu : men (manusia, siswa, guru, tenaga, dan unsur kependidikan lainnya), Methods (metode, kurikulum), Materials (sarana prasarana), Money (dana), Machines (teknologi pendidikan), dan market (pemasaran). Sedangkan aktor ialah seseorang yang melakukan sebuah tindakan. Dalam hal ini ialah individu yang mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik.

Pembukaan program studi baru pada saat dengan melewati studi kelayakan guna menjaga eksistensi program studi yang akan di buka harus sesuai dengan kecukupan persyaratan kelengkapan Sumberdaya Manusia, Sarana Prasarana dan Kurikulum yang pas dan sesuai dengan disrupsi 4.0 disesuaikan dengan nilai keadaan STISIP Muhammadiyah Madiun dan AKBID Muhammadiyah Madiun selaku Institusi yang digabungkan.

Analisa peranan aktor dengan menggunakan pendekatan teori pilihan rasional, Coleman melihat individu sebagai pemilik kuasa penuh dan hak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat tidak lain disebabkan oleh tindakan individu. Lebih jauh, Coleman menjelaskan tentang perubahan sosial, baginya perubahan sosial yang utama adalah kemunculan para aktor korporat untuk menyempurnakan oknum alamiah para aktor. Keduanya dapat dikatakan sebagai aktor yang mengendalikan berbagai sumberdaya dan peristiwa-peristiwa; mereka adalah orang-orang yang memiliki keahlian dalam mengambil tindakan untuk mewujudkan kepentingan kolektif melalui pengendalian-pengendalian itu. Oleh karena itu, dalam masyarakat modern, aktor dianggap memiliki kedudukan yang semakin penting.

Karakteristik pelaksanaan pembelajaran hendaknya memperhatikan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Holistik mencerminkan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Integratif menunjukkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

B. Prposisi

1. Jika penggabungan dua Institusi Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu antara STISIP Muhammadiyah Madiun dan AKBID Muhammadiyah Madiun serta penambahan 4 prodi

baru menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun merupakan sebuah tujuan maka proses penggabungan dan penambahan Prodi adalah pilihan tindakan yang rasional.

2. Keberhasilan sebuah tujuan tidak harus tergantung kepada kelengkapan sumberdaya yang ada di internal organisasi akan tetapi pola perilaku altruisme, kesukarelaan, berani mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan materi dari Tim Pelaksana Teknis Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun merupakan sumberdaya pamungkas dalam sebuah proses sekaligus berfungsi sebagai indikator ketercapaian tujuan.

C. Implikasi Teori

Kekurangan sumberdaya bukan menjadi kendala atau tidak menghambat proses/cara (*means*) untuk mencapai tujuan (*ends*) tetapi kekuatan tekad berupa sikap kesurelaan/pengorbanan (*volunteer*) berupa waktu, tenaga, pikiran, materidari Tim pelaksana Teknis pendirian serta jalinan Relasi struktur hierarki birokrasi secara otomatis menjadi bagian dari pencapaian tujuan itu sendiri itu adalah pilihan tindakan rasional dan menjadi bagian dari pencapaian tujuan (*ends*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Nabila Gunawan Putih. (2017). *Kecenderungan Global Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Sekolah*;Serang, Banten
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Kajian Kualitatif*. Sukabumi:Jejak Publisher.
- Arjawa, Suka Jurnal Global dan Strategis. Th.8 Januari-Juni 2014. *Pilihan Rasional di Balik Pembebasan*
- Azzahra, Siti, Fatimah, *Manajemen Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Fakultas tarbiyah Institut Agama Islam MUHAMMADIYAH (IAIM) Bima, NTB, Tesis, UIN SUKA, Yogyakarta, 2017*
- Bashofi & Saffanah (2019) Pilihan Rasional Mahasiswa Difabel dalam Memilih Jurusan Keguruan; Pusat Studi Sosiologi dan Pengembangan Masyarakat, Department of Sociology, Faculty of Social and Cultural Sciences, Universitas Trunojoyo Madura*
- Betty, Ridwan dan Sudirman *Pengaruh Efektivitas Satuan Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencapaian*

ian Good University Governance Pada Universitas Tadulako Palu, Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 12, Desember 2016

- Bramastia, Djati Kusumo W. 2007. *Segitiga Peran Strategis Pendidikan*. 25 April 2009. <http://www.suaramerdeka.com/harian/0708/27/opio3.htm>
- Browning, G. A. Halcli, dan F. Webster (ed). *Understanding Contemporary Society: Theories of The Present*. London: SAGE Publications, 2000.
- Castro, R. (2019). Blended Learning in Hingher Education: Trends and Capabilities. *Education and Information Technologies*, 24: 2523-2546.
- Coleman, J. S. (1988) *Social Capital in the Creation of Human Capital*. *The American Journal of Sociology*, 94, S95-S120.
- Coleman, J. (1990). *Foundations of Social Theory*. Cambridge : Belknap Press Of Harvard University Press.
- Coleman, James S.1998(original 1990). *Foundation of Social Theory*. Belknap Press.
- Diesing, P. (1962). *Reason and Society*, Urbana, IL: University of Illinois Press
- Doyle, J. (1994). *Reasoned Assumptions and Rational Psychology*. *Fundamenta Informaticae*, 20(1-3), 35-73.
- Desi, Nurhikmayanti. *Implementasi Tata Kelola Layanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Perguruan tinggi*. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, Volume 2. No. 1. Hlm. 24-32, 2017.
- Dwiyanto, Agus, *Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: dari Government ke Governance*. Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIPOL UGM, 2004.
- Dharma, K. K. (2017). *Metodologi Kajian Keperawatan (Pedoman Melaksanakan dan Menerapkan Hasil Penelitian)*. Jakarta: CV. Trans Info Media.

- Esha, Muhammad In'am. "Pemikiran Mewujudkan Good University Governance di Perguruan Tinggi Islam." *Jurnal el-Hikmah Fakultas tarbiyah UIN Maliki Malang*.
- Evaliandia, N., & Sulistyowati, E. (2020). *Pengaruh Implementasi Prinsip – Prinsip Good University Governance Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(10). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3665>
- Hardi Mulyono aArief Hadian (2019) *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences Available online at <https://sloap.org/journals/index.php/irjmis/> Vol. 6 No. 5, September 2019, pages: 40~52 ISSN: 2395-7492*<https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n5.692> 40Factors Affecting on Rational Choice of Students in Muslim Nusantara Al-Washliyah University
- Hidayat, Achmad, R. "Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmiah STIAM*, 2008. Hlm. 57-26.
- Hu, G., & Lei, J. (2014). *English-Medium Instruction in Chinese Higher Education: A Case Study*. *Higher Education*, 67: 551-567.
- Indrajit, Richardus Eko (2004), "Arsitektur Sekolah Modern Indonesia", Presentasi Sajjian. Miarso, Yusufhadi (2004), "Menyemai Benih Teknologi Pendidikan", (Jakarta: Prenada Media)
- Larasati, Rudiawie et al. 2018. *Analisis Penerapan Good University Governance Pada Perguruan Tinggi Di Kota Jayapura*. *Journal of Applied Managerial Accounting* 2(2):304-23. doi: 10.30871/jama.v2i2.951. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAMA/article/view/951/590>
- Miles, M. & Huberman, A. (1984). *Qualitative Data Analysis*. Newbury Park: Sage.
- Mutiarin, Dyah. Suswanta dan Darumurti, A. *Good University Governance dan Internasionalisasi Program Studi: Studi Kasus*

pada 2 Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi MUHAMMADIYAH . Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol. 5 No. 2, 2019. Hlm, 178-188

Muljo, Harjono, H. Wicaksono, A dan Riantono, Edward, I. "Optimalisasi Penerapan Prinsip Good Governance Bidang Akademik dalam Upaya Mewujudkan Good University Governance," *Jurnal Binus Business Review*, Vol. 5 No. 1 Mei 2014. Hlm. 91-100.

Payamta. & Setiawan, Doddy. (2004). *Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia*. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol.7(3): 265-282.

Pratolo, Suryo. Bambang, Jatmiko dan Manuhara, Wahyu. *Good University Governance dan Kinerja-PT: Model Pemetaan dan Perancangan Kinerja-PT Melalui Kualitas dan Kompetensi Lulusan, Pelayanan Serta Daya Saing Menuju Kualitas Lulusan dan World Class University*. Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 12 No. 1 Tahun 2015.

Resnik, Michael D.(1987). *An Introduction to Decision Theory*; University of Minnesota Press.

Coleman, James S. *Dasar-Dasar Teori Sosial*, terj. Imam Muttaqien dkk. Bandung: Nusa Media, 2011.

Ritzer, George & Barry Smart. 2011. *Handbook Teori Sosial*. Jakarta : Penerbit Nusa Media.

Ritzer, George. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prenada Media.

Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sedarmayanti, *Good Government (Pemerintahan yang baik)*; Bandung: CV. Mandar Maju, 2004.

Stevenson, Michael. *University Governance and Autonomy Problems in Managing Access, Quality and Accountability*. Keynote Address to ADB Conference on University Governance. Denpasar, Indonesia, April 26, 2004

- Wahab Abdul Azis, *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good University Governance Terhadap Citra Serta Implikasinya Pada Keunggulan Berasing Perguruan Tinggi Negeri Pasca Perubahan Status Menjadi BHMN : Survey Pada Tiga PTN Berstatus BHMN di Jawa Barat*, Jurnal Administrasi Pendidikan, Volume XVII No. 1 Oktober 2013
- Wahyudin, A. Nurkhin, A dan Kiswanto *Hubungan Good University Governance Dengan Kinerja Manajemen Keuangan Perguruan Tinggi*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, 21 (1) : 60- 69, 2017, Nationally Accredited : No. 040/P/2014
- Widjajanti, Kesi, "Good University Governance Untuk Meningkatkan Exellent service dan Kepercayaan Mahasiswa : Studi Kasus Fakultas Ekonomi Universitas Semarang," *Jurnal Dinamika Sosbud*, Volume 17 Nomor 2, Juni 2015 ; 68-81
- Widjajanti, Kesi. Kusumaningtyas, E dan Sugiyanto. *Gaya Kepemimpinan dan Good Governance Sebagai Upaya Peningkatan Excellent Service dan Kepercayaan.*

PILIHAN RASIONAL Pendirian

Universitas Muhammadiyah Madiun



Dr. Yeni Prima Hesti. Pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD) merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat, khususnya di Karesidenan Madiun untuk memiliki pilihan atas ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menjawab kebutuhan di era disrupsi peradaban yang pergeseran dinamikanya sangat cepat dan berbasis adaptif terhadap setiap aspek perubahan sosial. Keberadaan Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD) ini tentu telah melalui studi kelayakan di beberapa aspek yang urgen untuk level Perguruan Tinggi yang berada tepat di Ibukota Karesidenan Madiun dan merupakan perwujudan dari interaksi sosial antara BPH Pendirian Universitas dan Tim Pelaksana Teknis Pendirian Universitas muhammadiyah Madiun. Hal ini sesuai dengan teori tindakan sosial menurut Max Weber, bahwa perilaku manusia yang bermakna tertentu dengan mempertimbangkan keberadaan individu lain dalam lingkungan sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang konsepsi pendidikan yang mampu menerjemahkan dan memberi solusi yang realistis, faktual, dan masih dalam koridor aturan akademis atas kebutuhan sekaligus situasi users atau pengguna (mahasiswa) yang pada saat masih bernama STISIP Muhammadiyah Madiun mayoritas adalah para pekerja birokrasi dan swasta lainnya yang harus membagi waktu antara jam kerja dan menempuh kewajiban akademik di kampus. Dari aspek praktis, mereka tidak kalah piawai dari mahasiswa murni, tetapi dari aspek teoritis, inilah sebenarnya substansi yang menjadi telaah dari riset ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasilnya adalah sebagai berikut: penelitian ini menemukan solusi yang realistis, faktual, dan masih dalam koridor aturan akademis atas kebutuhan sekaligus situasi users atau pengguna (mahasiswa) yang pada saat masih bernama STISIP Muhammadiyah Madiun mayoritas adalah para pekerja birokrasi dan swasta lainnya yang harus membagi waktu antara jam kerja dan menempuh kewajiban akademik di kampus.

